Rakyat Bengkulu

LAPORAN INVESTIGASI SURATKABAR TERBAIK IPMA 2020

SENIN, 28 DESEMBER | TAHUN 2020 — Pilihan Utama — www.harianrakyatbengkulu.com — TERBIT 16

Shandy/rb

TUNTAS: Jembatan permanen di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik (TAP) Bengkulu Utara sudah bisa dilewati hari ini.

Selamat Tinggal Jembatan Darurat!

ARGA MAKMUR - Setelah hampir tiga tahun menunggu, pagi ini masyarakat tidak perlu lagi melintasi jembatan darurat di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik (TAP). Hari ini pengendara bisa melintasi jembatan permanen yang sudah tuntas dibangun.

Jembatan permanen tersebut sudah tuntas dua minggu lalu, namun memang untuk pengerasan beton. Jembatan baru bisa dilintasi hari ini.

Baca SELAMAT..Hal 7

KASN Kawal Potensi

Balas Budi Balas Dendam Usai Pilkada

BENGKULU - Meski pemungutan suara pilkada 2020 telah dilaksanakan, pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) belum kendur. Pasalnya, pascapemilihan, masih ada potensi pelanggaran lain berupa praktik balas jasa.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto menyatakan, pihaknya mulai mengamati praktik mutasi jabatan di daerah. Sebab, jika merujuk pengalaman sebelumnya, momen pascapilkada rawan terjadi transaksi antara paslon dan jajaran birokrasi.

Baca BALAS..Hal 7

AGUS PRAMUSINTO

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

"Kami juga akan selalu mengawal agar pascapilkada tidak terjadi politik balas budi dan balas dendam

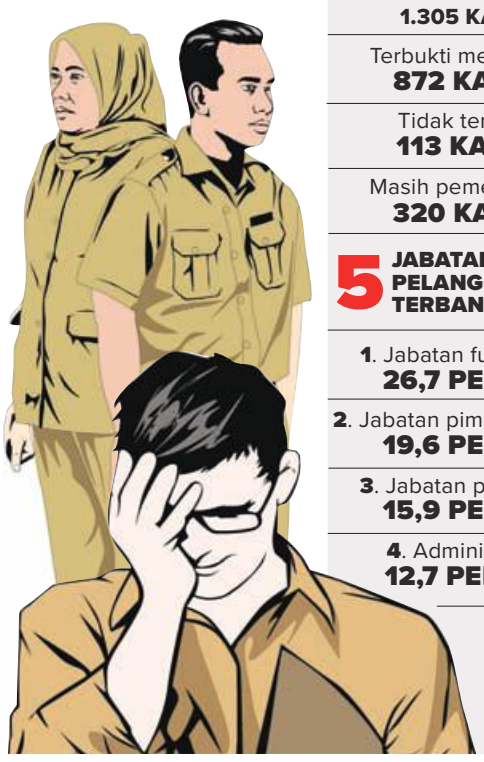

JUMLAH LAPORAN: 1.305 KASUS

- Terbukti melanggar: **872 KASUS**
- Tidak terbukti: **113 KASUS**
- Masih pemeriksaan: **320 KASUS**

5 JABATAN DENGAN PELANGGARAN TERBANYAK

1. Jabatan fungsional: **26,7 PERSEN**
2. Jabatan pimpinan tinggi: **19,6 PERSEN**
3. Jabatan pelaksana: **15,9 PERSEN**
4. Administrator: **12,7 PERSEN**
5. Kepala wilayah: **10,9 PERSEN**

Sumber: KASN

Serahkan APL, Gugatan Segera Masuk BRPK

BENGKULU - Semenjak didaftarkan gugatan pasangan calon gubernur, Agusrin-Imron terkait hasil Pilgub ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 17 Desember lalu. Salah satu tim hukum Agusrin-Imron, M. Zetriansyah menyampaikan bahwa pihaknya akan menyerahkan kelengkapan administrasi dan perbaikan berkas untuk persyaratan Akta permohonan lengkap (APL). Mengingat masa perbaikan yang diberikan MK itu akan berakhir pada 29 mendatang.

EKO SUGIANTO

"InsyaAllah memenuhi syarat, itu kan keluar APL kan. Dan nanti bila selesai maka akan masuk ke buku register di BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi, red)," sampai Zet, kemarin.

Dijelaskannya, apabila nanti gugatan dengan nomor 79. PAN.MK/AP3/12/2020 itu dinyatakan telah memenuhi syarat, maka akan berlanjut ke tahapan selanjutnya. Yakni menunggu waktu digelar persidangan.

Baca SERAHKAN ..Hal 7

VIRAL

Suhuan, Pemuda Nikahi 2 Gadis

Resepsi Sepanggung, Nyanyi Cinta Segitiga

Kisah pernikahan seorang pria dengan dua wanita sekaligus kembali bikin geger jagat maya. Bukan yang pertama kalinya, tapi untuk kesekian kalinya terjadi di Bumi Serasan Sekate. Pemuda beruntung itu, Suhuan alias Sunan. Seperti apa kisah pernikahannya?

Baca RESEPSI ..Hal 7

SUMRINGAH: Suhuan bersama dua istrinya, Anggun Andini dan Vopi Anggraini.

Kuota SNMPTN Diumumkan Hari Ini

JAKARTA – Rangkaian pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dimulai. Hari ini (28/12), Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) mengumumkan besaran kuota siswa yang eligible untuk ikut SNMPTN 2021 bagi masing-masing sekolah.

Baca KUOTA ..Hal 7

❑ Everton vs Manchester City

DIBUKA CARLETTO, DITUTUP CARLETTO

LIVERPOOL – Pep Guardiola menjadikan 2020 sebagai tahun spesial dalam karir kepelatihannya. Untuk kali pertama, Pep menjalin kesepakatan jangka panjang dengan satu klub. Setelah bernegosiasi lama, Pep meneken ekstensi kontrak di Manchester City sampai 2023 pada 19 November lalu.

Itu berarti pelatih asal Santpedor, Spanyol, tersebut bakal menjalani hingga musim ketujuh bersama City. Sebelumnya, Pep menangani FC Barcelona empat musim (2008–2012), lalu tiga musim berkarir di Bayern Muenchen (2013–2016).

Baca DIBUKA ..Hal 7

Peluang Pembelajaran Tatap Muka Makin Kecil

❑ Terkendala Alat, 10 Ruangan Tambahan Belum Beroperasi

ERI YULIAN HIDAYAT

BENGKULU - Pandemi Covid-19 di Provinsi Bengkulu semakin mengganas, bahkan kemarin berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu Minggu (27/12) ada penambahan 100 kasus konfirmasi positif Covid-19. Sehingga untuk total kasus ada 3.452 kasus. Hal inilah yang membuat rencana pembelajaran secara tatap muka, terkendala dilakukan.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Provinsi Bengkulu, Eri Yulian Hidayat menjelaskan

Baca PELUANG ..Hal 7

Eceran Rp 6.000/eksemplar. Langganan Rp 165.000, luar kota tambah ongkos kirim

Selamat Tinggal Jembatan Darurat!

Sambungan dari halaman 1

Sedangkan jembatyan belly yang selama ini digunakan sudah rusak parah dan tidak bisa dilintasi kendaraan roda empat.

Kapolres BU AKBP. Anton Setyo Hartanto, S.Ik, MH melalui Kapolsek Air Besi Iptu. Aljum Fitri, SH, MT menuturkan jika sudah berkoordinasi dengan pihak pelaksana jembatan dan hari ini akan jembatan bisa dilintasi. Selama tiga minggu ini, jembatan TAP ditutup total lantaran jembatan belly rusak parah. "Besok (Pagi ini, red) pukul 06.00 WIB jembatan sudah kita buka total. Sehingga tidak ada lagi yang melintasi jembatan belly. Kendaraan sudah bisa melintas di jemabtan baru," kata Aljum.

Setelah jembatan permanen diaktifkan, polisi akan menutup total jembatan darurat belly yang akan selama ini digunakan dan hanya terpasang beberapa lembar papan yang digunakan pemotor untuk melintas. Polisi akan menutup total jembatan agar memang tidak ada lagi kendaraan yang melintas.

"Karena jika ada yang memaksa melintas maka akan sangat berbahaya. Karena memang jembatan permanent sudah dibuka maka memang kita akan tutup total jembatan belly," pungkas Aljum.

Sementara Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Septi Erwadi menuturkan jika jembatan belly yang sudah tiga tahun terpasang di Desa Tanjung Agung tersebut akan dicopot dan memang milik Dinas PUPR Provinsi Bengkulu. ia menilai jembatan tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi.

"Jembatan belly tersebut milik Pemprov dan memang hanya untuk darurat. Setelah jembatan permanent dibangun jadi memang sudah tidak dibutuhkan lagi," terangnya.

Ia menuturkan jika hari ini adalah sesuai sesuai batas 28 hari waktu pembetonan. Dengan didiamkan selama 28 hari usai dilakukan pembetonan, ia yakin kualitas lantai beton jembatan sudah benar-benar kuat menahan beban lalu lintas kendaraan diatasnya. "Seharusnya sejak seminggu lalu sudah bisa dilintasi kendaraan ringan. Namun untuk memastikan kondisi jemabtan kita tambah seminggu lagi. Hari ini semua kendaraan sudah boleh melintasi jembatan dan kita pastikan sudah kuat," pungkas Septi. **(qia)**

Kuota SNMPTN Diumumkan Hari Ini

Sambungan dari halaman 1

Ketua Pelaksana Eksekutif LTMPT Budi Prasetyo mengungkapkan, agenda pengumuman kuota SNMPTN ini masih sesuai jadwal. Sekolah dapat mengakses laman resmi LTMPT untuk mengetahui berapa kuota siswa eligible untuk daftar SNMPTN.

"InsyaAllah masih sesuai jadwal," katanya, kemarin (27/12).

Dia menjelaskan, penentuan kuota ini didasarkan pada beberapa hal. Pertama, data akreditasi sekolah yang bersumber dari pusat data dan informasi (pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kedua, masih dari Pusdatin, data jumlah siswa jurusan parallel. Missal, jumlah siswa jurusan IPA dan IPS.

Berdasarkan kedua data tersebut, kemudian dihitung dengan ketentuan bagi yang berakreditasi A mendapat jatah 40 persen. Jadi, bilamana sekolah akreditasi A ini memiliki jumlah siswa IPA paralel 100 orang, maka kuota untuk IPA sebanyak 40 orang. Berlaku pula bagi jurusan IPS.

Sistem kuota ini juga sudah diterapkan di 2020. Bedanya, sekolah harus mengisi seluruh data siswa kelas 12 ke pengisian pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS) untuk memperoleh kursi pendaftaran SNMPTN sebanyak mungkin. Sebab, kuota 40 persen bergantung dari jumlah siswa yang dimasukkan dalam PDSS tersebut. Sementara tahun depan, sekolah cukup mengisi PDSS dengan data siswa eligible saja sesuai besaran "kursi" yang ditetapkan untuk pendaftaran.

"Kita buat lebih sederhana agar sekolah lebih ringan kerjaannya," papar Budi. (**jpg**)

DIBUKA CARLETTO, DITUTUP CARLETTO

Sambungan dari halaman 1

Pada tahun ini pula, Pep berhasil mengakhiri statistik selalu kalah kontra Carlo Ancelotti. Kemenangan 2-1 atas Everton asuhan Ancelotti pada Premier League musim lalu sekaligus menandai start awal tahun yang gemilang bagi City. The Citizens menang 2-1 di Etihad Stadium (2/1).

Dalam pertemuan sebelumnya, Sang Filsuf –julukan Pep– selalu kalah saat menangani Bayern dan Ancelotti masih menjadi entrenador Real Madrid.

Uniknya, setelah menjadi lawan pada awal tahun, Carletto –sapaan akrab Ancelotti– pula yang menjadi lawan Pep di laga pemungkas tahun ini. Tepatnya saat City menghadapi Everton di Goodison Park dalam matchweek ke-16 Premier League dini hari nanti (siaran langsung Mola TV pukul 03.00 WIB).

Pep, tampaknya, serius menutup tahun ini dengan happy ending bersama City. Buktinya, pelatih pemenang dua gelar Premier League (2017–2018 dan 2018–2019) itu sedikit "menyimpan tenaga" anak asuhnya pada Boxing Day kemarin (27/12).

Bermain di Etihad Stadium, City cukup puas menang dua gol tanpa balas dengan Pep mengusung skema tidak lazim 3-4-3. Sergio Aguero sebagai satu-satunya striker murni tersisa (setelah Gabriel Jesus terpapar Covid-19) hanya turun sebagai pengganti.

Pep pun tidak memungkirinya. "Kami memang membangun kekuatan sebelum ke sana (Goodison Park, Red)," ucapnya sebagaimana dilansir Four Four Two.

"Yang paling penting adalah setiap pemain bisa menjalankan tugas masing-masing. Positional game kami sudah sempurna," imbuhnya.

Hanya, Pep menyadari bahwa Everton yang dihadapi akhir tahun ini tidak sama dengan Everton awal tahun ini. The Toffees bukan lagi tim yang berkutat di luar zona Eropa atau di posisi kesepuluh, melainkan kini mampu merangsek hingga ke peringkat kedua di bawah juara bertahan Liverpool FC.

"Kali ini (Everton di peringkat kedua, Red) bakal menjadi motivasi kami sekaligus ambisi pemain untuk meraih sesuatu musim ini," ungkap Ancelotti di laman resmi klub.

Bukti kinerja Ancelotti membuahkan hasil adalah Everton musim ini memiliki pertahanan yang lebih solid. Kemasukan 19 kali dalam 15 laga atau rata-rata 1,26 gol. Bandingkan dengan musim lalu yang rata-rata kemasukan 1,5 gol per laga hingga paro musim.

Tapi, tetap saja tim dengan pertahanan terbaik di Premier League musim ini adalah City. Gawang The Citizens baru kemasukan 12 gol dari 14 laga (0,86 gol per laga). Selain kedatangan bek baru Ruben Dias dan Nathan Ake, bek lama yang rencananya disingkirkan, John Stones, malah bangkit.

Stones sekaligus merupakan pemain yang namanya mulai dikenal semasa membela Everton (2013–2016). Kepindahannya ke City empat tahun lalu sempat menjadikannya sebagai bek termahal kedua di dunia setelah David Luiz. Nominal transfernya mencapai GBP 47,5 juta (Rp 897 miliar).

"Dari pemain yang sebelumnya tidak punya masa depan di Etihad Stadium dan 16 bulan lebih diabaikan timnas Inggris, John Stones kini membuat Manchester City berencana memperpanjang kontraknya (yang habis pada pengujung musim ini, Red)," tulis Daily Star. **(ren/c19/dns)**

Peluang Pembelajaran Tatap Muka Makin Kecil

Sambungan dari halaman 1

Pihaknya masih berkoordinasi dengan Satgas Pencegahan Covid-19 Provinsi Bengkulu terkait rencana pembelajaran di sekolah.

"Karena situasi sekarang semakin meningkat. Apalagi angka kematian juga meningkatkan salah satunya di Kabul Mukomuko. Kita juga tidak mau ada tambahan klaster dari sekolah," kata Eri, kemarin.

Dijelaskannya, untuk sementara ini pihaknya berencana untuk tetap melaksanakan pembelajaran melalui media dalam jaringan (Daring). Ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah. "Sementara ini kita tetap melakukan daring. Kita punya supervisi daring untuk mengawasi pembelajaran ini. Kita juga telah bekerja sama dengan pihak LPMP," sampai Eri.

Dengan ini, diharapkan agar pelaksanaan pembelajaran daring nanti dapat lebih efisien. Pasalnya, ada tim yang diturunkan untuk memantau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di rumah itu. " Sekaligus membantu Koordinasi dengan wali murid dalam pembelajaran ini," imbuhnya.

Sementara itu, antrean pasien positif Covid-19 di Irna Fatmawati RSMY Bengkulu masih banyak. Direktur Utama (Dirut) RSUD M Yunus (RSMY) Bengkulu, dr. Zulkimaulub Ritonga menyampaikan saat ini melihat kondisi penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19. Termasuk dalam kondisi krusial, yang istilah ini namanya emergency crisis. Untuk itu, pihak RSMY Bengkulu juga akan membuka 10 ruangan tambahan di lantai 2, akan tetapi untuk kelengkapan alat alatnya penunjang itu belum terpenuhi.

"Itu tempat tidur nya sudah ada, sarana oksigen nya ada. Alat alat monitor, ventilator, HNFC (High Flow Nasal Cannula, red) itu belum," kata Zulkimaulub, kemarin.

Kondisi ini perlu perhatian segera, lanjutnya, dengan kondisi saat ini, apalagi antrean masuk lebih kurang 7 orang. Dimana yang saat ini ada 35 pasien yang dirawat dengan ada satu kamar 2 pasien. Dengan 21 ruangan di lantai 1 Irna Fatmawati. "Masih kurang, untuk itu lantai 2 itu bila mulai kita isi," tambahnya.

Dijelaskannya, sekarang ini ada 31 kamar, sehingga jika masing-masing itu di isi 2 orang pasien. Maka dapat menampung lebih banyak pasien, kapasitas nya bisa 40-50 pasien. Sehingga dapat meminimalisir jumlah antrian pasien Covid-19 yang hendak dan membutuhkan perawatan di ruang Irna Fatmawati. Mengingat kondisi pasien terus meningkat, ia menyampaikan bahwa untuk pengadaan alat-alat tersebut juga harus cepat.

"Untuk alat juga harus cepat, dan dua hari lalu kita dapat 5 alat HFNC dari BNPB, ventilator, monitor itu kita tidak mendapatkan lagi. Sebenarnya kita juga masih membutuhkan, dan paling butuh adalah monitor, untuk monitoring pasien," ungkap Zulkimaulub.Selain itu, permasalahan juga masih terkait jumlah perawat yang ada di ruangan khusus pasien Covid-19 itu. Pasalnya, sampai saat ini usulan penambahan perawat pun belum terealisasi. "Untuk shift perawat kita belum mendapatkan tambahan dari usulan kita," tukasnya.

Ia menjelaskan untuk jumlah perawat di Irna Fatmawati yang mana selama ini rata rata untuk 4 perawat dalam 1 shift merawat 12 pasien, itu masih normal. Namun sekarang, dalam satu shift itu harus merawat 30 pasien.

"Nah disini kasian dengan perawatnya dan pasien pasien yang tidak maksimal perawatannya. Itulah kondisi saat ini, walaupun kami sudah mencari alternatif dengan memindahkan perawat dari ruang lain, namun kami kan masih menerima pasien selain Covid-19 nah itulah yang menjadi kendala," papar Zulkimaulub.**(war)**

Serahkan APL, Gugatan Segera Masuk BRPK

Sambungan dari halaman 1

"Baru nanti diberitahukan kepada pihak tergugat dengan pihak-pihak terkait. Dan setelah itu akan diberikan relase untuk pemberitahuan hari sidang dari MK ya," tambahnya.

Kendati demikian, ia memastikan bahwa pihaknya telah siap dengan bukti-bukti yang memperkuat gugatan kliennya dalam gugatan MK itu. Dan dalam gugatan itu ada dua poin besar. Yakni, pertama yang pihaknya mendalilkan bahwa ada 100 ribu penggelembungan suara diduga oleh salah satu Paslon. Serta pihaknya juga menduga ada 60ribu suara untuk paslon nomor urut 3 Agusrin-Imron, yang dirusak.

"Jadi dari hitungan kita itu ada suara kita 34 persen, Helmi-Muslihan itu 33 persen dan Rohidin itu 32 persen. Dan ada dituntut kita untuk mendiskualifikasi," imbuhnya.

Terpisah, dari sisi tergugat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu melalui komisioner KPU Provinsi Bengkulu Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto SP, MM. menyampaikan bahwa pihaknya akan kooperatif sesuai dengan regulasi yang ada. Dan saat ini, pihaknya juga masih menunggu proses yang saat ini tengah berjalan di MK. Untuk itu pihaknya telah berkoordinasi terkait persiapan dan pemetaan sengketa perselisihan hasil pemilihan itu. Terkait hasil rekapitulasi perhitungan suara pada pemilihan kepala daerah lalu.

" Sebagaimana yang kita ketahui untuk provinsi sudah masuk gugatannya. Untuk Pilgub kan lokusnya ada d seluruh provinsi," sampai Eko.

Dijelaskannya, dengan koordinasi tersebut untuk menyiapkan segala sesuatunya, terkait dengan materi pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon. Mengingat di beberapa kabupaten juga ada gugatan.

"Kita juga menyiapkan, menyamakan persepsi dan menyiapkan segala sesuatu berkenaan dengan jawaban dan alat bukti," jelasnya.

Sehingga pihaknya pada saat menghadapi gugatan nanti, betul betul telah siap. Baik secara fisik, materi, maupun secara mental. Untuk menghadapi gugatan yang diajukan oleh salah satu peserta Pilkada ini.

"Kita juga siap menghadapinya. Berupa jawaban dan menyiapkan alat bukti yang kaitannya menjadi gugatan pemohon," tutup Eko. **(war)**

Balas Budi Balas Dendam...

Sambungan dari halaman 1

"Kami juga akan selalu mengawal agar pascapilkada tidak terjadi politik balas budi dan balas dendam dalam pengisian jabatan birokrasi," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (27/12).

Praktik balas budi, lanjut Agus, biasanya dilakukan paslon terpilih terhadap jajaran ASN yang sudah membantu pemenangan. Sebaliknya, praktik balas dendam dialamatkan kepada birokrat yang mengambil posisi berseberangan dengan paslon terpilih atau mendukung lawan politiknya.

Meski demikian, Agus berharap praktik tersebut tidak terjadi di daerah. Dia mengingatkan kepala daerah terpilih untuk memilih orang-orang yang kompeten dan mengabaikan persoalan dukung-mendukung. Hal itu dapat menjadi blunder kebijakan. "Mengabaikan kompetensi, kinerja, dan integritas justru akan menggagalkan program-program pembangunan yang dijanjikan dalam masa kampanye," imbuhnya. Dan jika itu terjadi, akan mencoreng karir politik kepala daerah.

Agus menegaskan, jika menemukan proses mutasi jabatan yang tidak sesuai prosedur dan terindikasi praktik balas budi, pihaknya dapat melakukan intervensi. "Bisa kami batalkan. Misalnya, promosi tidak melalui seleksi terbuka, tidak ada pansel, tidak ada uji kompetensi, dan lain-lain," ucapnya.

Selain mengamati netralitas pascapilkada, KASN masih menyelesaikan kasus yang terjadi sebelum coblosan. Hingga kemarin kasus yang masuk sudah mencapai 1.305 laporan. Dari jumlah tersebut, 985 sudah selesai diproses. Dengan 872 kasus di antaranya dinyatakan terbukti melanggar dan telah dilanjutkan rekomendasi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan berharap PPK dapat segera memproses pemberian sanksi. Apalagi, tahapan pilkada sudah memasuki masa akhir sehingga tidak semua bisa dituntaskan. "Untuk menyelesaikan kami minta segera," ujarnya. Berdasar catatan Bawaslu, dari 985 rekomendasi yang sudah dikeluarkan KASN, baru sekitar 72 persen yang dijalankan. "Masih ada sekitar 28 persen (yang belum diproses PPK, Red)," imbuhnya.

Abhan menambahkan, jumlah pelanggaran netralitas yang lebih dari 1.300 kasus merupakan yang tertinggi sejak pilkada 2015. Hal itu perlu menjadi catatan untuk dilakukan perbaikan regulasi ke depannya.

Mutasi dan Rotasi Bukan Balas Dendam

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan H. Sapuan-Wasri, Nasir Ahmad menyatakan, seharusnya didalam mutasi maupun rotasi pejabat atau dalam pengisian jabatan struktural, tidak berdasarkan balas budi maupun balas dendam. "Memang seharusnya tidak ada balas budi dalam hal pengelolaan manajemen pemerintahan di Kabupaten Mukomuko," kata Nasri.

Rotasi ataupun mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemkab Mukomuko, dilaksanakan untuk percepatan capaian perubahan Kabupaten Mukomuko yang lebih baik. Oleh sebab itu, untuk terwujudnya itu, sesuai komitmen dan misi dari H. Sapuan-Wasri, penempatan PNS sesuai dengan basic dan kemampuannya, yang diperlukan.

"Jadi ini perlu diluruskan kedepan. Dilakukan proses mutasi dan rotasi pegawai itu dengan harapan, penempatan orang-orang sesuai dengan basic dan kemampuannya," kata Nasir.

Dengan demikian, menyusun ulang pejabat dan struktur yang ada, perlu dilakukan kedepan. Dengan harapan, semuanya dapat bekerja dengan baik, sehingga tercapai apa yang menjadi visi dan misi H. Sapuan-Wasri, sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Mukomuko

"Kinerja para ASN, dalam hal memimpin, dalam hal melakukan pekerjaan di OPD masing-masing, perlu dievaluasi. Dimana pasnya, dimana kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itu yang dikolaborasikan, sehingga saling tertutupi. Dengan begitu, kinerja masing-masing berjalan sesuai aturan dan kemampuan. Jadi tidak berdasarkan balas budi ataupun balas dendam,' pungkas Nasir. **(hue/jpg)**

Resepsi Sepanggung, Nyanyi...

Sambungan dari halaman 1

VIDEO berdurasi 1:00 menit viral di media sosial (medsos). Begitu banyak yang berikan tanggapan. Misalnya di akun Instagram @ bekayau, ketiga mempelai terlihat diiringi menaiki panggung pelaminan. Terdengar sambutan suara master of ceremony (MC) dan alunan musik dangdut. Begitu slide digeser, tampil foto ketiga mempelai sedang berdiri. Bisa dihitung dengan jari, orang yang memakai masker pada video tersebut.

"Arai ikak tesengeh galekk, perjalanan masih panjang, ape tahan nia bemaduu," tulis akun @septiani.wd0118. Lalu akun @ kupik_indah menjelaskan, "Bukan lgsg d nikahi sekaligus, tapi istri pertama d sandingkan pas suaminya nkh hari ini, sbb tdk tercatat d pemerintah kalo menikah lgsg dua sekaligus spt itu, kalo secara agama boleh tapi secara negara tidak boleh...".

Kemudian lebih ramai lagi di akun instagram @miminsekayu, slide pertama juga foto kedua mempelai. Slide kedua, pada video berdurasi 0:30 detik itu kedua mempelai wanita menyanyikan lagu berjudul Cinta Segitiga yang dipopulerkan Rita Sugiarto. Mempelai pria tersenyum malu. Terlihat ada orang dewasa dan anak-anak ikut berjoget di atas panggung.

Sementara di slide ketiga, tamu undangan memvideokan bersama ketiga mempelai pada video berdurasi 0:08 detik itu. "Viral pernikahan yg terjadi di Desa Talang Piase. Lantaran pernikahan tersebut terjadi dengan 2 pengantin wanita sekaligus. Yakni, Anggun dan Vopi. Sedangkan pengantin pria bernama Suwan," tulis @miminsekayu.

Netizen pun berkomentar beragam, di kedua akun instragram tersebut. "Alangke padek ilmu urang min," tulis @eko_leecongwei. "Lapang n.n sekali dayung due pulau dapat," timpal @arifsetiawan0510. Akun @kupek_indah pun tak kalah julid. "Istri pertama sabar bgt n mau d sandingkan bareng gtu min, apa daya aku wanita biasa tak sanggup d madu mon laki dak glk d racun wkwkwk...".

Diketahui, resepsi yang viral di media sosial itu berlangsung di Desa Talang Piase, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin. Mempelai pria bernama Suhuan, yang akrab disapa Sunan, warga Desa Talang Piase. Mempelai wanitanya, Anggun Andini alias Anggun asal Desa Rantau Sialang, dan Vopi Anggraini asal Desa Tebing Bulang.

Dari foto undangan pernikahan keduanya, tertera jelas kalau akad nikah Sunan dengan Anggun berlangsung 27 September di Desa Talang Piase. Sedangkan akad nikah Sunan dengan Vopi berlangsung 23 Oktober lalu di Desa Tebing Bulang. Barulah resepsi mereka dijadikan satu, kemarin (26/12), mulai pukul 09.00 WIB, di lapangan sepak bola Desa Talang Piase, Kecamatan Lawang Wetan, Muba.

Kepala Desa (Kades) Talang Piase Zul Azmi, membenarkan resepsi pernikahan tersebut digelar di desanya. "Ada yang di bawah umur, jadi nikah di bawah tangan. Mereka sempat mau urus NA, Pak Sekdes yang urus karena masih keluarganya. Saya juga kurang tahu bagaimana ceritanya mereka bisa kawin sekaligus dua seperti itu," ujarnya, kemarin.

Sementara Sekretaris (Sekdes) Talang Piase, Piran mengatakan pernikahan Suhuan alias Sunan dengan kedua wanita tersebut, semuanya secara siri. "Terbentur aturan semua. Memang ada yang sudah 18 (tahun) perempuannya. Tapi aturan baru tidak membolehkan, minimal 19 tahun," pungkasnya.

Kepala KUA Sungai Keruh, Sidik Nurdiansyah memastikan kedua perempuan yang menikah dengan Sunan tidak mengurus izin pernikahan di kantor KUA yang ia pimpin. "Jadi, nikahnya di bawah tangan atau nikah siri karena tidak tercatat. Mereka juga di bawah umur, masih 18 tahun," ujar Sidik.

Dia menjelaskan untuk pasangan yang hendak menikah baik pria maupun wanita, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 batas umur menikah baik pria maupun wanita minimal 19 tahun. "Itu aturan baru pengganti undang undang perkawinan yang lama. Kalau dulu memang 16 tahun," tandasnya.

Dengan sistem yang baru serba online, sulit untuk memanipulasi usia calon pengantin. "Kalau dulu manual, kalau sekarang kan dengan SimKah tidak bisa lagi karena terkoneksi juga dengan data NIK, jadi ketahuan berapa umur sebenarnya," tukasnya.

Kepala KUA Lawang Wetan, Lutfi juga mengungkapkan hal senada, dia menegaskan tidak ada tercatat pernikahan kedua mempelai. "Sudah kita cross check begitu viral, tidak tercatat. Mereka juga tidak ada mengurus izin," katanya.

Kepala DPPPA Muba Dewi Kartika mengatakan pihaknya akan segera melakukan kroschek lapangan terkait kasus pernikahan tersebut. "Jelas orang tua yang salah, kalau sampai menikahkan anak di bawah umur. Kita belum tahu juga latar belakang mereka menikah karena apa, makanya nanti kita cek," ujar dia.

Pihaknya kata dia mengedepankan pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi. Dia mengakui kesulitan selama ini menghadapi budaya atau kultur menikah muda di kalangan masyarakat, "Biasanya faktor kemiskinan, anak di bawah umur bekerja atau dinikahkan," pungkasnya.

Sekadar mengingatkan, resepsi pernikahan tiga mempelai sekaligus bukan kali pertama di Kabupaten Muba. Pada 9 November 2017, Cindra pernah bersanding dengan dua istrinya, Indah Lestari dan Perawati, di Desa Lumpatan II, Kecamatan Sekayu. Cindra menikahi Indah pada 6 November 2017, baru menikahi Perawati pada 8 November 2017.

Beberapa sebelumnya, sekitar Mei 2017, pernikahan serupa juga pernah terjadi di Desa Kasmaran, Kecamatan Babat Toman. HN duduk bersanding di pelaminan, dengan dua istrinya, mengenakan baju adat Palembang. Kades Kasmaran kala itu, Effendi membenarkan HN mengadapnya mengurus surat pengantar nikah (NA) meminang gadis asal Desa Karang Ringin. Kades pun ikut menghadiri acara seserahan.

Namun dua hari berselang, HN datang lagi minta diterbitkan surat NA. Hendak menikahi gadis asal Desa Karang Anyar. Karena tidak mungkin, dia tidak mengeluarkan NA lagi untuk HN. Nah seminggu kemudian, atau Minggu (14/5/2017), tiba-tiba HN menggelar resepsi di rumahnya. Duduk bersanding dengan dua istrinya. Diduganya, satu istri dinikahinya secara siri.

Lebih jauh sebelumnya, sekitar tahun 2016 juga di Kecamatan Babat Toman, pernah terjadi resepsi pernikahan tiga orang sekaligus. Antara Ardiansyah, dengan dua wanita sekaligus, yakni Ria dan Pegi.

Momen pernikahan lain yang sempat menghebohkan di Kabupaten Muba, yakni pengantin cilik di Kecamatan Sanga Desa. Pelajar SMP berinisial RS (14), menikahi BM (14) yang putus sekolah. Akad nikah berlangsung di kediaman mempelai perempuan, di Desa Ngulak, Kamis (11/7/2019) malam. **(kur/air/ce1)**

Acara Tahun Baru akan Dibubarkan

Polisi Tak Terbitkan Izin

ARGA MAKMUR – Polres Bengkulu Utara (BU) memastikan tidak menerbitkan izin untuk acara-acara yang sifatnya menyebabkan kerumunan massa dan keramaian. Termasuk acara yang mungkin ada dalam perayaan pergantian tahun, Kamis (31/12) nanti.

Kapolres BU AKBP. Anton Setyo Hartanto, S.IK, MH melalui Kabag Ops AKP. Jufri, S.IK menuturkan jika Polisi akan melakukan patroli dimalam pergantian tahun nantinya. Ia meminta masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya berkerumun.

"Kita juga sudah melarang acara-acara seperti pentas musik, pesta kembang api atau acara lainnya yang mengundang kerumunan," ujar Jufri.

Selain memang sudah ada surat edaran dari Bupati BU, juga sudah terbit maklumat dari Kapolri terkait dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. "Sehingga jika masih ditemukan kegiatan kerumunan, maka Polisi bersama Satgas Covid-19 akan melakukan pembubaran," tegasnya.

Kegiatan ini dalam rangka pencegahan meluasnya penularan Covid-19 terutama yang disebabkan dari kerumunan. Sehingga seluruh aktifitas yang mendatangkan kerumunan dilarang oleh pemerintah sampai kasus Covid-19 kembali terkendali.

"Saat ini kasus Covid-19 di Indonesia terutama di BU terus meningkat. Sehingga memang kita melakukan langkah-langkah tegas untuk mencegah poenyebaran," pungkas Jufri. **(qia)**

Ratusan Hektare Kebun Masuk Daftar Replanting

ARGA MAKMUR – Pemkab Bengkulu Utara (BU) terus melanjutkan program replanting bagi perkebunan kelapa sawit masyarakat tahun depan. bahkan sudah ada raturan hektare lahan yang terdafar akan mengikuti program replanting tahun depan.

Bupati BU Ir. H Mian menuturkan jika progrma tersebut merupakan program unggulan BU. Bahkan saat ini sudah ada masyarakat yang merasakan hasil mengikuti program replanting tersebut, terutama yang mengikuti program replanting tahap pertama.

"Saat ini yang mengikuti program replanting tahap pertama sudah ada yang mulai menikmati hasil dengan buah pasir pertama. Jadi memang sangat menguntungkan petani," terangnya.

Melakukan kelompok tani, petani sudah mendaftar dan tinggal menunggu realisasi program replanting tahun depan. Masing-masing kelompok tani minimal menyiapkan 50 hektare lahan yang akan mengikuti program replanting perkebunan kelapa sawit tersebut.

"Program replanting yang kita lakukan ini terbaik ketiga tingkat nasional dan menjadi percontohan di beberapa daerah. Program ini terus kita lanjutkan," terangnya.

Dengan program replanting, masyarakat hanya menyiapkan lahan dengan buah kelapa sawit yang tidak produktif. Dalam program tersebut, nantinya penebangfan batang, bibit unggul hingga pupuk kelapa sawit akan ditanggung oleh program tersebut.

"Jadi memang sangat menguntungkan petani. Dalam kurun waktu empat atau lima tahun kedepan, mereka sudah bisa mendapatkan hasil TBS yang berkualias dan harga yang kembali tinggi," terang Mian.

Saat ini masyarakat pemilik perkebunan karet tidak bisa melakukan peremajaan lahan karena terkendala biaya peremajaan mulai dari penebangan, harga bibit dan perawatan. Namun dengan program tersebut, semuanya sudah ditanggung.

"Saat ini kita juga aktif melakukan sosialisasi pada kelompok tani sehingga semua masyarakat bisa masuk dalam program tersebut," pungkas Mian. **(qia)**

SANDY/RB

DISINFEKSI : Tim Satgas Covid-19 BU yang terus melakukan disinfeksi menghindari penyebaran Covid-19.

Minta Satgas Tegas Tertibkan Keramaian

Mian : Jangan Sampai Saya Diperiksa

ARGA MAKMUR – Saat ini jumlah warga Bengkulu Utara (BU) yang terjangkit Covid-19 terus meningkat. Hal ini membuat Pemkab BU menerbitkan Surat Edaran (SE) yang melarang seluruh aktifitas warga yang terkait dengan keramaian.

Bupati BU Ir. H Mian menegaskan pada seluruh camat sebagai Satgas Covid-19 Kecamatan untuk tegas dalam menindak aktifitas masyarakat yang mengundang keramaian ataupun tidak mengindahkan protokol kesehatan. Sehinggga bisa menurunkan kasus Covid-19.

"Silakan berkoordinasi dengan TNI Polri yang ada di Kecamatan sebagai tim Satgas Kecamatan. Dasar SE sudah tegas dan saya minta Satgas untuk menerapkan di tingkat Kecamatan. Karena memang kita harus lebih tegas demi kesehatan masyarakat," tegas Mian.

Ia menuturkan jika memang salah satu lokasi penyebaran kasus Covid-19 di BU yang selama ini terjadi adalah masih aktifnya kerumunannya warga, seperti pesta. Sedangkan aktifitas tersebut tidak mengindahkan protokol kesehatan.

"Jangan sampai saya karena adanya keramiaan saya diperiksa oleh kepolisian nanti, dengan tuduhan pembiaran. Kita harus lebih tegas, karena memang kesehatan masyarakat adalah hukum tertinggi," kata Mian.

Dalam SE yang diterbitkan Pemkab BU terhitung Senin lalu, diantaranya melarang masyarakat melalui pesta apapun bentuknya yang bisa mengundang kerumunan. Masyarakat hanya boleh menggelar acara dengan jumlah undangan maksimal 20 orang dan wajib mengikuti prokes.

Bahkan Satgas juga bisa membubarkan acara jika memang masih ada aktifitas kerumunan massa. "Saat ini jumalh aksus Covid-19 kita terus meningkat. Baik itu angka masyarakat yang tertular maupun angka warga yang meninggal sudah menjadi 12 orang. Sehingga mau tidak mau kita harus tegas dalam menerapkan aturan," pungkas Mian. **(qia)**

MUSRENBANG KELURAHAN PURWODADI SUSKES

KELURAHAN Purwodadi Arga Makmur Bengkulu Utara (BU) sukses melaksanakan Musawarah tingkat Kelurahan. Musyawarah ini untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui RT dan RW untuk dibawa ke Musyawarah Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. **(qia/adv)**

PIDATO: Camat Arga Makmur Jon Kenedi dan Lurah Purwodadi Sugeng Harsono saat menyampaikan pidatonya.

PESERTA: Seluruh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga yang hadir untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat.

PIMPINAN: Camat, Bersama Kabag Pemerintahan dan Kabid Bappeda serta Lurah dan Kasi Kelurahan Purwodadi yang memimpin Musrenbang.

Menteri Baru, BU Ajukan Tambahan BST Lagi

ARGA MAKMUR – Setelah Presiden melantik Mensos yang baru baru Pemkab Bengkulu Utara (BU) kembali akan berkoordinasi terkait dengan Bantuan Sosial Tunai (BST). Pemkab BU akan berusaha mengajukan kembali tambahan penerima BST ke Kemensos.

Saat ini BU memang mendapatkan BST terbesar di Provinsi Bengkulu dengan total 24.476 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Mulai dari BST reguler tahap pertama maupun tambahan dari BST petani karet terdampak Covid-19 hingga BST pengalihan dari Dana Desa (DD).

Kadis Sosial BU Suwanto, M.Ap menuturkan jika Pemkab BU akan coba mengajukan kembali tambahan kuota BST. Sehingga memang lebih banyak lagi warga BU bisa mendapatkan BST, termasuk jika ada kemungkinan penambahan pengalihan dari penerima BLT DD.

"Kita berusaha mengajukan penambahan jika memang ada kuota penambahan lagi untuk tahun depan," kata Suwanto.

Terhitung 1 Januari, mendatang 24.476 penerima BST di BU akan mendapatkan Rp 200 ribu perbulan selama enam bulan atau hingga Juni. Selama sudah berjalan tahun ini,BST dinilai sangat membantu dalam peningkatan ekonomi warga.

"Target Ibu Menteri memang BST dibayarkan di minggu pertama tahun depan. Ini sangat membantu perputaran ekonomi masyarakat di BU dan peningkatan daya beli," terangnya.

Selain soal BST, Pemkab BU juga akan mengajukan data terbaru sebagai Basis Data Terpadu (BDT) warga kurang mampu yang berhak menerima program sosial. Hal ini untuk memperbaharui BDT yang lama lantaran dinilai sudah tidak sesuai lagi.

"Karena ada perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Sehingga memang data tersebut kita perbaharui. Karena terkait dengan program-program sosial yang akan diberikan oleh Kemensos," pungkas Suwanto. **(qia)**

Lelang Jabatan Diprediksi Agustus

ARGA MAKMUR – Pemkab Bengkulu Utara (BU) sudah menganggarkan dana untuk pelaksanaan lelang jabatan eselon II 2021. Namun pengisian jabatan baru bisa dilakukan di bulan Agustus atau enam bulan setelah Ir. Mian dan Arie Septia Adinata, M.Ap kembali dilantik di periode kedua.

Diperkirakan hanya ada satu kali lelang jabatan yang dilakukan tahun depan untuk pengisian sleuruh jabatan Eselon II yang kosong. Saat ini setidaknya ada tiga jabatan Eselon II yang kosong masing-masing Kadis Perdagangan, Kadis Perhubungan dan Badan Kesbangpol. Namun akan bertambah lagi dengan adanya pejabat Eselon II yang pensiun tahun ini.

Sekda Dr. Haryadi, MM, M.Si menuturkan jika untuk pengisian jabatan Eselon II akan tetap dilakukan lelang jabatan. Saat ini jabatan-jabatan termasuk masih diisi oleh Pelaksana Tugas. Termasuk jika nantinya Badan Kesbangpol ynag merupakan nomenklatur baru akan disahkan.

"Untuk Badan Kesbangpol masih dalam pembuatan Perbup, setelah Perbup selesai baru akan kita lakukan pengisian jabatan. Jika memang tidak mengisi dari jabatan yang ada, maka jabatan kepala akan diisi plt," terangnya.

Ia memastikan jika tidak ada masalah jika memang lelang jabatan harus menunggu hingga Agustus mendatang. Ia menilai sejauh ini aktifitas OPD yang diisi oleh Plt tersebut berjalan dengan baik dan tidak mengganggu program-program pembangunan.

"Namun memang tetap akan kita lakukan lelang untuk pengisian jika memang sudah memanuhi syarat waktu. Untuk dananya sudah kita anggarkan dalam APBD," pungkas Sekda. **(qia)**

2021, Bansos Covid Tetap Disalurkan

KOTA MANNA - Dalam rangka pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, Pemkab Bengkulu Selatan (BS) kembali menganggarkan bantuan sosial untuk masyarakat pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

DPRD bersama Pemerintah Daerah BS telah menyepakati dan mengesahkan APBD tahun anggaran 2021, dalam anggaran yang telah disahkan tersebut, dipastikan bahwa Pemerintah Daerah kembali akan menganggarkan bantuan sosial (Bansos) untuk pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

Anggaran yang dialokasikan untuk Bansos ini totalnya mencapai Rp 2,1 miliar, Bansos yang akan disalurkan di 2021 nanti bisa berupa uang tunai atau pun dalam bentuk barang, diharapkan melalui Bansos akan disalurkan tersebut dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat.

Selain menganggarkan Bansos Ketua DPRD BS Barli Halim, SE mengatakan, pada APBD tahun 2021 juga mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga yang totalnya mencapai Rp 4,5 milir rupiah.

"Tetap, tahun 2021 Bansos disalurkan dan nilainya mencapai Rp 2,1 miliar, selain itu ada juga anggaran tak terduga," jelas Barli.

Juga melalui APBD BS tahun 2021, Pemerintah Daerah juga berencana akan memberikan bantuan belanja bunga kepada pelaku UMKM.**(tek)**

Larangan Resepsi Pernikahan Berlaku

KOTA MANNA – Terhitung sejak 27 Desember 2020, Pemkab Bengkulu Selatan (BS) bersama Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 mulai memberlakukan aturan larangan resepsi pernikahan di Kabupten BS. Oleh sebab itu hingga waktu yang belum ditentukan tidak boleh ada yang menggelar resepsi pernikahan lantaran dikhawatirkan membuat kerumunan.

Sejak jauh hari tim gugus tugas yang terdiri dari Pemkab BS bersama aparat penegak hukum telah mengeluarkan surat edaran pada masyarakat BS agar tidak boleh lagi menggelar resepsi pernikahan dimanapun dan siapapun.

Isi surat edaran tersebut menegaskan tidak boleh ada kerumunan dimanapun. Ini dilakukan dalam pencegahan penyebaran virus Corona yang hingga saat ini belum berakhir. Namun demikian, pemerintah bukan melarang adanya pernikahan di BS, hanya saja resepsi pernikahan yang tidak boleh dilakukan.

"Tidak boleh ada lagi resepsi pernikahan hingga waktu yang belum ditentukan," imbau Bupati BS Gusnan Mulyadi melalui surat edaran yang telah disebar luaskan ke masyarakat.

Hal ini juga ditegaskan oleh Kapolres BS AKBP. Deddy Nata, S.IK. Dia mengatakan pihaknya akan selalu mengawasi semua aktifitas yang mengundang khalayak ramai dan membuat kerumunan. Salah satunya resepsi pernikahan.

Pihaknya tidak akan memberikan toleransi apabila ada masyarakat yang nekat membuat kerumunan tanpa mentaati protokol kesehatan. Disebutkan Kapolres dalam surat edara yang disampaikan bupati semuanya sudah jelas, bahwa tidak ada lagi kerumunan.

"Aparat siap menindak tegas bagi siapapun melawan hukum, juga tidak mentaati imbauan bupati tentang protokol kesehatan," papar Kapolres.

Sementara itu, Kepala Kemenag BS H.Arsan S.Ibrahim, M.HI kembali menegaskan pihaknya tidak akan melayani apabila ada warga BS yang akan melakukan resepsi pernikahan yang mengundang orang banyak. Arsan telah memerintahkan semua kepala KUA untuk tidak menikahkan orang yang menggelar resepsi pernikahan.**(tek)**

RIO/RB

BERSIHKAN : Alat berat diterjunkan untuk membersihkan bibir pantai.

Bibir Pantai Pasar Bawah Dibersihkan

PASAR MANNA - Kondisi bibir pantai Pasar Bawah saat ini sangat kotor oleh sampah. Oleh sebab itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) berinisiatif membersihkan sepanjang bibir pantai dengan alasan kesehatan masyarakat dan pengunjung pantai.

Meskipun sering dibersihkan namun bibir pantai di Pasar Bawah kembali kotor dengan sampah yang dibawa air laut. Hal ini tentu mengganggu pemandangan dan kesehatan bagi masayarakat dan tentunya pengunjung pantai Pasar Bawah.

Tidak ingin hal ini jadi masalah, DLHK Kabuten BS kembali menurunkan alat berat dan mengangkut seluruh sampah ke TPA Kayu Arau, Manna.

Kepala DLHK BS Jonior Hafis mengatakan, dalam rangka kebersihan pantai dan rangka kesehatan masyarakat, pihaknya kembali menyapu seluruh sampah di bibir pantai. Apabila dibiarkan terlalu lama, Jonior mengkhawatirkan menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat BS dan semua pengunjung pantai.

"Dalam rangka kebersihan bibir pantai biar indah dan dalam rangka kesehatan masyarakat yang berkunjung di lokasi wisata, dilakukan kebersihan total seluruh bibir pantai," terang Jonior.

Namun demikian pihaknya tetap tidak bisa menjamin pantai akan bersih selamanya. Sebab apabila kondisi hujan, maka air laut yang meluap dapat membawa tumpukan sampah ke bibir pantai yang panjang hampir 3 Km.

Akan tetapi pihaknya akan selalu melakukan pembersihan secara berkala. Karena untuk setiap hari dipastikan tidak bisa lantaran keterbatasan anggota dan sarana pendukung lainnya.

Ini juga dijelaskan Jonior dalam rangka mendukung pengembangan wisata yang disampaikan Bupati Gusnan Mulyadi beberapa waktu lalu. Dimana setiap tempat wisata wajib menarik pengunjung di tahun 2021. Oleh sebab itu pantai Pasar Bawah dibersihkan.

"Pada masyarakat juga diharapkan dapat mejaga kebersihan pantai," ajak Jonior.**(tek)**

Wabup Usulkan Mobnas Double Cabin

Untuk Jangkau Daerah Terpencil

KOTA MANNA - Wakil Bupati Bengkulu Selatan (BS) Rifai Tajudin memastikan tahun 2021 mendatang mengusulkan pembelian satu mobnas baru type double cabin. Yang akan digunakan sebagai kendaraan operasional ke kawasan terpencil. Selama menjabat sebagai wakil bupati selama satu tahun, Rifai hanya mendapatkan dua unit mobnas peninggalan Gusnan Mulyadi selaku wakil bupati di era kepemimpinan Bupati Dirwan Mahmud.

Setelah meraih suara terbanyak pada kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati BS Paslon Bupati Gusnan Mulyadi-Rifai Tajuddin mulai menyusun beberapa agenda penting di Kabupaten BS.

Salah satunya, Wabup akan aktif memantau kondisi masyarakat yang berada di kawasan terpencil di 11 kecamatan dan 142 desa yang ada di Kabupaten BS. Namun untuk merealisasikan beberapa kunjungan kerja di dalam kabupaten, Wabup berharap tahun depan pemerintah bisa menganggarkan untuk pembelian mobnas baru, type double cabin. Sebab selama menjabat sebagai Wabup BS menggantikan Gusnan yang dilantik menjadi bupati, Rifai menerima mobnas peninggalan Gusnan berupa 1 unit Fortuner dan 1 unit Avanza.

"Di BS masih terdapat daerah terpencil dan membutuhkan kendaraan khusus agar sampai ke lokasi dengan aman, jadi usul ada tambahan mobnas tahun 2021," terang Wabup.

Selain mobnas pemerintah Kabupaten BS juga diminta agar melengkapi mebel yang ada di kediaman dinas wakil bupati.

Sebelumnya Bupati Gusnan Mulyadi menyampaikan apabila pihaknya sudah dilantik menjadi bupati dan wakil bupati bersama Rifai, maka pihaknya akan intens turun ke lapangan meminta masukan dan saran masyarakat. Selain itu pihaknya juga ingin mendengar langsung dan memantau langsung perkembangan pembangunan BS selama ia menjabat.

Oleh sebab itu dirinya tidak mempermasalahkan kalau ada penambahan Mobnas baru guna menunjang kinerja pemerintahan.

"Kegiatan banyak di lapangan, Wabup akan terus turun memantau warga juga saya akan seperti itu," cetus Gusnan beberapa waktu lalu. **(tek)**

YUDI/RB

ICON: Kawasan Simpang Enam Tais yang semakin cantik setelah adanya icon tulisan akrilik.

2021, Konsep Taman Dilanjutkan

SELUMA - Pemkab Seluma melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kabupaten Seluma kembali akan melanjutkan pembangunan konsep Taman Kota Tais tahun 2021 nanti. Hal ini setelah selesai dibangunnya icon Simpang Enam Tugu Pengantin.

Untuk lebih mempercantik Kota Tais selanjutnya, akan dibangun hutan kota dan videotron dengan menggunakan APBD 2021. Tentunya hal ini dinilai selain mempercantik juga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Seluma, Hadi Susanto melalui Kabid Pertamanan, Joko Handoyo mengatakan untuk mempercantik sekaligus menambah PAD, pihaknya telah mengusulkan pemasangan videotron. Begitu juga dengan adanya pembangunan hutan kota. Pemasangan itu nantinya juga direncanakan akan dibangun di kawasan Simpang Enam Tais. Lokasi ini merupakan pusat ibukota Seluma. Untuk anggaran pembangunannya sendiri menggunakan APBD Seluma 2021 yang telah masuk dalam rincian program kerja tahun mendatang.

"Akan kembali kita lanjutkan, jadi 2021 nanti Kota Tais akan kita percantik lagi," ujar Joko.

Ia menambahkan, penambahan PAD itu sendiri melalui videotron. Karena nanti akan dapat disewakan bagi pengusaha maupun pihak lain yang ingin beriklan komersil. Ia mengharapkan dukungan semua lapisan masyarakat agar dapat bersama-sama menjaga dan merawatnya dengan baik. Sehingga baik icon simpang enam maupun apa yang akan dibangun nantinya dapat terawat dan tidak cepat rusak.

"Untuk PADnya nanti bisa melalui videotron, kan bisa disewakan jika ada yang ingin. Kita harap semua program ini dapat terlaksana tahun 2021 nanti," harapnya.

Sementara itu, sejak selesai dibangunnya icon Simpang Enam Tais, setiap sore dan malam selalu ramai dikunjungi warga yang ingin berswafoto. Bahkan, beberapa pengunjung juga datang dari luar daerah maupun pelintas yang sekedar ingin mengabadikan diri di sana dengan berfoto.**(cup)**

Dilarang Dinas Luar

SELUMA - Merebaknya kasus Covid-19 yang menimpa sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Seluma sepulang dinas luar (DL), akhirnya ada kebijakan terbaru. Bupati Seluma melarang sementara waktu kegiatan dinas luar.

Bupati juga memerintahkan jajarannya yang baru pulang dinas luar untuk langsung menjalani tes swab di rumah sakit untuk memastikan kesehatannya. Bupati Seluma, H. Bundra Jaya, SH, MH memastikan tidak akan memberi izin pejabat di lingkungan Pemkab Seluma untuk melakukan perjalanan dinas luar. Ini dilakukan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 khususnya di Kabupaten Seluma. Ia juga menekankan pimpinan DPRD Seluma untuk menghentikan sementara waktu kegiatan dinas luar. Mengingat saat ini kasus positif di Kabupaten Seluma kembali bertambah dan kembali menjadi zona merah.

"Iya, untuk sementara waktu tidak ada dinas luar dahulu, Jadi mohon dimaklumi," ujar Bupati.

Selain itu, bupati juga meminta baik ASN, pejabat maupun anggota dewan yang sudah melakukan kegiatan dinas luar untuk mengikuti tes swab terlebih dahulu sebelum berkumpul dengan keluarganya di rumah. Hal ini dinilainya perlu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 makin meluas. Bupati juga meminta semua mematuhi protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. Dengan selalu memakai alat pelindung diri (APD) seperti memakai masker, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak serta menghindari kegiatan berkerumun. "Kita kembalikan lagi Seluma ke zona hijau, jadi mohon dukungan semua untuk mewujudkan ini," ajaknya.**(cup)**

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SELUMA
PROVINSI BENGKULU
Jalan Raya Bengkulu – Manna KM. 58 Tais e-mail : kab-seluma@atrbpn.go.id

PENGUMUMAN
(Penerbitan Sertipikat Pengganti)
Nomor : 19 /2020

Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

No	Nama / Alamat Pemohon	Jenis Hak & No. Hak	NIB	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Permohonan	Letak Tanah a. Jalan b. Kelurahan c. Kecamatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zaidin / Desa Purbosari Kec. Seluma Barat Kabupaten Seluma	Hak Milik No. 01181/Purbosari	07.06.04.08.00181	Zaidin	19/11/2020	a. Purbo Sari b. Purbo Sari c. Seluma Barat	Surat Keterangan Kepolisian Resor Seluma No. SKET/122/V/2020/RES SELUMA Tgl. 08/05/2020 Berdasarkan Surat Pernyataan dibawah Sumpah/Janji Tgl. 16/12/2020

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat di atas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Tais, 18 Desember 2020
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SELUMA

JAKWAN HADINATA, S.H.
NIP. 19651011 199103 1 003

YUDI/RB

DITUTUP : Lokasi wisata Pantai Seluma yang akan ditutup sementara waktu.

Lokasi Wisata Tutup Sementara

Cegah Kerumunan di Tahun Baru

SELUMA - Selama masa libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, seluruh tempat wisata di Kabupaten Seluma ditutup sementara. Penutupan tempat wisata tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bupati Seluma bernomor: 550/395/SE/B2.BPBD tentang penghentian kegiatan yang bersifat keramaian dan kerumunan.

Penutupan destinasi wisata ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Seluma. Mengingat saat hari libur, kawasan wisata selalu ramai dipadati pengunjung. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Seluma, Rijono, S.Pd, M.Si melalui Sekretaris Dinas, Herman Suyadi Herman Suryadi, SE membenarkan hal tersebut. Pihaknya telah memberikan surat edaran ke pihak pengelola objek wisata untuk menutup sementara lokasi wisata.

Adapun objek wisata yang ditutup itu mulai dari Pantai Seluma, wisata pemandian di Desa Napal Jungur dan lainnya. Penutupan ini sesuai dengan SE Bupati Seluma yang telah dikeluarkan sebelumnya. Penutupannya sendiri dilakukan hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Mengingat saat ini kerumunan masyarakat dilarang karena pandemi Covid-19 yang masih saja melanda.

"Iya, kita tutup sementara, sudah kita sampaikan ke pengelola untuk mencegah adanya kerumunan masyarakat. Apalagi di hari libur kita tahu sendiri banyak masyarakat yang datang," jelas Herman.

Sementara itu, Kapolres Seluma, AKBP Swittanto Prasetyo, S.IK akan membantu memastikan tidak adanya kegiatan atau kerumunan massa tahun baru nanti. Pihaknya akan menggelar patroli rutin dan membubarkan kerumunan bila ditemukan. Selain itu, untuk lokasi wisata sendiri akan juga dilakukan pengamanan.

Kapolres berpesan agar masyarakat selalu taat dalam mengikuti protokol kesehatan. Mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak dan lainnya. Ditegaskannya, untuk tidak mengadakan kegiatan yang bersifat kerumunan massa demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. "Iya kita akan gelar patroli, jika ditemukan akan kita bubarkan, karena tidak boleh adanya kerumunan saat ini," pungkasnya.**(cup)**

Penertiban HGU Belum Tegas

SELUMA - DPRD Seluma meminta penyelesaian lahan hak guna usaha (HGU) bisa dilakukan Pemkab Seluma secara tegas dan tidak tebang pilih. Tujuannya agar tidak terjadi konfik yang tidak diinginkan. Hal ini setelah masih ditemukannya adanya aktivitas di lahan HGU yang diketahui sudah habis masa penggunaannya.

Anggota DPRD Seluma, Tenno Heika, S.Sos, MM mengatakan sengketa lahan HGU harus diselesaikan secara tegas. Karena masih ada lahan-lahan lainnya yang telah habis masa penggunaannya namun belum dikembalikan. Bahkan, surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma juga tampaknya masih belum diindahkan. Seperti yang terjadi di Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja. Lahan HGU yang telah habis massa penggunaannya itu masih ditemukan ada aktivitas pemanenan sawit oleh PT Agri Andalas.

"Ini harus ditertibkan, adanya aktivitas di lahan sengketa tentunya sudah melanggar," kata Tenno.

Ia menambahkan, DPRD Seluma juga meminta kepada Pemkab Seluma khususnya Bupati Seluma untuk bisa segera menertibkan aset tanah milik Pemkab. Pihaknya meminta agar bagian tata pemerintahan (Tapem) dan BPN segera turun mengecek titik kordinat dan memasang peringatan. "Kita minta bisa segera diselesaikan. Dewan siap membantu. Kalau lambat tentunya bisa menimbulkan konflik," jelasnya.

Terpisah, Kepala Desa Jenggalu, Jhoni Madarling membenarkan masih ada aktivitas di lahan yang berstatus quo itu. Padahal, tidak ada satu pun lagi lahan di sana yang masih berstatus milik PT. Agri Andalas. Selaku pemerintah desa, pihaknya merasa dirugikan atas masih dilanggarnya keputusan tersebut. "Kita khawatir jika tidak segera diselesaikan bisa menimbulkan konflik," ujarnya. **(cup)**

IST/RB

PANEN: Aktivitas panen sawit di lahan sengketa di Desa Jenggalu.

Pembangunan Taman Wisata Diperpanjang

YUDI/RB

TAMAN: Bupati Seluma, Bundra Jaya bersama Disparpora Seluma mengecek progress pembangunan taman wisata kota belum lama ini.

SELUMA - Akibat badai yang menerpa Kabupaten Seluma beberapa waktu lalu, pekerjaan pembangunan taman wisata kota di kawasan Simpang Enam Tais tak sesuai jadwal. Oleh karena itu pekerjaan taman yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 2 miliar ini diberikan waktu perpanjangan selama 10 hari. Namun, tetap akan mulai difungsikan pada awal tahun 2021.

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Seluma, Rijono, S.Pd, M.Si melalui Sekretaris Dinas, Herman Suyadi Herman Suryadi, SE mengatakan penyelesaian proyek yang didanai dari DAK ini semula ditargetkan 20 Desember 2020. Namun dikarenakan terjadinya bencana alam yang membuat kerusakan, maka waktu pengerjaannya diperpanjang selama 10. Pada saat ini, pembangunan sudah masuk dalam tahap finishing. Pihaknya optimis dalam pelaksanaan pembangunan ini dapat terselesaikan sebelum akhir bulan Desember nanti.

"Iya diberikan waktu perpanjangan. Kita harap bisa tuntas sebelum akhir tahun nanti," jelasnya.

Herman menerangkan setelah fisik bangunan selesai dikerjakan, pihaknya akan langsung melakukan persiapan memfungsikan taman tersebut. Awal tahun 2021 nanti, Taman Kota ditargetkan sudah berfungsi sesuai peruntukannya. Yakni sebagai taman wisata dan lokasi penjualan cinderamata khas Kabupaten Seluma.

"Kita harap bisa selesai cepat, sehingga awal 2021 nanti sudah bisa digunakan. Masih ada rapat bersama dulu bersama OPD terkait untuk ikut mengisi dalam taman itu," terang Herman.

Ia juga berharap masyarakat bisa memanfaatkan taman itu dengan benar. Saling menjaganya agar taman tidak cepat rusak. Sehingga taman itu nantinya bisa menjadi salah satu kawasan wisata di Kabupaten Seluma. "Kita harap masyarakat bisa bijak, kita jaga bersama-sama agar tidak cepat rusak," ujarnya.**(cup)**

INFO HOTEL

HOTEL	ALAMAT	TELPON / FAX/ HP
LATANSA / SYARIAH	Jl. Tribrata No. 42 Kel. Cempaka Permai (Simpang 4 Polda)	(0736) 52549 / 0812 7103 8847
THE MADELINE	JL. Bakti Husada No. 88 Kel Lingkar Barat	(0736) 52777 / 08117861940
SANTIKA	JL. Raya jati No 45 Kel. Sawah Lebar Kec Ratu Agung, Bengkulu	(0736) 25858

Tunggakan Pajak Desa jangan Sampai Jadi Persoalan

KOTA BINTUHAN - Kendati pencairan dana desa (DD) yang bersumber dari APBN dan alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD tahun 2020. Semua telah terealisasi 100 persen, namun sampai saat ini tunggakan pajak DD di desa-desa yang ada di Kaur masih cukup tinggi. Ini berpotensi akan menimbulkan persoalan baru nantinya. Apalagi setelah pilkades nantinya, akan banyak jabatan kades tidak lagi dijabat pelaksana tugas.

Terkait banyak desa yang sampai saat ini belum melunasi pajak,dalam waktu dekat ini DPRD Kaur akan memanggil pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan juga pihak Inspektorat Kaur. Untuk mengetahui berapa banyak desa yang belum bayar pajak dan berapa banyak pajak yang belum disetorkan setiap tahunnya. Hal ini harus menjadi perhatian, karena jangan sampai dibebankan oleh pejabat kepala desa yang baru nantinya.

"Soal pajak desa yang banyak belum bayar akan kita telusuri dulu, apalagi kegiatan sudah selesai ini harus menjadi perhatian kita semua. Apalagi ada yang sudah dua tahun tidak bayar pajak, sehingga menumpuk dan akan menjadi beban kepala desa kedepannya. Untuk itu kita akan panggil OPD terkait untuk mengetahui kondisinya. Kalau memang belum bayar pajak, kita minta DD ke depan jangan cairkan dulu dan sebagainya," ungkap anggota DPRD Kaur, Irwanto Tohir.

Untuk diketahui dari 192 desa yang ada di Kaur, hampir lebih 50 persen yang belum bayar pajak baik itu untuk tahun 2019 dan 2020 ini. Bahkan ada yang dua tahun terakhir belum bayar pajak sama sekali sehingga ini menjadi perhatian Pemkab Kaur. Sebelumnya tahun 2019 yang lalu, Pemkab Kaur menggandeng pihak Kejari Kaur agar semua desa membayar pajak. Namun untuk dua tahun ini hal serupa kembali terjadi dan jangan sampai nantinya menjadi persoalan ke depannya.

Pada tahun 2019 berdasarkan data yang ada kurang lebih ada 102 desa lagi yang belum membayar pajak tahun 2019. Sementara pada tahun 2020 ini ada sekitar 114 desa lagi yang belum bayar pajak DD hingga jumlah tunggakan DD selama dua tahun ini lebih dari Rp 3 miliar. Bahkan pihak Inspektorat Kaur pun sudah menghimbau kepada desa yang belum membayar pajak untuk segera melunasinya akhir tahun 2020 ini.

Untuk diketahui pada tahun 2019 pajak yang masuk dari desa baru Rp 1,2 miliar lebih. Sementara tahun 2020 ini pajak yang sudah masuk sebesar Rp 1,4 miliar lebih. Jumlah ini belum setengah dari jumlah desa yang membayar pajak. "Untuk desa yang belum bayar pajak kita sudah koordinasi dengan KPP pajak nanti mereka akan menyurati PMD dan BKD Kaur untuk pedoman dan syarat pencairan DD berikutnya. Tidak hanya itu saja mungkin desa yang belum bayar pajak akan kita lakukan pemanggilan nantinya bekerjasama dengan pihak Kejari Kaur," pungkas Kepala Inspektorat Kaur Three Marnope. (**cik**)

TMT 1 Desember, Januari CPNS Mulai Kerja

KOTA BINTUHAN – CPNS Kabupaten Kaur, terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Desember 2020 sudang mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Sehingga Januari tahun depan, 102 CPNS baru Kabupaten Kaur mulai bertugas di lingkungan Pemkab Kaur. Sementara pembagian SK dan NIP baru akan dilaksanakan Selasa (29/12) atau paling lama Rabu (30/12). Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala BKD dan PSDM Kaur Arsal Adelin melalui Kabid Mutasi Yosi Afriyanti kepada RB. Menurut Yosi semua proses telah dilakukan tinggal menunggu jadwal penyerahan SK.

"Untuk 102 CPNS yang baru lulus TMT nya 1 Desember 2020 dan akan mulai melaksanakan tugas bulan Januari tahun 2020 yang akan datang. Untuk pembagian SK atau pelantikan 102 CPNS kita laksanakan Selasa atau Rabu yang akan datang. Untuk pastinya akan kita sampaikan besok (hari ini, red)," ungkap Yosi.

Lebih lanjut Kabid Mutasi mengimbau agar 102 CPNS untuk tetap bersiap-siap. Karena sebelum akhir tahun akan segera dilakukan pelantikan. Karena terhitung Januari 2021, CPNS sudah harus bertugas sesuai dengan instansi yang dilamarnya, saat mendaftar.

Untuk diketahui pada tahun 2020 yang lalu Kabupaten Kaur hanya mendapatkan kuota 106 CPNS. Terdiri dari formasi guru, teknis dan juga kesehatan. Namun sayang empat formasi lainnya tidak ada pendaftar, sehingga hanya 102 CPNS yang mendapat nilai terbaik yang lulus. Mereka yang lulus terdiri dari formasi teknik sebanyak 12 CPNS. Formasi guru sebanyak 66 CPNS dan formasi kesehatan sebanyak 24 CPNS.

Dengan adanya penerimaan CPNS pada tahun 2018 dan 2020 ini. Kaur mendapatkan tambahan sebanyak 234 PNS baru yang sudah diangkat pertengahan Desember 2020. Akhir bulan Desember 2020 juga dapat tambahan 102 CPNS baru. Namun dengan banyaknya PNS yang pindah dan pensiun setiap tahunnya jumlah PNS Kaur masih tetap kurang. Dan pada tahun 2021 ini BKD dan PSDM Kaur kembali mengajukan usulan penerimaan CPNS ke Menpan-RB. (**cik**)

Akhir Tahun, Pembuatan SKCK Meningkat

KOTA BINTUHAN – Jelang tahun baru 2021, banyak pengajuan pembuatan SKCK di Mapolres Kaur. Mereka yang mengajukan pembuatan SKCK sebagian besar adalah remaja yang sudah tamat SMA sederajat yang belum mendapatkan pekerjaan. SKCK ini nantinya akan dipergunakan untuk mencari kerja di luar Kabupaten Kaur.

Bahkan dari pantauan **RB**, dalam waktu satu minggu ini pengajuan pembuatan SKCK di Sat Intelkam Polres Kaur terus saja bertambah. Rupanya para pencari kerja ini memanfaatkan momen pergantian tahun untuk merantau ke luar daerah. Mencari pekerjaan di ibukota.

"Kita akui akhir tahun, usai lebaran dalam setiap tahunnya memang banyak yang mengajukan pembuatan SKCK. Salah satunya persiapan untuk mereka mencari kerja baik itu di instansi pemerintahan maupun di perusahaan swasta," kata Kapores Kaur AKBP Dwi Agung Setyono, S.IK, MH melalui Kabag Ops AKP Fahrul Ikwan.

Kendati banyak yang mengajukan pembuatan SKCK saat akhir tahun ini namun jumlahnya tidak sebanyak saat lebaran. Apalagi saat kondisi Covid-19 seperti saat ini jumlah pencari kerja yang membuat SKCK pun tidak terlalu banyak. Kendati demikian dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya pengajuan SKCK akhir tahun ini lebih meningkat. Dan didominasi oleh remaja yang ingin mencari kerja ke luar daerah.

ALBERTUS/RB

PENCARI KERJA: Nampak para pencari kerja di Kaur saat mengajukan pembuatan SKCK di Polres Kaur.

Salah satu pembuat SKCK, Windi saat datang ke Mapolres Kaur beberapa waktu yang lalu mengaku sengaja membuat SKCK karena usai tahun baru ingin mencari kerja ke pulau Jawa. Apalagi pekerjaan di Kaur selama ini baginya hanya cukup untuk makan saja. Sehingga ingin merantau dan mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa.

"Kita mau merantau pak, coba-coba ke pulau Jawa karena di Kaur pabrik dan sebagainya belum ada buka lowongan bahkan mereka ada pengurangan karyawan saat Covid-19. Untuk tahun 2021 coba keberuntungan di Jawa, karena kebetulan ada kakak yang tinggal di Jawa dan siap mencarikan pekerjaan. Makanya semua persiapan sudah kita lengkapi, mulai SKCK, kartu kuning dan sebagainya," pungkas pemuda Tanjung Kemuning ini. (**cik**)

PUBLIKASI KEGIATAN DD TAHUN 2020 DESA SEKUNYIT KECAMATAN KAUR SELATAN

Penyaluran BLT DD Tahap ke III Tahun 2020

KOTA BINTUHAN - Dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap III (tiga) tahun 2020 Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur berjalan dengan kondusif. Kegiatan pembagian BLT di disaksikan langsung oleh Polsek Kaur Selatan, Koramil Kaur Selatan dan pihak terkait lainnya.

Kegiatan penyaluran BLT DD tahap ketiga dilakukan di kediaman Pjs Kades Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Minar Gustina beberapa waktu yang lalu. Tidak hanya itu saja kegiatan ini juga dihadiri juga oleh masyarakat penerima bantuan BLT DD tahun 2020. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan juga terkena dampak Covid-19.

"Untuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga penerima manfaat hari ini tahap ke 3 sebanyak 14 keluarga yang menerima bantuan dengan jumlah uang Rp 600 ribu per KK , " kata Pjs Kades Sekunyit Minar Gustina.

Dalam kesempatan itu masyarakat tetap diimbau harus menerapkan protokol kesehatan mulai dari menggunakan masker, selalu cuci tangan dan jaga jarak. Sehingga warga penerima BLT ini juga nantinya terhindar dari Covid-19. Bahkan Minar mengharapkan dengan adanya program bantuan langsung tunai ini kepada masyarakat, dapat meringankan beban masyarakat di tengah wabah Covid-19.

"Semoga apa yang telah diprogramkan pemerintah dapat membantu warga, kami selaku pemerintah desa sangat mendukung dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Karena dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19," pungkas Minar Gustini. (**cik/krn**)

Nampak Penerima BLT DD saat menerima bantuan yang diberikan dari berbagai pihak yang hadir secara tertib. Pembagian BLT DD tersebut juga sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

PNS Harus jadi Contoh Protokol Kesehatan

KOTA BINTUHAN – Kendati sampai saat ini belum ada sanksi tegas dari pemerintah untuk pelanggar protokol kesehatan di Kabupaten Kaur. Sehingga banyak warga Kaur yang saat ini kurang patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19. Tidak hanya masyarakat biasa, para PNS nampak masih banyak yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Tidak hanya itu saja, saat ini dari pantau RB banyak PNS yang keluar masuk kantor tidak menggunakan masker.

Hal ini menjadi perhatian dari Satgas Covid-19, apalagi berbagai kasus banyak PNS yang terpapar Covid-19 saat ini. Untuk itu Satgas Covid-19 yang juga Kepala BPBD Kaur Ujang Saferi meminta agar PNS di lingkungan Pemkab Kaur dapat memberikan contoh kepada masyarakat. Terutama dalam penggunaan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan sekitar dan juga kantor. Dengan harapan apa yang dilakukan PNS juga menjadi contoh bagi semua masyarakat Kaur nantinya.

"Kita akui sampai saat ini masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya protokol kesehatan Covid-19. Tidak hanya masyarakat biasa, para PNS juga masih banyak yang tidak peduli. Untuk itu kita mengimbau kepada semua PNS di lingkungan Pemkab Kaur untuk menjadi contoh dalam penggunaan protokol kesehatan Covid-19 dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghindari kita sendiri, keluarga dan orang lain dari Covid-19," ungkap Ujang Saferi.

Bahkan dari pantauan RB, saat ini hampir semua kantor di Padang Kempas juga sudah tidak lagi menyediakan tempat cuci tangan dan sabun. Kendati pun ada, banyak yang sudah tidak berfungsi lagi tempat cuci tangannya. Padahal di lain pihak Pemkab Kaur terus mensosialisasikan agar masyarakat patuh dan taat protokol kesehatan Covid-19 yang saat ini terus meningkat di Kabupaten Kaur.

Untuk itu Satgas Covid-19 mengimbau agar semua OPD kembali menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi semua PNS atau pegawainya. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat di Kaur. "Kita imbau kepada semua OPD untuk kembali memperketat penggunaan protokol kesehatan di setiap OPD nya. Jangan hanya pajangan namun memang difungsikan untuk menghindari kita semua dari virus Corona," pungkas Ujang saferi. (**cik**)

Wisatawan Masih Sepi

KOTA BINTUHAN – Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) pengelola wisata di Kabupaten Kaur mengeluhkan sepinya pengunjung. Padahal Pemkab Kaur tidak melarang dan menutup objek wisata saat liburan. Namun karena Covid-19, banyak pengunjung yang masih takut datang ke objek wisata.

Kepada **RB**, salah satu pengelola wisata Pengubaian Matahirin saat dikonfirmasi membenarkan kalau pihaknya masih tetap buka saat libur Nataru. Kendati demikian menurut Matahirin jumlah pengunjung yang datang masih sepi. Bahkan sampai saat ini beberapa tempat penginapan yang disediakan pun masih banyak yang kosong.

Kendati demikian pihaknya masih bersyukur karena pemerintah tidak menutup kegiatan wisata saat libur Nataru. Walaupun tidak memperbolehkan adanya kegiatan hiburan dan sebagainya seperti tahun-tahun sebelum Covid-19 mewabah.

"Untuk saat ini kita akui belum ada larangan kita menutup tempat wisata dan kita sangat bersyukur. Walaupun kita akui sampai saat jumlah pengunjung yang datang masih sangat sepi. Apalagi saat musim Corona saat ini, banyak yang membatalkan kegiatan wisata dan lebih berdiam di rumah. Namun tetap saja ada wisata dari luar Kaur yang datang sejak libur Natal hingga tahun baru nantinya," kata Matahirin.

Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di tempat wisata khusus di Pengubaian Kecamatan Kaur Selatan, pihaknya memperketat protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Mulai dari menyiapkan tempat cuci tangan dan sebagainya.

Apalagi saat ini, kasus positif covid-19 di Kaur terus meningkat. Sehingga perlu menjadi perhatian semua pihak. Termasuk juga pengelola tempat wisata yang ramai dikunjungi di Kaur. "Sesuai anjuran pemerintah kita sudah mempersiapkan semua protokol kesehatan Covid-19 di tempat kita. Jadi pengunjung bisa lebih aman dan nyaman saat berlibur di lokasi kita. Apalagi kita juga menyiapkan masker gratis bagi wisatawan atau pengunjung yang datang dan lupa membawa masker," pungkas Matahirin.

Sementara itu sampai saat ini Pemkab Kaur melalui OPD terkait belum mengeluarkan imbauan dilarang berkerumun di tempat wisata. Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur Ahmad Bastari mengakui kalau pihaknya belum mengeluarkan imbauan dan larangan untuk kegiatan wisata malam tahun baru nantinya. Kendati demikian pihaknya tetap mengimbau agar tempat wisata mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

"Kita juga meminta agar tempat wisata juga mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Termasuk juga tempat penginapan dan sebagainya agar Kaur tidak ada penyebaran virus Corona nantinya," ungkap Ahmad Bastari kepada **RB**.

Beberapa tempat wisata yang menjadi kunjungan banyak wisatawan saat malam tahun baru di Kaur adalah Pantai Laguna, Pantai Pengubaian, Pantai Danau Kembar, Pantai Sekunyit, Pantai Hili dan berbagai pantai lainnya. (**cik**)

IRENE PUTRIE, SH. M.Hum

Kejari Tunggu Putusan Pengadilan

Pengembangan Kasus Lahan Pemkot

BENGKULU - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu, Irene Putrie, SH, M.Hum mengungkapkan kalau jaksa penuntut Umum (JPU) akan fokus pembuktian tuntutan perkara jual beli lahan hibah Pemerintah Kota Bengkulu yang saat ini sedang proses persidangan.

Fakta-fakta persidangan akan mejadi landasan Penyidik Pidsus untuk melakukan pengungkapan kasus selanjutnya. "Saat ini kita fokusnya ke pembuktian tuntutan perkara ini," sampainya.

Ditambahkan Irene, putusan Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu terhadap kasus tersebut akan menjadi dasar untuk pengembang kasus. "Jika ditemukan perkembangan kasusnya tentu saja kita akan melakukan secara berjenjang dan kita ekpos," ungkapnya.

Mengingatkan dalam dakwaan JPU, disebutkan bahwa perbuatan terdakwa Dewi Hastuti bersama Malidin yang telah menerbitkan SKT seluas 8,7 hektare dari total tanah hibah Pemkot Bengkulu seluas 62,9 hektare di Kelurahan Bentiring, terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Tiga Putra Mandiri Bengkulu. Ini mengakibatkan terjadi pelepasan hak tanah milik Pemerintah Kota Bengkulu kepada Dewi Hastuti selaku Direktur PT Tiga Putra Mandiri.

Yang selanjutnya lahan tersebut diperuntukan pembanguna Perumahan Grand Korpri, sehinga menambah kekayaan atau menguntungkan Dewi Hastuti. Dakwaan JPU, perbuatan terdakwa Dewi Hastuti bersama dengan Malidin bertentangan dengan pasal 45 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sementara itu Kejari Bengkulu telah melakukan penyelesaian atas barang rampasan dan berhasil memulihkan serta menyetorkan ke negara senilai Rp 776.893.533. Selanjutnya atas benda sitaan yang putusannya diserahkan kepada korban maupun pihak lainnya Kejari telah melakukan pengembalian atas kendaraan berupa mobil dan sepeda motor sebanyak 236 unit, barang elektronik 94 unit serta surat dan bukti lainnya sebanyak 96 unit. (**wij**)

75 Anak-anak jadi Korban Kejahatan

Selama 2020

BENGKULU – Sebanyak 75 anak-anak menjadi korban kejahatan selama tahun 2020 ini. Kasusnya pun beragam. Mulai dari korban pemerkosaan, perzinahan, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

HENDRI SYAPUTRA

Hal ini disampaikan Kapolres Bengkulu AKBP Pahala Simanjutak, S.Ik melalui Wakapolres Bengkulu Kompol Hendri Syaputra, S.IK. Dikatakannya, selama tahun 2020 ini, pengungkapan kasus yang ditangani Polres Bengkulu lebih didominasi perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Yang mendominasi masih dengan perkara anak dan perempuan di tahun ini. Ada sebanyak 75 kasus yang diselesaikan. Untuk tunggakan akan kita selesaikan pada tahun depan," ujar Hendri kemarin.

Ia meminta agar pihak orangtua terus memberikan edukasi dan arahan terutama dalam era modern dengan smartphone yang canggih saat ini. "Anak harus dipantau, apalagi sekarang informasi mudah diakses. Terutama dalam pergaulan diluar, selain itu perlu adanya pemahaman agama di keluarga," tambahnya.

Pihaknya pun terus melakukan sosialisasi pendekatan kemasyarakat dalam mencegah adanya tindakan kriminalitas yang ada saat ini.(**wij**)

JUMLAH ANAK –ANAK YANG MENJADI KORBAN SELAMA 2020

JENIS KASUS	JUMLAH
Pemerkosaan	8 kasus
Perzinahan	2 kasus
KDRT	23 kasus
Nikah Tanpa Izin	2 kasus
Melarikan Anak	2 kasus
Pencabulan	2 kasus
Kekerasan Terhadap Anak	25 kasus

WINDI//RB

TKP: Rumah warga di Jalan Soekarno Hatta RT 4 Kelurahan Anggut Atas dimasuki pencuri yang menggasak satu unit HP merek Oppo A9.

Congkel Jendela, Pelaku Gasak Hp

BENGKULU –Rifki (24) warga Jalan Soekarno Hatta RT 4 Kelurahan Anggut Atas, menjadi korban pencurian Handphone (Hp) merek Oppo A9, saat sedang tidur dikamar pada Jumat (26/12). Atas kejadian ini korban mengalami kerugian Rp 3,9 juta. Kasus ini telah dilaporkan ke Polisi.

Diketahui kronologi pencurian dari laporan polisi, diduga modus pelaku mencongkel jendela kamar korban. Setaelah berhasil masuk ke kamar pelaku dengan leluasa mengasak satu unit Hp merek Oppo A9. Hp yang diletakan di atas meja tersbut dikeathui hilang oleh pelaku pada Jumat (26/12) sekiatr pukul 9.00 WIB saat korban bangun tidur.

Saat dikonfirmasi korban sedang tidak ada dirumah. Sedangkan keterangan Ketua RT setempat Sugiandi (53) mengatkan, dirinya tidak mengetahui secara persis kejadian pencurian tersbut. "Kalau mendengar dari warga memang ada tapi tidak ada yang melapor ke saya," sampainya.

Sementara itu Kapolres Bengkulu AKBP Pahala Simanjuntak, S.IK membenarkan laporan tersebut, "Iya benar kita telah menerima laporan, masih diselidiki sama anggota," ujarnya.(**wij**)

Balap Liar dekat Pos Polisi, 4 Pria Diamankan

BENGKULU – Meski sudah sering dilakukan razia, namun tak membuat jera para pemuda untuk kembali melakukan aksi balap liar (Bali) di Jalan S Parman tak jauh dari Pos Polisi Simpang Lima Ratu Samban.

Alhasil, anggota Sat Lantas Polres Bengkulu Sabtu (26/12) malam sekitar pukul 23.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB minggu dini hari, melakukan razia. Dalam razia tersbut anggota Satlantas berhasil mengamankan 4 orang yang terlibat melakukan balap liar.

"Antisipasi kegiatan balap liar di Jalan S. Parman oleh Personel Satlantas Polres Bengkulu berhasil di mengamankan 4 orang pemuda dan kita lakukan penilangan," sampainya Kapolres Bengkulu, AKBP. Pahala Simanjuntak, S.IK melalui Kasat Lantas, AKP Kadek Suwantoto

Ditambahkan Kadek, kegaitan razia balap liar beberapa waktu lalu dilaksanakan secara rutin, namun karena banyak kegitan lain maka pihaknya malakukan razia secara fleksibel. "Pada Tahun 2020 nanti kita akan buat tim dari Satlantas untuk melakukan razia balap liar," katanya.

Masih dikatakan Kadek, tim yang dibentuk oleh Satlantas tidak hanya melakukan razia balap liar, juga akan mlakukan razia kepada anak mudah sedang nongkrong. "Nanti untuk anak muda nongkrong akan kita lakukan razia apakah mereka minum minuman keras atau tidak. Karena berawal dari mabuk-maboukan itulah ada potensi anak muda melakukan tindakan seperti balap liar," tutup Kadek. (**wij**)

IST//RB

BALI: Angota Lantas Polres Bengkulu melakukan razia balap liar (Bali) di Jalan S. Parman pada Sabtu (26/12) malam.

Bawaslu Siap ke MK

FRITZ EDWARD SIREGAR

JAKARTA – Bawaslu daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 harus bersiap menghadapi sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta lembaga pengawas di daerah menyiapkan data dengan lengkap.

Harapannya, tidak menyulitkan jika nantinya menghadapi persidangan di MK. Ia melanjutkan, Bawaslu harus membaca dan memahami pokok permohonan. Dirinya menegaskan saat ini tidak hanya hasil suara yang dijadikan objek sengketa oleh pemohon, melainkan ada salinan daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak lengkap, saksi tidak bisa mengambil foto daftar hadir hingga pelanggaran protokol kesehatan.

"Hal itu harus bisa dijawab karena terkait kerja pengawasan kita di lapangan. Jawab pertanyaan apa saja yang ditanya. Tidak perlu jawab yang tidak ditanya," tegasnya.

Menurutnya, dalam memberikan keterangan dalam PHP di MK, jajaran Bawaslu daerah harus melakukan inventarisasi dokumen pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pokok permohonan.

"Tugas ini dapat dilakukan dengan melakukan pembagian beban kerja berdasarkan divisi. Saya harap data dari kabupaten kota hingga provinsi jangan berbeda," sebutnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo membandingkan data tingkat pelanggaran Pilkada 2018 yang dilaksanakan di 171 daerah, Pilkada 2020 di 270 daerah. Meski jumlah dugaan pelanggaran menurun, namun menurutnya tingkat penanganan pelanggaran mengalami kenaikan.

Sehingga perlu memberikan perlindungan kepada pelapor yang mungkin mendapatkan ancaman teror dari pihak terlapor. Menurutnya, ada kesamaan bentuk pelanggaran seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK) tak sesuai prosedur yang masih mendominasi pelanggaran administrasi.

"Lalu keberpihakan penyelenggara ad hoc (sementara) juga masih mendominasi pelanggaran kode etik, keberpihakan kepala desa mendominasi tindak pidana pemilihan, dan ASN (Aparatur Sipil Negara) memposting keberpihakannya di media sosial yang masih banyak," katanya.

Dewi menegaskan, berdasarkan jumlah dugaan pelanggaran Pilkada 2018 lebih banyak dibandingkan Pilkada 2020, meskipun daerah pemilihan tahun 2018 lebih sedikit. "Tetapi tingkat penanganan pelanggaran pada pemilihan tahun ini lebih tinggi dibandingkan sebelumnya meskipun pelanggaran administrasi pada pemilihan 2020 menurun dibandingkan 2018, tetapi terjadi peningkatan pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan tahun ini," jelas dia.

Dia pun berharap jajaran Bawaslu bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat yang akan memberikan laporan dugaan pelanggaran administrasi maupun pidana pemilihan. "Masyarakat dihantui ketakutan dan risiko mendapat tekanan, bahkan ancaman teror dari pihak yang dilaporkan. Bawaslu harus bisa pasang badan untuk para pelapor," terangnya.**(khf/fin)**

FOTO RB

MUSWIL: Pengurus PKS Provinsi Bengkulu melaksanakan muswil V yang digelar serentak secara virtual, Minggu (27/12).

Perkuat Kepemimpinan Daerah Hadapi Pemilu

Sujono Kembali Pimpin DPW PKS

BENGKULU – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2024. Salah satunya, menggelar musyawarah wilayah (muswil) V serentak secara virtual. Partai dakwah itu berusaha memperkuat kepemimpinan di daerah untuk menyongsong pesta demokrasi empat tahun mendatang.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu membuka langsung Muswil V PKS kemarin (27/12). Dia yakin muswil itu akan memunculkan kepemimpinan daerah sesuai harapan. "Saya optimistis kepengurusan baru DPW hasil musyawarah wilayah adalah kader-kader terbaik PKS," terang dia dalam pidato politik secara daring.

Syaikhu menyatakan, kepemimpinan di daerah dihasilkan dari proses yang berjenjang dan didasarkan pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, dan kebersamaan. Menurut dia, penyaringan nama-nama calon pengurus DPW dilakukan sejak lama oleh kader PKS di wilayah masing-masing.

Pimpinan DPW yang sudah dipilih kemarin langsung dilantik secara virtual. Syaikhu mengajak para pimpinan wilayah untuk bersiap-siap menyongsong Pemilu 2024. "Siap gaspol, siap tidak kasih kendor," ucapnya menyemangati para kader partainya.

Menurut dia, DPP PKS sudah menetapkan target perolehan suara sebesar 15 persen. Untuk mencapai target itu, yang pertama dilakukan adalah memunculkan pemimpin tangguh di tingkat wilayah. Sebab, pemimpin wilayah yang tangguh menjadi basis kepemimpinan di tingkat nasional.

"Kader-kader PKS, termasuk kader muda, harus diberi ruang untuk berkarya di PKS," papar dia.

Syaikhu mengatakan, ada tiga hal yang harus dimiliki kader pemimpin yang tangguh. Yaitu, kredibilitas, akseptabilitas, dan kapasitas. Menurut dia, ada dua jenis kredibilitas, yaitu kredibilitas moral dan kinerja. "Kredibilitas moral adalah tidak korupsi. Selain itu, harus profesional dalam bekerja," paparnya.

Selanjutnya, kata dia, kader PKS harus mempunyai kapasitas menguasai dan mengisi. Mereka juga harus akseptabilitas, bisa diterima masyarakat. "Harus memperluas pergaulan. Lintas profesi, lintas agama, dan lintas adat," ungkapnya.

Amanah Muswil V PKS

1. Meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai dan terbentuknya komposisi ideal anggota partai yang tersebar di setiap daerah yang mampu berperan aktif di berbagai sektor pengabdian.
2. Mengokohkan soliditas Partai, mandiri dan terbuka agar mampu menjalankan fungsi edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan local, agregasi idiologis dan agregasi kepentingan.
3. Kokohnya pengelolaan struktur dan pembinaan anggota partai memalui sistem informasi dan tata kelola partai yang modern.
4. Meningkatkan kepeloporan partai dalam pelayanan, pemberdayaan tehadap ketahanan keluarga, pemuda, kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup, serta memperkuat kemitraan startegis, pengendaliaan arah kebijakan dan pencitraan partai.
5. Meningkatkan suara partai di atas 15% pada Pemilu 2024.
6. Mengupayakan Anggota partai menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah pada pemilukada 2022 dan 2023.
7. Membangun sinergisitas secara taktis dan strategis, dengan kepala daerah yang dimenangkan pada pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Syaikhu menambahkan, dengan hadirnya pemimpin yang tangguh, PKS tidak hanya menjadi good party, tapi juga great party. "Kita juga harus menumbuhkan tokoh-tokoh baru yang muda, kreatif, dan inovatif," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Provinsi Bengkulu, Sujono menyatakan PKS di Provinsi Bengkulu siap melakukan lompatan besar pada Pemilu dan Pilkada mendatang. "Targetnya Pilkada mendatang kita berupaya mendorong kader terbaik untuk maju sebagai kandidat kepala atau wakil kepala daerah. Pada Pilkada serentak 2020 yang lalu, PKS memenangkan 7 dari 9 Pilkada. Ini menunjukkan PKS Bengkulu solid dan siap untuk memenangkan Pilkada mendatang juga Pemilu 2024," terangnya.

Pada Muswil V DPW PKS Provinsi Bengkulu, Sujono kembali diamanahkan menjadi Ketua DPW PKS Provinsi Bengkulu periode 2020-2025.**(lum/c7/bay)**

Gerindra Tetap Kritis ke Pemerintah

JAKARTA - Dua pentolan Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno diberikan mandat sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Kawendra Lukistian mengatakan, meskipun keduanya menjabat sebagai menteri, bukan berarti Partai Gerindra tidak akan mengawasi pemerintah.

"Artinya di Gerindra sangat dimungkinkan sekali untuk memberikan masukan-masukan konstruktif terhadap pemerintah sekalipun kami bagian dari pemerintah," ujar Kawendra.

Kawendra menambahkan, di parlemen, Partai Gerindra juga akan terus mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Sebagaimana partai-partai koalisi lain, mereka masih bisa melemparkan kritik terhadap pemerintah.

"Jadi, seharusnya partai apapun, sekalipun dia bagian dari pemerintah saat di parlemen tetap bisa kritis dan memberikan kritik yang konstruktif," katanya.

Menurut Kawendra, kritik yang disampaikan ke pemerintah ditujukan untuk perbaikan ke depan. "Tidak ada alasan kita dilarang kritis selama kita mencintai bangsa ini," pungkasnya.

Diketahui, Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinetnya. Salah satu yang terkena reshuffle adalah Wishnutama Kusubandio. Jokowi memilih Sandiaga Uno menggantikan Wishnutama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Jauh sebelumnya, juga Prabowo Subianto diberikan jabatan sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) oleh Jokowi. Gerindra yang sebelumnya oposisi juga bergabung ke koalisi pemerintahan bersama dengan sembilan partai lainnya.**(jp)**

Rakyat Bengkulu
METROPOLIS
SENIN 28 DESEMBER | TAHUN 2020 | HALAMAN 9

Target Meleset, Proyek Berendo Belum Tuntas

5 Desember Harusnya Serah Terima

BENGKULU – Pembangunan alun-alun atau berendo di kompleks Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu, belum juga tuntas. Padahal, seharusnya proyek itu sudah diserahterimakan tanggal 5 Desember 2020. Namun hingga menjelang tutup tahun 2020 yang tinggal 3 hari lagi ini, pengerjaan proyek dengan total hampir Rp 25 miliar ini baru selesai 90 persen.

Terkait hal ini, Waka I DPRD Kota Bengkulu Marliadi, SE membenarkan bahwa progres pengerjaan proyek Berendo Masjid Agung Attaqwa itu masih 90 persen. Padahal masa serah terimanya proyek itu ke Pemkot Bengkulu sudah melewati batas waktu.

☞Baca ***TARGET..*** Hal 15

MARLIADI

ILHAM/RB

BARENDO: Proyek pembangunan alun-alun atau berendo di kompleks Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu hingga mendekati akhir tahun anggaran belum juga tuntas.

Januari 2021, PKL Wajib Masuk Pasar

ILHAM/RB

KEMBALI: Disprindag meminta pedagang kembali menempati auningnya masing-masing.

Tak Ada Lagi Yang Jualan di Jalan

BENGKULU – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bengkulu telah memberikan toleransi beberapa bulan kepada pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di jalan sekitar Pasar Panorama dengan pertimbangan pandemi Covid-19.

Namun kali ini, toleransi tersebut tidak akan diberikan lagi memasuki Januari 2021 nanti.

☞Baca ***JANUARI..*** Hal 15

2021, Bengkulu Terima DBH Rp 270,6 Miliar

BENGKULU - Pemerintah Pusat menjalankan asas desentralisasi ke daerah dalam bentuk bantuan keuangan dengan mentransfer dana yang diberi nama Dana Bagi Hasil (DBH). DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tahun 2021 mendatang, Provinsi Bengkulu menerima DBH sebesar Rp 270.634.848.000.

Kepala Bidang Pelaksana Anggaran II DJPb Provinsi Bengkulu, Budi Marsudiyoto mengatakan DBH tahun ini tergolong cukup besar.

☞Baca ***2021..*** Hal 15

PKL Menjamur di Pantai Panjang

Potensi PAD Belum Digarap Maksimal

BENGKULU - Mendekati pergantian tahun, sejumlah pedagang kaki lima (PKL) mulai menjamur di sepanjang lokasi pariwisata Pantai Panjang. Sayangnya, potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor di kawasan wisata Pantai Panjang ini belum tergarap maksimal.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Amrullah mengatakan, untuk penarikan retribusi terhadap PKL di Pantai Panjang memang belum dilakukan.

☞Baca ***POTENSI..*** Hal 15

ILHAM/RB

MENJAMUR: Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) mulai menjamur di kawasan wisata Pantai Panjang. Namun sayang, Pemkot Bengkulu belum bisa mengoptimalkan potensi PAD di lokasi ini.

Lintas Online

Usaha Tempat Tongkrongan Harus Patuhi Prokes

BENGKULU – Untuk menghentikan laju penyebaran wabah Covid-19 tidak dilakukan satu pihak saja. Melainkan melibatkan berbagai pihak, termasuk juga pelaku usaha yang berpotensi mengumpulkan banyak orang, seperti tempat tongkrongan anak muda.

Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Drs. Teguh Sarwono, M.Si mengatakan, pada prinsipnya semua pihak, termasuk pelaku usaha wajib mematuhi protokol kesehatan (Prokes). (**)

Potensi PAD Belum Digarap ...

Sambungan dari hal 9

Baik itu terhadap PKL yang berjualan musiman maupun yang sudah mendirikan bangunan semi permanen. Meskipun sudah ada Perdanya, namun Amrullah mengatakan retribusi baru akan ditarik tahun 2021 mendatang.

"Saya lihat juga mulai dari belakang Bencoolen Mall itu sudah ramai pedagang. Sebenarnya potensi PAD kita besar di sana, nanti tahun depan mulai kita tarik retribusi," jelasnya.

Ditambahkannya, ditiadakannya penarikan retribusi terhadap PKL di Pantai Panjang, dikarenakan pandemi Covid-19. Sehingga pihaknya memberi toleransi bagi PKL yang berjualan di lokasi pariwisata Pantai Panjang. "Ada pandemi Covid, jadi kita memang belum menata para pedagang di Pantai Panjang. Rencananya, tahun depan mulai kita tata dan kita tarik retribusi," ujarnya. (**juu**)

RIRIS/ RB

MENUNGGU: Mes Pemda yang terletak di Tapak Paderi Kota Bengkulu terlihat terbengkalai.

Sarankan Pengelolaan Mess Pemda Swakelola

BENGKULU - Setelah mengalami kegagalan tender berulang, pengelolaan mess Pemda milik Pemerintah Provinsi Bengkulu itu, juga tidak masuk dalam APBD 2021 untuk anggaran renovasi Gedung Mess Pemda yang terbangkali itu. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, MM mengatakan, untuk aset yang berada di kawasan Tapak Paderi itu disarankan agar pengelolaannya dilakukan secara swakelola.

Mengingat hingga saat ini, belum ada pihak ketiga, yang dapat memenuhi persyaratan untuk mulai mengelola mess Pemda itu. Menurutnya, melihat kondisi saat ini Mess Pemda itu masih terkatung-katung.

"Sementara dari waktu ke waktu, aset tersebut terus menyusut kualitasnya lantaran mengalami kerusakan. Jadi sudah seharusnya Pemprov bergerak cepat, agar Mess Pemda termanfaatkan," sampai Sumardi.

Ia menjelaskan salah satu langkah alternatif untuk hal itu, sebaiknya Pemprov melakukan swakelola untuk pengelolaan Mess Pemda. "Misal dengan menunjuk manajemen, yang disertai pembentukan semacam dewan pengawas. Okelah, diawal ini jangan dulu kita pasang target PAD. Namun ketika pengelolaannya berjalan normal, barulah dipasang target," harap Sumardi.

Senada dengan itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, H. Herizal Apriansyah, S.Sos. Ia mengimbau agar Pemprov di tahun depan, bisa menargetkan Mess Pemda segera dikelola. "Lama-kelamaan gedung Mess Pemda bisa semakin parah kerusakannya. Sementara tidak sedikit anggaran untuk membangun aset itu," sampainya.

Kendati demikian, langkah apa saja yang akan diambil Pemprov untuk Mess Pemda agar dikelola. Ini dalam artian agar tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku. "Silakan mau mengambil langkah seperti apa agar Mess Pemda terkelola. Namun mekanisme yang berlaku harus diterapkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua panitia pelelangan tender Mes Pemda sekaligus Kabid Aset Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu, Syahrul Azwari, S. Sos menyampaikan Mes Pemda batal dilelang, pasalnya calon investor kurang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, calon investor dari PT. Pasific Global Invesment (PGI) tidak dapat memenuhi syarat administratif untuk lelang pengelolaan mess ini. "Ada beberapa persyaratan yang belum diterima. Seperti bilyet giro," sampai Syahrul.

Terkait batalnya tender lelang pengelolaan mes Pemda ini, pihaknya akan segera melaporkan ke pimpinan, dalam hal Sekda Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri, yang kemudian akan dilanjutkan ke Gubernur Bengkulu. Sementara untuk pengelolaan mes Pemda ini selanjutnya masih akan dibahas. Baik potensi untuk tetap melakukan kerjasama pemanfaatan atau metode seperti apa yang akan dilakukan nantinya.

Untuk diketahui, ada tiga perusahaan yang telah mendaftar lelang dan diminta mengajukan penawaran dokumen yakni PT. Pasific Global Invesment (PGI), PT. Bencoolen Jaya Mandiri, dan PT. Hotel Internasional Management.

Sebelumnya, pembangunan mess pemda itu merupakan proyek yang menghabiskan Rp 53 miliar pada tahun 2007 lalu. Setelah sebelumnya, mengalami penundaan proses lelang dikarenakan pandemi Covid-19. Akhirnya memasuki bulan November ini, lelang tersebut resmi dinyatakan batal, karena kurangnya syarat yang harus dipenuhi oleh investor. **(war)**

TIRTA DHARMA

LAYANAN SMS
PDAM
KOTA BENGKULU

Menghimbau pelanggan PDAM Kota Bengkulu membayar tagihan sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari sanksi hingga pemutusan.
Menghimbau melakukan pembayaran pada LOKET RESMI untuk menghindari penipuan.

UNTUK KELUHAN LAYANAN (HANYA SMS)
Mohon SMS kan ke **0821 8613 4569** sbb:
a. Nama /No.SL Pelanggan
b. Alamat lengkap dan nomor Hp
c. Laporan /keluhan

Mohon informasi ini disampaikan kepada pelanggan yang lain
"Kepuasan Pelanggan Komitmen Kami"

Surya Oñana, SE. M.Si
PD Kadis Perindag Provinsi Bengkulu

PERKEMBANGAN HARGA BAHAN PANGAN POKOK PASAR TRADISIONAL PROVINSI BENGKULU

	KOMODITI		SATUAN	HARGA (RP.)	KETERANGAN
1	BERAS	- IR 64 (Lokal Lampung)	kg	10.000	
		- IR 64 (Lokal Bengkulu)	kg	10.000	
		- Manggis Manis (Premium)	kg	12.500	
		- Kembang Kol (Premium)	kg	11.500	
		- Termurah	kg	9.375	
		- Cap Bulog/ Dolog	kg	9.375	
2	GULA PASIR	- DN	kg	12.500	
3	MINYAK GORENG	- Bimoli Kemasan	1 liter	15,000	
		- Tanpa Merk	1 liter	12.150	
4	DAGING	- Sapi Lokal Paha Belakang	kg	120.000	
		- Sapi Lokal Paha Depan	kg	120.000	
		- Sandung Lamur	kg	80.000	
		- Tetelan	kg	60.000	
		- Has Luar	kg	120.000	
		- Has Dalam	kg	120.000	
		- Daging Ayam Broiler	kg	34.000	Turun
		- Daging Ayam Kampung	kg	65.000	
5	TELUR	- Telur Ayam Broiler	kg	25.000	Naik
		- Telur Ayam Kampung	kg	52.500	
6	Cabe Merah Keriting		kg	42.000	
	Cabe Rawit Hijau		kg	25.000	
7	Bawang	- Merah	kg	35.000	
		- Putih	kg	26.000	
8	Susu Kental Manis	- Bendera	370 gr	11.000	
		- Indomilk	370 gr	10.000	
9	Garam	Beryodium Halus	kg	13.000	
10	Kacang	- Kedelai Eks Impor	kg	8.600	
		- Tanah	kg	25.000	
		- Hijau	kg	23.000	
12	Mie Instan	- Kari Ayam	bks	3.000	
13	Ikan	- Asin Teri	kg	60.000	
		- Kembung	kg	35.000	
		- Segar Tongkol/ Tuna	kg	25.000	
14	Ketela Pohon		kg	4.000	
15	Jagung Pipilan Kering		kg	7.000	

PERKEMBANGAN HARGA BARANG STRATEGIS KOTA BENGKULU

	KOMODITI	HARGA (RP.)	KETERANGAN
1	Semen 3 Roda	57.000	
2	Semen Holcim	57.000	
3	Semen Merah Putih	55.000	
4	Semen Padang	58.000	
5	Besi Beton 6 mm	30.000	
6	Besi Beton 8 mm	45.000	
7	Besi Beton 10 mm	67.000	
8	Besi Beton 12 mm	97.000	
9	Triplek 6 mm	95.000	
10	Kayu Balok 7/14 Bawang	100.000	
11	Kayu Balok 3/25 Bawang	100.000	
12	Paku 2 cm (1 inch)	20.000	
13	Paku 3 cm (1 1/2 inch)	20.000	
14	Paku 4 cm (2 inch)	17.000	
15	Paku 5 cm (2 1/2 inch)	17.000	
16	Paku 7 cm (3 inch)	17.000	
17	Paku 10 cm (4 inch)	17.000	
18	Pupuk KCL	7.000	
19	Pupuk NPK (Mutiara)	10.000	
20	Pupuk SP36	2.000	
21	Pupuk Urea	7.000	
22	Pupuk ZA	1.400	
23	Gas LPG 3 KG	18.000	
24	Baja Ringan	91.000	

Sumber : Pantauan Pasar Minggu, Pasar Panorama dan Pasar Barukoto

2021, Bengkulu Terima DBH Rp 270,6 ...

Sambungan dari hal 9

Ini membuktikan kinerja Provinsi Bengkulu di berbagai sektor antara lain sektor perpajakan serta pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai instrumen penghitung prosentase DBH sangat baik ditengah Pandemi yang masih melanda.

"Mudah-mudahan ini membawa berkah untuk kita di Bengkulu," jelasnya kepada **RB**.

Secara aturan kata Budi-Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip by origin.

Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue*. Maksudnya, penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004). Jenis-jenis DBH meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau.

"Sedangkan DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi dan Perikanan. DBH PBB dan PPh dibagi kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004 itu," ungkapnya. (**iks**)

Target Meleset, Proyek Berendo Belum ...

Sambungan dari hal 9

Menurut Marliadi, berdasarkan keterangan dari pihak pelaksana proyek, saat ini pengerjaan proyek itu disebutkan tinggal finshing saja. sementara untuk pengerjaan tower yang tingginya mencapai 35 meter masih lama akan selesai.

"Terakhir hearing bersama PUPR yang belum tuntas katanya hanya tower saja. Tetapi kalau kita lihat di lapangan ternyata amasih banyak yang belum selesai. Diantaranya pengerjaan pagar, taman yang belum dilakukan. Nanti kita akan kembali memanggil PUPR untuk meminta penjelaskan kenapa belum juga tuntas," kata Marliadi.

Dia mengatakan, semua kegiatan fisik yang ada di Dinas PUPR agar cepat diselesaikan. Selain itu, bangunan fisik harus diperhatikan jangan hanya pengerjar taget tetapi bangunannya asal-asalan. "Ini sudah tahun anggaran terakhir, kita minta semua pengerjaan fisik cepat diselesaikan karena kita akan menutup buku tahun anggaran.

Kita meminta pengerjaan fisik mohon diperhatikan jangan kejar tayang sehingga bisa mengurangi kualitas dari kegiatan tersebut," ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya proyek berendo itu sempat terhenti. Dikarenakan pengerjaan yang dilakukan oleh PT Karya Duta Mandiri Sejahtera, diputus kontraknya karena pihak kontraktor tidak mampu menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu. Kemudian, proyek berendo itu dilelang ulang dengan nilai kontrak sebesar Rp 13 miliar.

Dimana dalam proses lelang, dimenangkan oleh PT Bakti Muda Mandiri. Yang mana ditargetkan untuk penyelesaian pembangunan pada Desember 2020 mendatang. Pada APBD Perubahan 2020 untuk tahap finising anggaran ditambah sebesar Rp 12 miliar.(**juu**)

Januari 2021, PKL Wajib Masuk Pasar

Sambungan dari hal 9

Nantinya, seluruh PKL diharuskan masuk ke dalam pasar untuk menempati auning yang sudah disediakan dan tidak diperbolehkan lagi jualan di jalan sekitar pasar.

"Seluruh PKL kita minta agar kembali berjualan di auning agar tidak mengganggu badan jalan. Kita juga akan melakukan penertiban jika masih ada yang berjualan di luar," kata Kepala Dispirindag Kota Bengkulu, Dewi Dharma.

Ditambahkannya, PKL yang berjualan di luar auning pada umumnya merupakan pedagang sayur dan pedagang ikan dan ayam. "Untuk data yang sudah dapat jatah auning sudah ada. Tinggal saat ini kita akan mendata PKL yang belum kebagian auning," jelasnya.

Sementara itu salah satu PKL, Lisa mengatakan, setuju saja apabila diminta untuk masuk ke auning di dalam pasar. Namun ia minta pemerintah juga harus tegas dan tidak ada tebang pilih. Jangan sampai ada yang disuruh masuk ke dalam auning pasar, namun ada juga PKL yang masih tetap berjualan di jalan dan tidak ada tindakan, sehingga ada kesan dibiarkan.

"Kalau mau tertib, semua pedagang disuruh masuk dalam pasar bagi tidak ada masalah. Tapi harus adil. Harus semuanya. Jangans etengah-setengah. Kalau hanya sebagian yang disuruh masuk ke pasar, maka pasti saja yang lain akan ikut jualan keluar pasar lagi," katanya.

Sebelumnya, sejak pandemi Covid-19 Pemkot Bengkulu memang memperbolehkan PKL berjualan di jalan untuk menghindari terjadinya kerumunan. Namun berdasarkan pantauan **RB** di lapangan, ternyata kerumunan tetap terjadi, meskipun PKL sudah berjualan di sepanjang jalan sekitar Pasar Panorama. Kemacetan pun sering terjadi yang memicu semakin seringnya terjadinya kerumunan. (**juu**)

Masih Berpotensi Hujan

BENGKULU - Beberapa hari ini, Provinsi Bengkulu sempat dilanda cuaca tak bersahabat. Hari ini (28/12) meski diprediksi tidak akan terjadi cuaca ekstrem, namun diprediksi hujan tetap turun. Hal ini dikatakan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Fatmawati Bengkulu, Harist Syahid Hakim.

Dikatakannya, untuk perkiraan dini cuaca Provinsi Bengkulu per 28 Desember 2020 masih memiliki potensi terjadinya hujan. Namun berbeda dengan sebelumnya, cuaca hari ini didominasi cerah berawan, dan masih ada potensi hujan. "Nihil tidak ada peringatan dini cuaca ekstrem," sampainya.

Untuk diketahui, curah hujan sedang memiliki intensitas mulai dari 5,0 - 10,0 mm/jam atau 20 - 50 mm/hari. Sedangkan untuk hujan lebat itu memiliki intensitas dari 10 - 20 mm/jam atau 50 - 100 mm/hari. "Namun potensi hujan ada," tambahnya.

Kondisi cuaca seperti ini, juga hampir menyeluruh di setiap daerah. Mulai dari pagi hari hingga dini hari. Kemudian yang berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, Seluma dan Pulau Enggano.

Kemudian untuk prediksi cerah berawan hingga berawan itu berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga Lebat diwilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. "Dengan suhu udara 18 - 32 °C, kemudian kelembaban udara 65 - 100 persen," jelasnya. (**war**)

Lakukan Tracing Usai Pemulasaran Jenazah

BENGKULU – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bengkulu melakukan pemulasaran jenazah pasien yang meninggal terkonfirmasi Covid-19 dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Setelah melakukan pemulasarann jenazah Dinkes langsung melakukan tracing (penelusuran) terhadap keluarga pasien, tetangga yang pernah bertemu pasien dengan cara dilakukan rapid test. "Tracing hal yang wajib kita lakukan terhadap siapa saja yang pernah kontak dengan pasien," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Susilawati, SKM, M.Kes.

Dia menjeskan, pemulasaran jenazah pasien terkonfirmasi Covid-19 sudah diatur dalam Permenkes tahap-tahap yang dilakukan. Pertama petugas kesehatan yang melakukan terlebih dahulu sudah mengikuti pelatihan. Saat menjalankan tugas pemulasaran wajib mengunakan alat pelindung diri (APD). Jenazah di kafani dan dibungkus plastik, peti sudah disediakan, setelah itu lokasi disemprot berulang kali.

"Jadi masyarakat tidak perlu cemas kita sudah melakukan penanganan atau yang disebut pemulasaran jenazah covid dengan protokol yang telah dibuat," ujarnya.

Ditambahknya, untuk keluarga atau yang pernah kontak erat dilakukan isolasi secara mandiri selam 14 hari, yang rapid tes negatif dilanjutkan ke swab tes kalau memang ada yang meilik gejala baru kita lakukan perawatan. "Kalau yang rapid negatif tidak memiliki gejala apapun artinya sehat, kalau yang miliki rapid positif maka kita minta isolasi mandiri dulu," jelasnya.(**juu**)

Pembangunan Masjid Al-Hadi, Butuh Donatur

BENGKULU - Pembangunan Masjid Al-Hadi di RT 23 RW 01 Perum Pinang Mas Kelurahan Bentiring Permai dikebut. Ditargetkan sebelum Ramadhan tahun 2021, sudah bisa dipergunakan. Seperti kemarin, Minggu (27/12), warga terus bergotong royong serta menggalang dana dan material untuk pembuatan bagian atap, pemasangan granit lantai masjid serta pembuatan pagar pembatas. Saat ini sudah terkumpul uang sekitar Rp 12 juta.

IST/RB

HAMPIR TUNTAS: Pemnanguna masjid Al-Hadi di RT 23 Perum Pinang Mas hampir tuntas.

Ketua RT 23 RW 1 Perum Pinang Mas, Tarjuli, M. Pd mengatakan, masyarakat masi semangat untuk menuntaskan pembangunan Masjid Al-Hadi ini. Ia menambahkan berapapun dana masuk dari warga termasuk para donatur laporan penggunaannya akan terperinci dan setiap waktu akan dilaporkan.

Bagi dermawan yang mau menyalurkan infak dan seadakahnya untuk pembangunan Masjid Al-Hadi bisa disumbangkan langsung atau ke rekening nomor rekening Bank Bengkulu 1060201013093 atas nama Masjid Al-Hadi. "Atas perhatian semua pihak kami sampaikan terima kasih semoga Allah membalas budi baik semuanya," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Pembangunan, Ernani akrab disapa Cik Nani menegaskan jika tidak ada hambatan penuntasan kubah bisa disegerakan meski sementara menggunakan rangka beratap seng.

"Untuk kubah masih membutuhkan ratusan juta rupiah," jelas dia saat digelar pertemuan di bangunan Masjid yang hampir rampung. Tehnis pembangunannya kata Cik Nani, bisa kembali turun melakukan gotong royong maupun dengan menggunakan jasa tukang.(**iks**)

bank bengkulu
tangguh dan tumbuh
Kantor Pusat :
Jl. Basuki Rahmat No.6 Telp. 21503, 21751, 22144 Bengkulu

TABUNGAN

NAMA BANK	JENIS	SALDO	BUNGA/TH	KRITERIA
Bank Bengkulu	Tabot		1,00%	
	Simpeda	Rp. 0 s.d Rp. 500 Rb	0,50%	
		> Rp. 500Rb s.d Rp. 5 Jt	1,00%	
		> Rp. 5 Jt s.d Rp. 50 Jt	1,25%	
		> Rp. 50 Jt s.d Rp. 500 Jt	1,50%	
		> Rp. 500 Jt	2,00%	
	Tabunganku	Rp. 0 s.d Rp. 500 Rb	0%	
		> Rp. 500Rb s.d Rp. 1 Jt	0,25%	
		> Rp. 1Jt	1,00%	

DEPOSITO

NAMA BANK	1 BLN	3 BLN	6 BLN	12 BLN
Bank Bengkulu	5%	5%	5,25%	5,25%

Pembina Manajemen: DAHLAN ISKAN **Pemimpin Umum**: HM.MUSLIMIN (nonaktif), **General Manager/Penanggung Jawab**: MARSAL ABADI, **Wakil Pemimpin Umum/Manajer Personalia**: MUTIA AMPERIANA, **Pemimpin Perusahaan**: Hj. NURBAITI, **Wakil Pemimpin Perusahaan**: -, **Pemimpin Redaksi**: RIKY DWI PUTRA, **Redaktur Pelaksana**: PATRIS MUWARDI, **Redaktur**: SUMARLIN, HERI APRIZAL, FAZLUR RAHMAN, ADE HARYANTO **Wartawan Kota**: ANUGERAH WAHYU, IKSAN AGUS ABRAHAM, HASRUL, YUNIKE KAROLINA, WINDI JUNIUS, JIAFNI RISMAWARNI, ILHAM JULIANDI, **Wartawan di Daerah**: PERI HARYADI (Mukomuko), ARIE SAPUTRA WIJAYA (Kepahiang), M. RIZKI WAHYUDI (Seluma), ALBERTUS YUDI PRATAMA (Kaur), RIO AGUSTIAN (Bengkulu Selatan), TRI SHANDY RAMADANI (Bengkulu Utara), MUHARISTA DELDA (Lebong), WANDA FEBRIANDA (Rejang Lebong), JERI YASPRIANTO (Bengkulu Tengah), **Sekretaris Redaksi**: ANNA MARIYOHANA. **Pracetak**: SUTAMRIN (Kabag), FRAN SINATRA, ARI WIDARYANTO, HENDRA IRAWAN PUTRA, REFDIANTO, HEFFY JUNAIDI, **Teknologi Informasi (TI)**: ZULHAMDI, RUSDIYANTO **Manajer Iklan**: KOMI KENDY, **Account Executive (AE)**: WILMAN SITUMORANG, M. IRFANSYAH, DEVI ASTIKA, ADAM MALIK, RIKO PUTRA, AMALUDIN HAKIM, **Koordinator Penagihan Piutang Iklan dan Koran**: MARSAL ABADI, **Staf**: RIZKI NOVA AMELIA, FRANKY, HELEN, INDI SUDARTO, **Design iklan**: BOY RAHMAN HAKIM, VORWANTO, **Manajer Pemasaran**: HAZRIM, **Deputi**: MASRIYADI, **Staf Pemasaran**: SULISTI HARTINI, SIRHANUDIN, SAMRISMAN LUBIS, OZWARDI ARDIANSYAH, RUDI HARTONO, JULIMAN HAIDI. **Manajer Keuangan**: Hj. NURBAITI, **Deputi Manajer Keuangan**: AGUS SUWARSONO, **Accounting**: ELYA, SULUNG ERNAWATI, LUSIATI, **Event Organizer (EO)**: TUSDA ADHAM, BETTY HERLINA, **Divisi Anak Perusahaan**: SUKATNO, M FIRDAUS, JEFRI GINTING, M RASUL, SOPYAN ARDI, SUMANTRI, WARSIMAN, ERWIN ABENDI, HERU PP, MARSAL ABADI, DASPAN HARYADI, BAHMAN HADI, KARTUBI, M BASIR, WIRO IDRUS SALAM, NANANG SETIAWAN, DITA ASFANI, SUSANTO, PURNAMA SAKTI, SYAHBANDAR, AZMALIAR ZAROS, ARJUNA WIWAHA. **Penerbit**: PT BENGKULU SEMARAK PERMAI, **Komisaris Utama**: HM ALWI HAMMU, **Komisaris**: DWI NURMAWAN, LUKMAN SETIAWAN. **Direktur Utama**: H SUPARNO WONOKROMO. **Direktur**: HM. MUSLIMIN, MH, **Coorporate Lawyer Jawa Pos Group/Harian Rakyat Bengkulu**: Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, **Alamat Redaksi/ Pemasaran/Iklan**: Graha Pena Rakyat Bengkulu Jalan P Natadirdja No. 69 KM 6,5 Bengkulu. **Telepon** (0736) 20882, 22060, 341694, 344754, 346771 **Faximile** (0736) 346770 **Perwakilan Jakarta**: Graha Pena Jakarta Lantai 6 JalanRaya Kebayoran Lama No. 16 Jakarta. (021)-53699581 **Fax** (021) 53651427 **Percetakan**: PT BENGKULU SINAR GRAFIKA, **Manajer Percetakan**: - , **Operasional Percetakan**: JOKO SANTOSO, MAWARDI, ARI YULIZAR, MESTA DOMIZA, HERMAN, TRIONO WIJAYA, MARSUDI, MEDI PURWANTO, APRIANDONI, HENDRI SAPUTRA, AGUNG SYAPUTRA, SAIWAN, **Alamat Percetakan**: Jalan WR Supratman RT 01 Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Telepon 082180191842.**Tarif Iklan**: Display (umum) Rp.47.500/mmk, sosial/keluarga/pendidikan, film, dan ucapan selamat Rp 25.000/mmk, iklan baris/mini Rp 5.500/baris (min 3 baris, max 10 baris). Warna (minimal 1/4halaman) Rp 48.000/mmk satu warna, Rp 53.000/mmk (2 warna), dan Rp.62.500/mmk (full colour). Harga eceran Rp 6.000/eks, langganan Rp 165.000, luar kota tambah ongkos kirim.
- Wartawan Rakyat Bengkulu dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita - Wartawan Rakyat Bengkulu dalam menjalankan tugas dibekali kartu identitas. - Isi di luar tanggung jawab percetakan.

TELEPON PENTING

Polres	087877170691
Kantor PBK	085378635859
Rumah Sakit	0737 71148
PLN	0737 71154

Ijon Hanya Merugikan Petani

PELABAI – Jelang masa tanam padi serentak 2021, Bupati Lebong, Dr. H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si mengingatkan agar petani tidak tergiur dengan praktek ijon. Yakni praktek meminjam uang atau pupuk kepada pemodal dengan syarat jumlah pengembalian lebih mahal alias berbunga.

Sengaja ia mengingatkan masyarakat karena belakangan mulai bermunculan toke yang siap ijon kepada petani yang sedang terdesak modal. "Biasanya pemodal meminjamkan sejumlah uang atau kebutuhan tanam seperti pupuk dengan perjanjian pengembaliannya dihitung per karung gabah," ujar Bupati.

Sementara sekarung gabah yang harga pasarannya Rp 200 ribu harus dipakai untuk menebus utang modal dengan harga yang ditekan lebih rendah dari pasaran. Kesannya membantu petani, faktanya ijon jelas merugikan petani. "Solusi yang harus dilakukan petani untuk menghindari praktek ijon, cukup dengan memanfatkan bantuan pemerintah melalui pembentukan Poktan (Kelompok Tani, red)," terang Bupati.

Setiap poktan yang sudah terdaftar diwajibkan menyusun Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dengan penyusunan RDKK, distribusi pupuk untuk petani tidak akan salah sasaran dan harganya lebih murah dari harga di pasaran. "Saya minta OPD (organisasi perangkat daerah, red) terkait benar-benar menyiapkan segala kebutuhan masa tanam, termasuk Poktan harus menyelamatkan petani dari ancaman ijon," tegas Bupati.

Terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Lebong, Mahdi, S.Sos meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong maksimal dalam menyiapkan kebutuhan tanam. Baik bibit maupun pupuk. Jangan sampai hingga masa tanam tiba, petani tidak bisa menanam padi karena stok pupuk bersubsidi habis. ''Pemkab Lebong, dalam hal ini Disperkan (Dinas Pertanian dan Perikanan, red) harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi," ujar Mahdi.

Selain itu, Disperkan melalui kios pupuk yang ditunjuk secara resmi wajib melayani penebusan pupuk oleh petani yang tergabung dalam poktan kapanpun diperlukan. Seluruh regulasinya, seperti Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebutuhan Pupuk tahun 2021 harus segera diterbitkan. "Jangan ditunda-tunda karena ini menyangkut kepentingan pokok masyarakat," tutup Sriwijaya. (**sca**)

Desa Wajib Berdayakan Satgas PPA

PELABAI - Guna melindungi tumbuh kembang anak, 11 kelurahan dan 93 desa yang ada di Kabupaten Lebong harus memberdayakan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang telah dibentuk hingga tingkat kelurahan dan desa. Soalnya kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali terjadi dalam rumah tangga dan lingkungan tempat tinggal.

"Kekerasan terhadap perempuan dan anak jelas akan memberikan dampak negatif secara luas," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kebupaten Lebong, Drs. Firdaus, M.Pd.

Tidak hanya terhadap korban saja, dampak buruknya juga berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak dalam kehidupan suatu keluarga. Mengingat kekerasan yang dihadapi perempuan dan anak bukan hanya sebatas kekerasan fisik. Namun termasuk di dalamnya kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran.

"Pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak juga tidak selalu orang luar atau orang yang tidak dikenal. Namun juga berasal dari lingkungan terdekat korban, apakah itu ayah, kakek atau paman, bahkan tetangga," ungkap Firdaus.

Terlebih saat ini setiap desa sudah memiliki anggaran yang besar melalui Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Termasuk kelurahan yang diberikan Dana Kelurahan (DK). Selain untuk kegiatan fisik infrastruktur, dana itu juga harus digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satunya sosialisasi atau pemberdayaan Satgas PPA dalam rangka menjaga desa dari kasus kekerangan perempuan dan anak.

"Seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Lebong juga sudah pernah mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) satgas anti kekerasan perempuan dan anak. Artinya tinggal diterapkan yang salah satunya memberdayakan Satgas PPA," tutur Firdaus. (**sca**)

ARIS/RB

SEPI: Beginilah kondisi objek wisata Danau Picung. Sejak pandemi Covid-19, sepi pengunjung.

Libur Tahun Baru, Wisata Lebong Ditutup

PELABAI - Kendati sejak penerapan new normal terhitung 1 Juli, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong telah membuka kembali pelayanan objek wisata. Khusus libur tahun baru 2021, Pemkab Lebong melarang pengelola objek wisata di Lebong membuka pelayanan.

"Semua objek wisata di Lebong ditutup selama libur tahun baru," tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si.

Pemkab Lebong sudah menyurati Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis pengelola agar menutup seluruh objek wisata saat libur tahun baru. Diharapnya Disparpora telah menindaklanjutinya dengan menyurati seluruh pengelola objek wisata di Lebong.

"Kalau masih ada objek wisata yang menerima pengunjung saat libur tahun baru, akan kami sanksi tegas," tukas Sekda.

Penutupan objek wisata selama libur tahun baru harus dilakukan demi menghindari kerumunan. Soalnya setiap kerumunan berpotensi memunculkan klaster baru penyebaran Covid-19. Terlebih dalam Peraturan Bupati (Perbup) Lebong Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, seluruh masyarakat dilarang memunculkan kerumunan. "Kami harap semua pihak menaati aturan ini," kata Sekda.

Guna mengantisipasi pelanggaran, Sekda memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres dan Kodim. Saat libur tahun baru yang akan dimulai Kamis (31/12) hingga Minggu, 3 September 2021, seluruh objek wisata akan dipantau aparat TNI dan Polri. "Kalau libur Natal pengelola wisata memang masih dibolehkan menerima pengunjung, hanya jam dan jumlah pengunjungnya saja yang dibatasi. Tetapi untuk libur tahun baru benar-benar ditutup," jelas Sekda.(**sca**)

2021, Nihil Pembangunan Baru BSPS

PELABAI - Jika untuk renovasi Rumah Tak Layak Huni (RTLH), Lebong hanya dijatahi 86 unit. Khusus untuk Pembangunan Baru (PB) program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Lebong sama sekali tidak dapat bagian.

"Kalau PB memang ditunda oleh pusat, bukan hanya Lebong," kata Kabid Pembiayaan Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Lebong, Puji Warno, S.Pd.

Penundaan program PB di tahun anggaran 2021, lanjut Puji, sesuai instruksi pusat berkaitan dengan status pandemi Covid-19. Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus benar-benar diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak.

"Penundaan PB itu disampaikan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, red) saat kami mengikuti rapat koordinasi di Palembang," terang Puji.

Diakuinya, dalam usulan program BSPS tahun anggaran 2021, Disperkim Lebong mengusulkan 2 ribu unit rumah program PB. Namun Lebong dipastikannya tetap mendapatkan bantuan lebih untuk program Kementerian PUPR. Salah satunya rumah susun (Rusun) 3 lantai senilai Rp 24 miliar yang akan dihibahkan untuk Polres Lebong.

"Untuk penundaan PB itu juga kami belum tahu sampai kapan diberlakukan," tukas Puji.

Khusus untuk RTLH, Puji pastikan tetap akan mengusulkan tambahan. Jika memungkinkan tambahan kuota renovasi RTLH itu akan diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2021. "Begitu juga tahun 2022, akan kami usulkan lebih banyak agar kuotanya bisa terus bertambah," tutur Puji. Terkait realisasi renovasi RTLH di Kabupaten Lebong, Puji mengaku tidak tahu persis. Namun dikatakan realisasinya sudah di atas 70 persen. Dari 7.500 unit rumah berstatus RTLH terhitung 2020 telah dilakukan perbaikan 5 ribuan unit. "Renovasi itu tidak hanya melalui APBN, namun juga dari APBD," tutup Puji. (**sca**)

ARIS/RB

MERAGUKAN: Manfaat bangunan Rusun PNS ini bagi Pemkab Lebong masih dipertanyakan.

Kaji Ulang Rusun Polisi

LEBONG UTARA - Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Rumah Susun (Rusun) untuk personel Polri di Kabupaten Lebong, diminta masyarakat ditinjau ulang. Disampaikan tokoh masyarakat Lebong, Saipuddin, sampai saat ini masih banyak masyarakat kurang mampu di Lebong yang belum punya rumah. "Saya rasa lebih bijak kalau Rusun diprioritaskan untuk masyarakat tidak mampu," kata Saipuddin.

Bukan tanpa alasan. Kritikannya agar rencana pembangunan Rusun senilai Rp 24 miliar dari APBN 2021 itu dikaji ulang, mengingat sebelumnya Lebong sudah punya contoh Rusun terbengkalai. Yakni Rusun PNS yang dibangun tahun 2019 senilai Rp 54 miliar. "Sampai sekarang hanya hitungan jari tangan PNS yang menempatinya," ujar Saipuddin.

Bahkan informasi yang didapatinya, Rusun PNS hanya akan membebankan APBD Lebong. Itu karena statusnya tinggal menunggu proses hibah dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong. Jika sudah dihibahkan ke daerah statusnya akan dicatat sebagai aset Pemkab Lebong sehingga pemeliharaannya ditanggungkan ke daerah.

"Artinya dalam mengusulkan program perumahan, Disperkim (dinas perumahan dan kawasan permukiman, red) Kabupaten Lebong harus benar-benar melihat apa yang dibutuhkan daerah serta memberi manfaat yang jelas. Jangan sampai nanti Rusun Polisi juga membebankan APBD, walaupun ketika sudah dihibah ke Polres Lebong menjadi tanggung jawab penuh instansi pengguna," tutur Saipuddin.

Sementara Kabid Pembiayaan Perumahan, Disperkim Kabupaten Lebong, Puji Warno, S.Pd belum bisa dikonfirmasi. Namun pernah disampaikannya, pembangunan Rusun Polisi itu memang program pusat. Daerah hanya diminta mengusulkan serta menyiapkan lahan.(**sca**)

TELEPON PENTING

Kapolres	: 082280559797, 081336009977
Wakapolres	: 081367395996
Kabag Ops	: 081368293186
Kasat Reskrim	: 081274890817
Kasat Intel	: 08127317715
Kasatres Narkoba	: 085369000969
Kasat Binmas	: 081271279066
Kasat Lantas	: 081396058666
Pabung	: 081349049001
PBK	: 081273229643, 085268355005

Ajak Nelayan Patuhi Aturan

MUKOMUKO – Pecahnya konflik nelayan trawl dengan nelayan tradisional di Bengkulu Utara, akibat adanya pihak nelayan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Hal yang sama berpotensi terjadi di Mukomuko. Terkecuali jika setiap nelayan memahami, mana saja batas mereka bisa menangkap ikan, sesuai dengan alat tangkap yang digunakan.

Hal ini dikatakan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Mukomuko, Saidina Ali. Dijelaskannya, semua jenis alat tangkap yang digunakan, sudah diatur pemerintah dalam penggunaannya. Sebagaimana sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan (PermenKP) Nomor: 59/PERMEN-KP/2020, Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas.

"Dengan adanya PermenKP ini, tentu seluruh insan nelayan wajib mematuhi segala yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah," kata Saidina.

Pria yang pernah menjabat Ketua HNSI Bengkulu Utara ini mengatakan, ketentuan yang sudah dibuat tersebut, menjadi kebutuhan sesama insan nelayan. Untuk menghindari terjadinya gesekan antar nelayan. Apalagi sebelumnya sudah ada perjanjian yang mestinya saling mematuhi.

"Kita wajib mematuhi perjanjian yang kita sepakati bersama. Jangan sampai terpengaruh oleh gesekan para oknum yang tidak bertanggungjawab," imbau Saidina.

Ia berharap kejadian serupa tidak sampai terjadi di Kabupaten Mukomuko. Apalagi sebelumnya, sempat kejadian di Ipuh, satu unit kapal diamankan nelayan tradisional lantaran diduga menangkap ikan di luar ketentuan. Pihaknya bersyukur oknum nelayan yang diproses kepolisian saat itu sudah dijatuhi vonis hakim.

"Dengan adanya kejadian di Bengkulu Utara ini, kita harap tidak sampai terjadi di wilayah lainnya. Terutama para nelayan yang di wilayah Kabupaten Mukomuko, jangan terpancing," harap Saidina.

Terkait nelayan yang menggunakan pukat trawl, Saidina mengatakan, berdasarkan PermenKP terbaru yang dipahaminya, bahwa alat tangkap itu hanya boleh dioperasikan harus pada Jalur Penangkapan Ikan III. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 di PermenKP tersebut.**(hue)**

PERI/RB

PONPES: Peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Modern Hishnul Ummah oleh Wakil Bupati Mukomuko, Haidir, S.IP, Minggu (27/12).

Ponpes Makin Menjamur

MUKOMUKO – Kabupaten Mukomuko menjadi daerah potensial tumbuh dan berkembangnya pondok pesantren (Ponpes). Terbukti meski di tengah pandemi Covid-19, tidak menghalangi pembangunan Ponpes baru di Mukomuko.

Ponpes pun makin menjamur. Dari data Kementerian Agama, sudah berdiri dan beroperasi selama ini 11 Ponpes di Kabupaten Mukomuko. Ini berpotensi terus bertambah dengan dimulainya pembangunan Ponpes baru di wilayah Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Rumbai, kemarin (27/12).

Diantara 11 Ponpes yang tercatat di Mukomuko yakni Ponpes Al-Barkah Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV Koto, Ponpes Nurul Fatih Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang dan Ponpes Al-Iman Yamaja Rimba SP V Kecamatan Air Majunto. Selain itu, Ponpes Raudatun Najah di Desa Bandar Jaya Kecamatan Teramang Jaya. Ponpes An-Nakhil di Dusun 1 Kecamatan Teramang Jaya.

Selanjutnya, Ponpes Al-Ihsan di Desa Gading Jaya Kecamatan Sungai Rumbai. Ponpes Al-Munawaroh Pasar Belakang Kota Mukomuko, Ponpes Darul Ulum Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto, Ponpes An-Nur Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh, Ponpes Darul Amal Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh dan Ponpes Miftahul Ulum Desa Lubuk Mukti Kecamatan Penarik.

Terbaru, Ponpens Hishnul Ummah, pimpinan Tatua Zoni, S.Pd.I, LC yang peresmian dan peletakan batu pertama pembangunannya langsung oleh Wakil Bupati Mukomuko, Haidir, S.IP, kemarin. Turut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Mukomuko Ir. Renjes Zhaettedy dan Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko, Suwarno.

Wabup mengatakan, Pemkab Mukomuko sangat berharap dukungan dari seluruh masyakarat, para tokoh, kyai dan lainnya agar pendidikan di Kabupaten Mukomuko yang akan datang mampu menjadikan generasi Kabupaten Mukomuko yang berakhlak, berbudi pekerti, cerdas, dan berkualitas. "Saya menyambut baik dan mempunyai keyakinan dengan adanya Pondok Pesantren di Kabupaten Mukomuko, mampu berkontribusi nyata. Termasuk Hishnul Ummah ini. Mampu memberikan pendidikan yang baik kepada generasi penerus bangsa. Khususnya di Kecamatan Sungai Rumbai. Bisa membentuk dan mengembangkan nilai moral akhlak islami dan budi pekerti yang baik bagi santri dan santriwati nantinya," harap Wabup. **(hue)**

Tangan Diikat, Pantat Disulut Api Rokok

Tsk Aniaya Anak Tiri Ditangkap

MUKOMUKO – Sungguh sadis tindakan yang dilakukan JS (30) warga Kecamatan Lubuk Pinang. Ia diduga tega menganiaya seorang anak yang masih balita yang baru berusia 4 tahun. Korban merupakan anak tirinya.

Selama ini korban tinggal bersama JS setelah JS menikah dengan ibu korban. Belum diketahui pasti sebab sampai JS tega menganiaya korban. "Masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut," kata Kapolres Mukomuko AKBP. Andy Arisandi, SH, S.IK, MH melalui Kasubbag Humas AKP. Anwar Efendi.

Diterangkannya, berdasarkan keterangan dari pelapor yang merupakan ayah kandung korban, bahwa informasi yang ia dapatkan dari tetangga tempat JS dan ibu kandungnya tinggal, bahwa korban diduga dianiaya dengan cara kedua tangan korban diikat dengan tali. Setelah itu, wajah korban dipukuli oleh JS yang merupakan ayah tirinya. Tidak sebatas itu, JS dengan tega juga menyulutkan api rokok ke pantat korban.

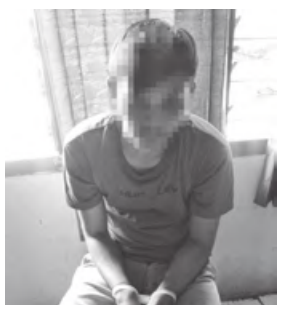

IST/RB

DITANGKAP: Terduga pelaku penganiayaan terhadap anak tiri, diringkus polisi.

Pelapor sendiri sudah memeriksa kondisi tubuh anak kandungnya itu. Dan, didapati pada tubuh korban terdapat banyak bekas luka dan pada tangan korban terdapat luka memar diduga bekas ikatan tali.

Kejadian penganiayaan diduga terjadi 21 Desember 2020. Di kediaman JS. "Untuk memastikan laporan pelapor, penyidik sudah meminta keterangan pelapor dan mengantarkan korban ke dokter untuk dilakukan visum et repertum," terang Anwar.

Atas laporan pelapor, penyidik pun bergerak cepat. Dengan melakukan penangkapan terhadap JS. Ia pun diringkus tanpa perlawanan, dan langsung digelandang ke Mapolsek Lubuk Pinang. "Kasus ini ditangani Polsek Lubuk Pinang," ujar Anwar.**(hue)**

900 KPM Bansos Mundur

MUKOMUKO – Labelisasi rumah penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah terbilang sukses. Dibuktikan sekitar 900 orang keluarga penerima manfaat (KPM) telah mengundurkan diri sebagai penerima bansos.

"Ada yang mundurnya sebelum labelisasi dilaksanakan, dan ada juga yang baru mundur saat program labelisasi berjalan," kata Kepala Dinas Sosial Mukomuko, Saroni, SH.

Dengan adanya labelisasi terhadap rumah KPM, lebih dari 10 persen dari jumlah KPM bansos mundur. Padahal, Dinsos hanya menargetkan tahun ini sekitar 10 persen penerima bansos mengundurkan diri. Dengan adanya yang mundur, maka membuka peluang untuk warga yang lebih layak menerima bisa diusulkan ke pusat.

Dengan harapan, sudah ada perbaikan data tahun 2021 mendatang. Sehingga warga yang selama ini masuk kategori layak menerima, sudah bisa masuk dalam daftar sebagai warga penerima bansos pemerintah. "Harapan kita begitu. Mengingat masih banyak warga dari hasil pendataan kita layak menerima, tapi tidak masuk dalam daftar. Sementara masih ada penerima bansos yang ekonominya menurut kita masih lebih mapan dari warga lainnya, tapi masih tetap sebagai penerima bansos pemerintah," jelas Saroni.

Oleh sebab itu, direncanakan, program labelisasi masih berlanjut tahun depan. Dengan menyasar lebih banyak rumah KPM bansos pemerintah. Tujuan utama dari program itu agar masyarakat umum tahu, mana saja warga di desanya mendapatkan bansos pemerintah. "Tahun ini kita pasang di 148 desa dan tiga kelurahan. Masing-masing tiga unit rumah," ujar Saroni.

Dengan adanya Menteri Sosial yang baru, ia berharap, pemerintah pusat dapat segera memperbaiki data penerima bansos. Sebab selama ini masih ada beberapa persoalan soal terkait data penerima bansos. "Keluhan masyarakat sudah cukup banyak mengenai data ini. Kami dari Dinsos tidak dapat berbuat banyak. Karena data penerima itu sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang itu ada di Kementerian Sosial," jelas Saroni.**(hue)**

PEMERINTAH DESA RAMI MULYA
KECAMATAN AIR RAMI KABUPATEN MUKOMUKO

KOMPAK: Kades bersama perangkat Desa Rami Mulya.

Fokus Untuk Kesejahteraan Masyarakat

MENINGKATKAN kesejahteraan rakyat, jadi fokus Kades Rami Mulya, Kecamatan Air Rami, Supanto. Oleh sebab itu, dana desa yang didapat Rp 774,6 juta lebih sebagian besar digunakan untuk pembangunan jalan rabat beton. Dengan panjang jalan yang dibangun mencapai 1,1 kilometer lebih. Jalan ini bukan saja untuk mempermudah akses masyarakat Rami Mulya antar dusun. Tapi juga jadi akses memudahkan masyarakat mengeluarkan hasil perkebunan. Selain itu, untuk memastikan ketersediaan air bersih untuk masyarakat, dana sekitar Rp 37 juta digelontorkan untuk pembangunan Pamsismas. Tidak hanya itu, di bawah komando Supanto, pemerintah desa mengalokasikan Rp 142,2 juta untuk bantuan langsung tunai (BLT) tahap I dan 2, dan sebesar Rp 71,1 juta untuk BLT tahap 3 dan 4.(**hue/krn**)

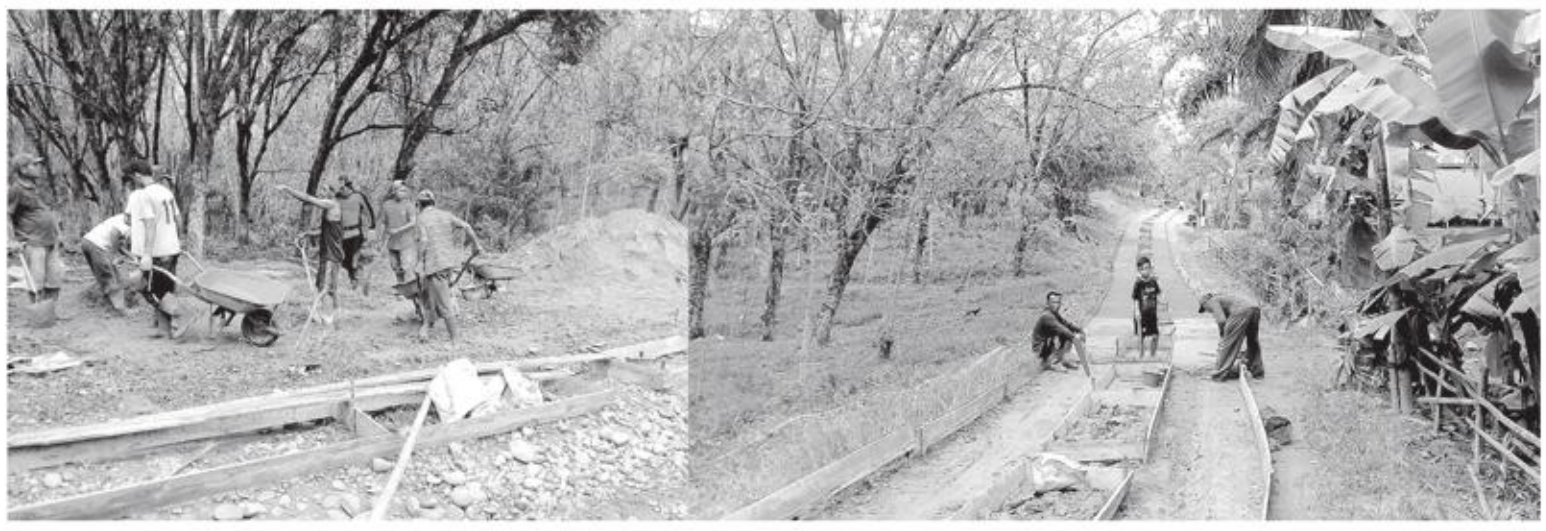

KEBERSAMAAN: Proses pengerjaan pembangunan jalan rabat beton oleh masyarakat.

TUNTAS: Pembangunan rabat beton tuntas dan mulai dapat dimanfaatkan masyarakat.

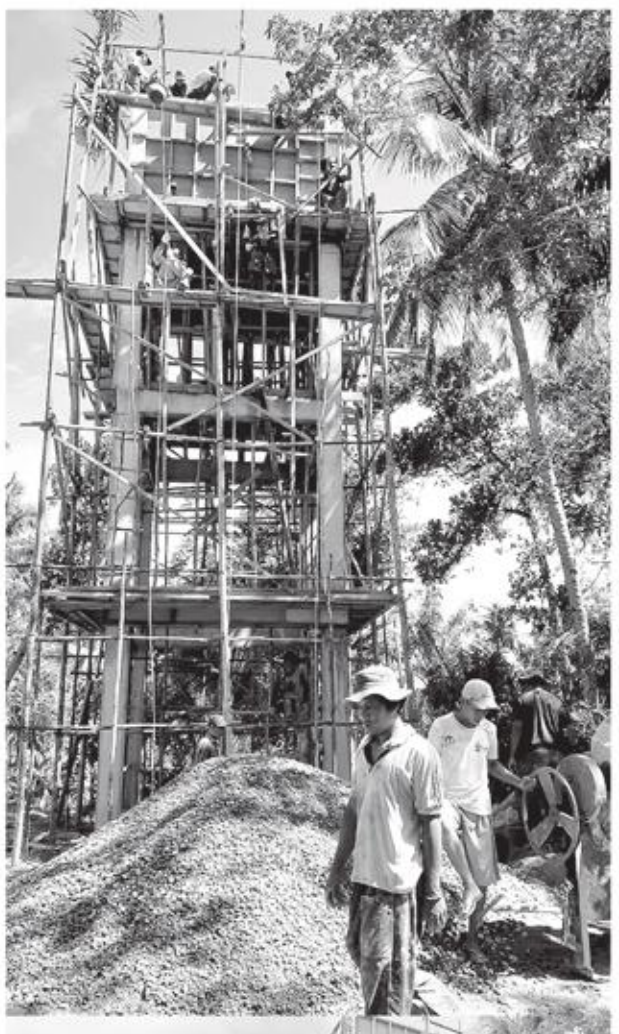

PAMSISMAS: Pembangunan Pamsismas untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jalan Terminal Simpang Nangka Air Meles Atas
CURUP - 39153

Rekap Daftar Harga Bahan Pokok Di Tingkat Pengecer Pasar Atas Curup

1. Bayam	2.500	10. Terong Ungu	3.000	19. Daging Sapi	120.000
2. Bawang Daun	6.000	11. Sawi Manis	3.000	20. Daging Kerbau	120.000
3. Cabe Rawit Hijau	32.000	12. Kol	5.000	21. Ikan Nila	26.000
4. Cabe Merah Besar	35.000	13. Bawang Merah	36.000	22. Ikan Mas	30.000
5. Cabe Keriting	40.000	14. Bawang Putih	23.000	23. Ikan Laut Sarden	26.000
6. Buncis	8.000	15. Kangkung	2.000	24. Ikan Lele	24.000
7. Tomat	5.000	16. Kentang	12.000	25. Telur Ayam Ras	22.000
8. Kacang Panjang	5.000	17. Timun	4.000	26. Daging Ayam Ras	32.000
9. Wortel	5.000	18. Kol Kembang	10.000	27. Beras Premium	10.250

AHMAD HIJAZI

Usulkan Pintu Tol di Kecamatan Binduriang

CURUP – Bupati Rejang Lebong (RL) Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si memastikan akan berusaha agar salah satu pintu tol Bengkulu-Lubuklinggau bisa dibangun di Kabupaten RL. Dimana sebelumnya rencana usulan untuk pintu tol tersebut berada di wilayah Kecamatan Sindang Dataran.

Namun diungkapkan bupati, mereka akan mengusulkan pintu tol tersebut berada di Kecamatan Binduriang. Karena jika di Kecamatan Sindang Dataran jarak lokasi dengan Jalan Nasional mencapai 15 km. Sedangkan untuk lokasi yang baru akan akan kembali diusulkan hanya berjarak 2 km dari jalan nasional yaitu Jalur Lintas Curup-Lubuklinggau.

''Usulan lokasi yang semula direncanakan berada di Kecamatan Sindang Dataran memiliki jarak mencapai 15 Km dari jalan nasional. Jarak pintu tol ini tidak boleh lebih dari 2 km dari jalan nasional. Jadi sudah saya sampaikan ke Dinas PUPRPKP agar usulan disepakati dipindahkan ke Kecamatan Binduriang," sampai Bupati.

Dilanjutkan Bupati, usulan pembukaan pintu tol di Kecamatan Binduriang tersebut sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Dimana lokasi tetapnya berada di wilayah Desa Simpang Beliti atau persis berada di depan Koramil Binduriang dan beberapa waktu lalu juga sudah ditinjau oleh pihak Kementerian PUPR.

''Kita berharap usulan ini bisa diakomodir, karena kita di Rejang Lebong tidak ada persoalan lagi. Termasuk lahannya sudah disiapkan dan sudah dilakukan ganti rugi. Harapan kita dengan keberadaan pintu tol ini bisa menjadi salah satu faktor peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Binduriang dan masyarakat Rejang Lebong pada umumnya," demikian Bupati.**(dtk)**

Sudah Ada 26 Kampung KB

CURUP – Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (RL) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten RL sudah mendirikan setidaknya 26 Kampung KK. Pendirian dan pembentukan Kampung KB ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 lalu.

Dijelaskan Kepala Bidang (Kabid) Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga Dinas P3APPKB Kabupaten RL Asrawani, 26 kampung KB tersebut tersebar di wilayah 15 kecamatan. ''Total kampung KB yang dimilki Kabupaten Rejang Lebong sudah mencapai 26 kampung KB dan tersebar di wialayah 15 kecamatan," sampai Asrawani.

Dilanjutkan Asrawani, pembentukan Kampung KB tahun 2020 ini memang belum ada penambahan. Karena fokus terhadap pembinaan Kampung KB itu sendiri melalui kelembagaan serta program-programnya. Dimana secara kelembagaan Kampung KB yang ada di desa atau kelurahan ini, terdiri dari beberapa kelompok kerja (pokja).

''Jadi sesuai dengan 8 fungsi keluarga, yakni fungsi agama, kasih sayang, perlindungan, sosial budaya, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. pokja-pokja ini bekerja sesuai dengan fungsinya. Mulai dari bagaimana membina remaja yang agamis atau religius, melakukan penyuluhan usia pernikahan serta kegiatan lainnya," sambung Asrawani.

Ditambahkan Asrawani, pembentukan Kampung KB sendiri bertujuan untuk menyukseskan program pengendalian penduduk yang digencarkan pemerintah. ''Alhamdulillah tahun ini pak bupati dan pemkab berhasil mendapatkan penghargaan dari BKKBN pusat terkait pengelolaan Kampung KB di Provinsi Bengkulu," imbuh Asrawani.**(dtk)**

Begal Jalur Lintas Beraksi Lebih Tiga TKP

Identifikasi Rekan Pelaku

CURUP - Upaya Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rejang Lebong (RL) dalam mengungkap dan menangkap pelaku begal alias curas di jalan jalur lintas Curup-Lubuklinggau terus dilakukan. Satu persatu gembong curas yang meresahkan masyarakat dan pengendara yang melintas di sepanjang jalur Curup-Lubuklinggau ditangkap.

Terbaru yang dibekuk Tim Cobra Polres RL beberapa hari lalu yaitu De (27) warga Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang. De sendiri sebelumnya sempat terekam kamera warga saat melakukan aksi begal bersama satu rekannya di jalur Curup-Lubuklinggau dengan merampas motor milik pengendara yang melintas.

De berhasil dibekuk di rumah salah satu temannya di Desa Kampung Delapan Kepala Curup Kecamatan Binduriang. Dari hasil penyidikan sementara, keteranga De dirinya sudah beraksi lebih dari tiga TKP yang berada di jalur lintas Curup-Lubuklinggau. Dalam beraksi, De mengaku tidak pernah sendirian dan selalu bersama rekannya.

''Hasil penyidikan kita sementara, De ini memang menjadi salah satu gembong begal alias curas jalur lintas. Dia mengaku sudah lebih dari tiga kali beraksi dan terakhir beberapa bulan lalu," sampai Kapolres RL AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH melalui Kasat Reskrim AKP Ahmad Musrin Munzi, SH, S.IK kepada RB kemarin.

Untuk itulah, sambung Musrin, mereka saat ini sedang menelusuri laporan polisi terkait aksi begal yang dilakukan De. Selain itu mereka juga menelusuri barang bukti motor hasil begal yang diaku De sudah dijual bersama rekannya. Termasuk juga sedang mengidentifikasi identitas rekan-rekan De dalam melancarkan aksi begalnya.

''Kita telusuri dulu untuk pengembangan, baik itu laporan polisinya, apakah korban melapor ke Polres atau ke Polsek jajaran. Beberapa nama dan inisial rekan De sudah dikantongi. Kita akan dalami dulu untuk pengelidikan serta pengembangan. Mudah-mudahan dalam beberapa pekan kedepan sudah ada perkembangan," demikian Musrin.**(**)**

DIAMANKAN: Pelaku curanmor berinisial SA saat diamankan Tim Cobra Polres RL Sabtu (26/12) malam lalu.

Curanmor Tertangkap Basah Sedang Dorong Motor

CURUP – Apes kembali dialami pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum (wilkum) Polres Rejang Lebong. Saat sedang mendorong motor milik korbannya, pelaku curanmor berinisial SA (28) warga Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur tertangkap basah korbannya alias pemilik motor Rudi Hartono (42) warga Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup.

Data terhimpun, korban saat itu sedang kebutulan main ke ruko Kopi Cap Jempol di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Sabtu (26/12) malam sekitar pukul 20.30 WIB. Saat sampai dilokasi kejadian tersebut, Motor Honda Beat BD 3980 HB milik korban diparkirkan pinggir jalan atau di depan gerbang masuk Kopi Cap Jempol.

Hanya berselang sekitar 10 menit, korban keluar dari ruko/rumah dengan maksud hendak ingin pulang. Namun alangkah terkejutnya korban saat keluar melihat motor miliknya sedang didorong pelaku yang tidak dikenal korban. Spontan korban langsung berteriak 'maling' yang didengar warga sekitar yang langsung melakukan pengejaran.

Secara bersamaan, saat itu melintas rombongan Kasat Reskrim Polres RL AKP Ahmad Musrin Muzni, SH, S.IK bersama Tim Cobra sedang melakukan patroli rutin. Bersama warga, Tim Cobra selanjutnya melakukan pengejaran terhadap pelaku curanmor yang melarikan diri ke arah areal perkebunan warga. ''Dari keterangan korban, motor dalam kondisi terkunci stang dan ditinggalkan hanya lebih kurang sepuluh menit," sampai Kapolres RL AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH melalui kasat Reskrim AKP Ahmad Musrin Muzni, SH, S.IK kepada RB.

Setelah beberapa menit melakukan pencarian, sambung Musrin, pelaku akhirnya tertangkap saat bersembunyi di areal kebun kopi tidak jauh dari lokasi kejadian. ''Kebetulan kita memang sedang melakukan patroli rutin, mendapati ada kejadian curanmor. Kita akhirnya berhasil membekuk pelaku bersama warga, dimana pelaku bersembunyi di areal kebun kopi tidak jauh dari lokasi kejadian setelah diteriaki maling," sambung Musrin.

Ditambahkan Musrin, saat ini pelaku bersama barang bukti sebuah mata kunci T yang biasa digunakan untuk melancarkan aksi curanmor sudah diamankan di Polres RL. ''Kita masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan masih akan dikembangkan terlebih dahulu. Karena kemungkinan ini bukan aksi pertama yang dilakukan pelaku," demikian Musrin.**(**)**

Positif Corona Bertambah Enam Kasus

CURUP - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Rejang Lebong (RL), kemarin kembali mencatat adanya tambahan 6 kasus konfirmasi positif baru Covid-19. Selain itu juga ada penambahan satu pasien selesai kasus konfirmasi alias sembuh. Ini disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten RL Syamsir, S.KM, M.KM kepada RB kemarin.

Dijelaskan Syamsir, tambahan kasus positif baru tersebut yaitu kasus 473 perempuan (24) asal Kecamatan Curup Selatan berstatus Tenaga Kesehatan (Nakes). Lalu kasus 474 perempuan (28) asal Kecamatan Curup Timur berstatus Nakes dan kasus 475 perempuan (24) asal Kecamatan Curup Tengah berstatus Nakes.

Selanjutnya, sambung Syamsir, kasus 476 perempuan (42) Kecamatan Curup berstatus nakes, kasus 477 laki-laki (25) asal Kecamatan Curup dan kasus 478 perempuan (28) asal Kecamatan Selupu Rejang. Sedangkan satu kasus sembuh yaitu kasus 450 asal Kecamatan Curup Tengah. ''Ya, hari ini ada penambahan enam kasus positif baru yang empat diantaranya adalah nakes dan dua lainnya masyaarakat sipil," sampai Syamsir.

Ditambahkan Syamsir, dengan adanya tambahan kasus positif baru dan selesai konfirmasi atau sembuh tersebut, total konfirmasi positif mencapai 478 kasus. ''Sedangkan untuk jumlah selesai kasus konfirmasi atau sembuh sudah mencapai 425 kasus. Dan untuk konfirmasi positif masih dalam pengawasan tersisa sebanyak 53 kasus," demikian Syamsir.**(dtk)**

Perda Kedisiplinan Prokes

CURUP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong (RL) terus berupaya agar penyebaran Covid-19 di Kabupaten RL bisa ditekan seminimal mungkin. Berbagai upaya dan cara sudah banyak dilakukan agar masyarakat bisa displin dengan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. Mulai dari pembagian masker secara gratis kepada seluruh masyarakat, hingga menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup).

Bahkan saat ini, Pemkab RL sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Daaerah (Perda) terkait Covid-19. Rancangan Perda tersebut diupayakan bisa disahkan menjadi Perda dalam tahun 2020 ini juga, meskipun tersisa tinggal beberapa hari lagi sudah memasuki tahun baru 2021.

''Rancangan Perda Akan segera disampaikan ke DPRD Kabupaten Rejang Lebong untuk dibahas dan di sahkan dalam Sidang Paripurna. Juga dikoordinasikan ke Kejari dan Polres untuk bagaimana nanti teknis penerapannya dilapangan," terang Asisten I Sekretariat Kabupaten (Setkab) RL Pranoto Majid.

Dilanjutkan Pranoto, penyusunan Rancangan Perda tersebut memang sudah lama dilakukan seiring telah diterbitkannya Perbup. Dan saat ini sudah tinggal diajukan ke DPRD Kabupaten RL. Apalagi beberapa waktu lalu, sudah ada arahan Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah terkait peningkatan payung hukum terkait penegakan disiplin Prokes Covid-19.

''Ini juga sesuai arahan pak gubernur dalam pertemuan beberapa waktu lalu, termasuk pembahasan soal rumah sakit darurat. Karena memang kita sudah memiliki dan menerbitkan perbup. Sehingga dari arahan pak gubernur, perbup yang sudah diterbitkan untuk segera ditingkatkan menjadi Perda. Agar bisa memberikan sanksi tegas terhadap para pelanggar prokes Covid-19," lanjut Pranoto.

Ditambahkan Pranoto, mereka juga saat ini sedang mempersiapkan untuk RS Darurat, dimana gedung calon RS PMI rencananya ditunjuk untuk menjadi salah satu RS darurat Covid-19. ''Kalau bisa dalam tahun 2020 ini rancangan perda tersebut sudah bisa disahkan menjadi Perda dan awal tahun 2021 bisa disosialisasikan kemasyarakat dan selanjutnya diterapkan," demikian Pranoto.**(dtk)**

Wanda/rb

PANTAU : Anggota Satlantas Polres RL melaksanakan kegiatan Patroli Blue Light, yang salah satunya melakukan pantauan dan pengaturan lalulintas di titik rawan padat lalulintas saat malam hari.

Patroli Blue Light Setiap Malam

CURUP – Polres Rejang Lebong (RL) melalui Satuan Lalulintas (satlantas) mereka berupaya agar arus lalulintas di beberapa titik padat lalulintas, arus tetap berjalan lancar. Tidak hanya siang hari, saat ini Satlantas juga sudah rutin menggelar kegiatan patroli blue light atau patroli lantas pada malam hari.

Diungkapkan Kapolres RL AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH melalui Kasat Lantas Aan Setiawan, S.Sos, M.Si mengungkapkan, saat ini kegiatan patroli Blue Light sudah digelar rutin setiap malam. Khususnya diwilayah pusat kabupaten atau diseputaran Kota Curup. ''Kegiatan Patroli Blue Light ini untuk melakukan pemantauan keamanan khususnya kelancaran arus lalulintas," sampai Aan.

Dilanjutkan Aan, selain untuk memastikan kelancaran arus lalulintas pada malam hari, juga untuk membantu satuan lain memantau kondisi kemananan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) diwilayah hukum (Wilkum) Polres RL. Terutama dalam suasana perayaan Nata dan Tahun baru (Nataru) saat ini.

Ditambahkan Aan, terkait pandemi Covid-19, mereka juga siang hari semakin meningkatkan kegiatan patroli, tidak hanya patroli kamseltibcar lantas. Melainkan juga melakukan sosialsasi terkait prokes covid-19, terutama bagi pengendara. ''Karena memang masih banyak masyarakat, termasuk pengendara tidak menggunakan masker dengan, bahkan tidak menggunakan masker sama sekali," imbuh Aan. **(dtk)**

Iklan Mini BERDAYA MAKSI
Tarif MURAH dengan Jangkauan LEBIH LUAS
Tarif Iklan Rp 5.500 per baris. Minimal 3 baris, maksimal 10 baris.
KOTA BENGKULU : GRAHA PENA, Jl. P. Natadirja No. 69 Km 7 Telp (0736) 22060 & (0736)-20882
CURUP : DEPOT KORAN YANTO (samp wrg Kopi Ria), Jl. Merdeka No. 219 Telp (0732) 23516
MANNA : WAHAB ANANG AGENCY, Jl. Jend. Sudirman Simpang Tiga Rukis, Telp (0739) 21407

• JUAL TANAH •
LT 10x20, Lok. Prumnas Pinang Mas, SHM, Hrg Nego. Tanpa Perantara. Hub. 085228004888

• KEHILANGAN •
SERTIFIKAT, Tanah Wakaf No.00001/Tj.Agung, NIB 07.06.11.1200002, A/n Drs Buyung Jundran, Almt Desa Tj. Agung Kec. Ulu Talo Kab. Seluma

• RUANG USAHA •
DIJUAL, 2 Ruko skaligus, co2k utk kntor, Jl.S.Parman No.19, Kota Bkl, Masing 2, 3 Lantai, LT 282 m2, LB 408 m2, Hrg 3M, Rumi 081804057800 / 08112959596

DIJUAL RUMAH
Lokasi di UNIB Belakang Gang Melati (persis depan Gedung Rektorat UNIB)
beserta dengan 10 kamar kosan aktif.
dari jalan Raya Kandang Limun hanya berjarak 100m
ukuran tanah 20x20m.
lokasi strategis untuk investasi kos-kosan
buka harga 1.1milyar (nego)
Hubungi:
Ibu Eti 081317567743

JUAL TANAH/RUMAH
Luas Tanah 634 M2, SHM,
Rumah Fas :
3 Kmr Tidur, 1 R. Tamu,
1 R. Tv/Keluarga,
2 Teras Muka dan Belakang,
1 R. Makan, 2 K. Mandi, 1 R. Masak
Tanah Sudah Dipagar Keliling,
Pagar Besi dan Tembok
Alamat : Jl. Kapuas 3 Dalam Rw. 05/ Rt. 17 No. 34
Kel. Padang Harapan Bkl
Hubungi :
0878 9496 1917
0819 1931 8688
(Berminat silahkan cek lokasi)

Pertanyakan Lanjutan Pembangunan Ringroad

KEPAHIANG – Salah satu usulan yang disampaikan masyarakat ke DPRD Kabupaten Kepahiang dalam reses masa sidang III 2020 waktu lalu yakni keberlanjutan pembangunan jalan ringroad Desa Pelangkian – Tebat Monok. Disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, RM Johanda, S.Pd, usulan tersebut datang dari konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Kepahiang.

Menurutnya, harapan peningkatan jalan ringroad tersebut sangat dibutuhkan masyarakat Kecamatan Kepahiang, guna mempermudah akses para petani dalam membawa hasil kebunnya ke luar. "Salah satunya usulan pembangunan jalan ringroad, ini merupakan sarana bagi masyarakat petani melalui perkebunan mereka," sampai Johanda.

Di sisi lain, harapan Pemkab Kepahiang agar status jalan ringroad Desa Pelangkian – Tebat Monok sepanjang 5 km dan lanjutan pembangunan jembatan Musi II, bisa dialihkan menjadi jalan nasional dan dianggarkan pembangunannya dalam APBN, hingga saat ini masih menggantung dan belum menemukan kejelasan. Pasalnya pemerintah pusat memberikan syarat untuk pengalihan. Pemkab Kepahiang harus sudah meningkatkan pembangunan jalan minimal hingga pembangunan lapisan penetrasi.

Sementara untuk meningkatkan pembangunan jalan, Pemkab Kepahiang mengaku kesulitan lantaran keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah. Padahal Pemkab sudah menggelontorkan anggaran dengan total Rp 86 miliar selama beberapa tahun terakhir, dan hanya sanggup melakukan pembukaan badan jalan saja dan pembangunan awal jembatan Musi II.

"Syarat agar jalan ringroad bisa dialih status menjadi jalan nasional, minimal kondisinya sudah lapen atau pengerasan, itulah kemungkinan belum disetujui oleh pemerintah pusat. Sementara saat ini APBD Kabupaten belum mampu untuk menganggarkan peningkatan jalan tersebut," jelas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang, Rudi Andi Sihaloho, ST.

Wacana diusulkan menjadi jalan nasional, dijelaskan Rudi, agar pemerintah pusat dapat mengakomodir peningkatan jalan tersebut menjadi hotmix. Menurut dia, pembangunan peningkatan jalan ringroad tidak lagi diusulkan ke Pemerintah Provinsi Bengkulu lantaran Pemprov tidak bisa menganggarkan pembangunan jalan tersebut.

"Itulah makanya provinsi maupun pemerintah pusat tidak bisa menganggarkan pembangunnanya, kalau Pemkab punya dana yang tentu sudah dibangun lapen. Tapi saat ini belum sanggup, karena anggaran yang tersedia untuk prioritas pembangunan infrastruktur lain," jelas Rudi.

Sebelumnya usulan alih status jalan kabupaten menjadi jalan nasional tersebut sudah diajukan Pemkab Kepahiang sejak tahun 2017 lalu. Namun hingga saat ini belum disetujui pemerintah pusat lantaran syarat agar Pemkab lebih dulu meningkatkan pembangunan jalan tersebut yang menjadi kendala.**(sly)**

Pastikan Keaktifan 303 IKM

KEPAHIANG – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Kepahiang, mencatat ada sebanyak 303 Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Kepahiang. Untuk memastikan apakah seluruh IKM tersebut masih aktif atau sudah berhenti, Disperinaker Kepahiang akan melakukan pendataan ulang.

Dari pendataan ulang juga akan diketahui apakah IKM sudah miliki Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau belum. Karena untuk menembus pasar nasional dan pasar internasional, IKM wajib sudah harus mengantongi HAKI.

Diungkapkan Kepala Disperinaker Kepahiang Yurnalis, SE, M.MPd, dari hasil pendataan ulang yang dilakukan akan terlihat jelas mana saja IKM yang masih aktif atau IKM yang sudah berhenti. Untuk mendukung dalam proses pemasaran, IKM perlu mengantongi HAKI dan untuk penerbitan itu pihaknya akan memfasilitasinya.

"Kita belum mengetahui apakah IKM di Kepahiang sudah miliki HAKI atau belum, kalau memang belum, maka akan kita fasilitasi pengurusan HAKI, sehingga pemasaran yang dilakukan bisa menembus pasar yang lebih luas lagi. Tentunya berdampak pada peningkatan ekonomi industri tersebut nantinya," kata Yurnalis.

Diakui Yurnalis, jika dilihat dari data lama, ada berbagai IKM di Kabupaten Kepahiang seperti yang bergerak di bidang produksi kopi bukuk, membatik dan sejumlah kerajinan tangan lainnya. Selain akan memberikan fasilitas untuk mendapatkan HAKI, Disperinaker Kepahiang juga akan mendorong untuk mempunyai sertifikat halal dari MUI khususnya industri penganan, sehingga dalam proses pemasaran tidak ada kendala lagi.

"Saya yakin kalau administrasi IKM lengkap bisa saja produk asal Kabupaten Kepahiang menembus ke pasar nasional bahkan pasar internasional," jelas Yurnalis.

Yurnalis mengimbau masyarakat Kepahiang yang mendirikan IKM supaya melaporkan ke Disperinaker Kepahiang sehingga pendataan bisa dilakukan. Karena ke depan kemungkinan akan ada sejumlah bantuan yang diberikan untuk mendukung perkembangan IKM di kabupaten ini.

"Masyarakat bisa aktif untuk melaporkan IKM yang didirikan, karena pemerintah memiliki kewajiban untuk mendukung mengembangkan IKM lokal, dengan harapan ke depannya tercipta peningkatan ekonomi masyarakat yang berpengaruh terhadap perkonomian daerah," beber Yurnalis.**(sly)**

22 Izin Usaha Kopi

KEPAHIANG – Dari puluhan pelaku usaha warung kopi atau coffee shop di Kabupaten Kepahiang hingga saat ini baru 1 coffee shop yang sudah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang. Kepala DPMPTSP Jono Antoni, S.Sos, mengungkapkan selain telah mengeluarkan 1 izin kepada usaha coffee shop, pihaknya juga telah mengeluarkan sebanyak 21 izin kepada pelaku usaha kopi kemasan yang ada di Kabupaten Kepahiang.

"Saat ini dari puluhan pelaku usaha coffee shop maupun kopi kemasan, baru 22 usaha yang sudah mengurus perizinan. 1 untuk coffee shop dan 21 untuk usaha kopi kemasan," terang Dedi.

Diakui Dedi, pada dasarnya tidak ada kendala yang dialami pihaknya dalam melakukan sosialisasi tentang perizinan usaha terkait pengelolaan kopi ini. Hanya saja, kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini memang sedikit jadi hambatan bagi pelaku usaha untuk bisa terus berkembang. Ini juga akhirnya berdampak terhadap angka pengajuan perizinan usaha kopi masuk ke DPMPTSP.

"Kita perlu sadar bahwa kondisi Covid-19 ini memang menghambat banyak hal, mulai dari waktu hingga anggaran. Namun demikian kami tetap akan terus melakukan sosialisasi mengenai kondisi ini, dengan melibatkan beberapa sektor terkait. Sosialisasi terus kami gencarkan, baik di media cetak maupun melalui beberapa baliho yang kita pasang. Pada dasarnya para pengusaha kopi yang ada di Kepahiang ini mau mengajukan perizinan, namun memang terkendala pada kondisi wabah yang terjadi saat ini," paparnya.

Dedi menambahkan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan sosialisasi sekaligus pendataan terkait usaha kopi yang potensial di Kabupaten Kepahiang.

"Salah satu kendala kita adalah usah kopi rumahan. Mereka hanya menjual di sekitar rumah saja. Kadang kalau ada kopi, mereka jualan. Kalau tidak ada kopi, mereka tak berjualan," terangnya.**(sly)**

ARIE/RB

RAZIA: Sejumlah pengendara motor yang melanggar lalu lintas dikenakan sanksi tilang. Razia kendaraan bermotor ini dilakukan Sat Lantas Polres Kepahiang Sabtu (26/12) malam dan Minggu (27/12) sore.

Tertibkan Balap Liar, 31 Motor Ditilang

KEPAHIANG – Sebanyak 31 unit sepeda motor ditilang petugas Sat Lantas Polres Kepahiang dalam kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor (ranmor) baik umum maupun pribadi yang digelar Sabtu (26/12) malam dan Minggu (27/12) sore. Razia ini dilaksanakan di ruas jalan kawasan perkantoran Desa Kelobak, Kecamatan Kepahiang.

Kapolres Kepahiang AKBP Suparman, S.IK, M.AP melalui Kasat Lantas Iptu Fery Octaviary, S.IK mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan guna menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang adanya balap liar di perkantoran Kelobak yang sudah meresahkan warga sekitar. "Untuk hari Sabtu malam, kita berhasil mengamankan 15 unit motor. Dan, tadi sore (kemarin, red) sebanyak 16 unit motor. Kegiatan ini juga bentuk pertanggungjawaban Polri dalam menjaga keamanan kenyamanan dan ketertiban masyarakat," ungkap Fery.

Fery menambahkan, setiap hari pihaknya mengadakan razia di kawasan sekitar. Namun para remaja tersebut kerap kucing-kucingan dengan aparat yang akan melakukan penertiban. "Kadang sudah kita tertibkan, mereka malah kucing-kucingan, saat petugas kita pergi, mereka mulai lagi. Tapi kita tetap akan tingkatkan pengawasan di wilayah sekitar guna mengantisipasi aktivitas balap liar ini," ujar Fery.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat khususnya para remaja yang kerap melakukan aksi balap liar, bahwa pihaknya tidak akan main-main dalam melakukan penindakan atas aksi yang kerap meresahkan masyarakat ini. "Akan langsung kita tindak. Untuk itu kita harapkan bantuan masyarakat untuk menyampaikan informasi atas kegiatan balapan liar tersebut kepada Polres Kepahiang," jelas Fery.**(sly)**

Tidak Ada UMKM Tutup Akibat Dampak Covid-19

KEPAHIANG – Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepahiang, Husni Thamrin, SE menyatakan hingga saat ini belum ada UMKM dan koperasi di Kabupaten Kepahiang yang tutup akibat dampak Covid-19. Meski demikian hampir seluruh perekonomian daerah nyaris terganggu lantaran beberapa program pemerintah daerah tidak bisa berjalan maksimal.

"Kalau untuk bantuan kepada UMKM dan koperasi memang tidak ada, karena pelaku UMKM khususnya sudah masuk dalam lingkup masyarakat. Jadi kalau memang terdampak, pelaku UMKM bisa melapor kepada pemerintahan desa atau kelurahan," terang Husni.

Di Kabupaten Kepahiang saat ini ada sebanyak 2.300 UMKM formal dan 96 koperasi. Khusus untuk koperasi, Husni mengatakan sampai saat ini tidak ada koperasi yang melaporkan kepada pihaknya terkait penutupan aktivitas koperasi di Kabupaten Kepahiang. Hanya saja ia mengakui, bahwa rata-rata koperasi di Kabupaten Kepahiang terdampak Covid-19, namun tidak sampai tutup. Begitu juga dengan UMKM formal, sampai saat ini belum ada yang tutup.

"Namun kalau UMKM non formal yang pelakunya kadang berdagang dan kadang juga bertani, itu diluar pantauan kita. Karena bisa jadi di sektor perdagangan mereka terdampak, namun masih terus berkebun dan mendapatkan manfaat hasil kebun," jelas Husni.**(sly)**

Kemenag Rencana Dirikan KUA di Semidang Lagan

BENTENG – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) mengusulkan pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA) defenitif di Kecamatan Semidang Lagan.

Kepala Kantor Kemenag Benteng, H. Sipuan, S.Ag menjelaskan, dalam rencana pembentukan KUA Kecamatan Semidang Lagan ini, pihaknya sudah menyampaikan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Bengkulu. Dalam penyampaian usulan tersebut pihaknya menyebutkan jika ini penting segera dibentuk. Mengingat di Kecamatan tersebut belum memiliki KUA defenitif.

"Dalam mengajukan usulan ini, kita sudah menyiapkan, mulai dari Perda Pembentukkan Kecamatan Semidang Lagan yang merupakan Kecamatan baru yang berada di Kabupaten Benteng. Kemudian selain itu perihal hibah lahan dari masyarakat untuk tempat pembangunan gedung KAU juga sudah kita sampaikan," ungkapnya.

Lanjut Sipuan, selagi menunggu dibentuknya KUA Semidang Lagan yang defenitif, ia sudah menetapkan pelaksana tugas (Plt) kepala KUA Semidang Lagan, semua ini dilakukan agar bisa mendapatkan pelayanan secara cepat di KAU sementara di Desa Lagan Bugin.

"Sehingga untuk saat ini, untuk penerbitan buku nikah bagi calon pengantin yang akan segara menikah, masih akan dikeluarkan oleh KUA Kecamatan sebelum adanya pemekaran Kecamatan Semidang Lagan. Seperti ada warga dari Desa Semidang yang akan melaksanakan pernikahan, maka penerbitan buku akan d keluarkan oleh KUA Karang Tinggi," tutup Sipuan. **(jee)**

BLT Masuk Program Prioritas

BENTENG - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun anggaran 2021 telah dilaksanakan Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Pondok Kelapa. Hasilnya disepakati empat item yang akan menjadi prioritas anggaran. Diantaranya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), pembangunan pamsimas, jalat rabat beton dan siring pasang.

Ketua Badan Permusyawaratan (BPD) Sidorejo, Jemino menyampaikan dalam musrenbangdes masyarakat tidak terlalu banyak usulan mengenai pembangunan infrstruktur desa. Melainkan lebih mempercayakan kepada pemerintah desa untuk item penggunaan anggaran tahun depan. Entah itu untuk penyaluran BLT ataupun pembangunan infrastruktur.

''Dalam musrenbangdes tidak terlalu banyak warga mengusulkan. Tapi mereka lebih percayakan ke pemerintah desa untuk menyusun rencana penggunaan anggaran tahun depan," ungkapnya.

Kades Sidorejo, Dani Pratikno mengatakan khusus untuk infrastruktur tersebar di dusun I, II dan III. Seperti siring pasang merupakan lanjutan pada tahun sebelumnya, pamsimas dibangun menggunakan dana sisa dari penyaluran BLT.

''Rabat beton ada 2 titik di dusun II dan III. Jika BLT tak disalurkan, infrastruktur khususnya pamsimas akan kita maksimalkan. Kami juga laksanakan MDST infrastruktur tahun ini," ujarnya.

Dani mengatakan di sisi lainnya masyarakat meminta adanya perbaikan jalan kabupaten yang sudah rusak parah. Terutama jalan menuju Desa Harapan. Tentunya hal ini akan disampaikan kepada Pemkab Benteng.

''Usulan tentang jalan menuju Desa Harapan sudah lama kita upayakan. Bahkan mengupayakan melalui program TMMD. Kita masih menunggu respon Pemkab Benteng. Semoga tahun depan terealisasi," terangnya

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Tomi Marisi melalui Kabid Kabid Pemberdayaan Pemerintah Desa, Dinas PMD Benteng Nenny Zarniawati menjelaskan, memang BLT tetap dianggarkan dan diprirotaskan pada APBDes 2021. Sebab demi membantu dan memperbaiki perekonomian masyarakat yang terdampak akibat Covid-19.

"Untuk program seperti infrastruktur diperbolehkan dianggarkan, namun setelah program BLT dan pemulihan perekonomian sudah dianggarkan oleh pemerintah desa," pungkasnya. **(jee)**

JERI/RB

PUNGLI: Wisata Danau Gedang di Desa Pasar Pedati yang diduga melakukan punggutan terhadap pengunjung.

Pungutan Rp 10 Ribu di Danau Gedang Ilegal

BENTENG – Wisatawan yang menikmati keindahan alam Danau Gedang di Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) diduga dipungut sejumlah uang oleh beberapa oknum. Punggutan yang diambil itu mulai dari Rp 5 ribu untuk sepeda motor dan Rp 10 ribu untuk kendaraan roda empat, diduga pungutan itu ilegal. Sebab hasil konfirmasi **RB** kepada Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Destinasi Pariwisata, Dinas Pariwisata (Dispar) Benteng, Sandarman memastikan tidak ada izin atau rekomendasi untuk memungut uang dari wisatawan di Danau Gedang. Sebab Dispar hingga saat ini tidak meminta pengelola Danau Gedang menyerahkan pajak atau retribusi kepada Dispar.

"Kemudian untuk status pengelola wisata Danau Gedang tersebut memang sudah diserahkan dengan pihak ketiga. Namun sepengetahuan kita pihak ketiga tersebut hingga saat ini belum melakukan penggutan retribusi di lokasi tersebut. Sebab untuk izin pihak ketiga mengelola wisata Danau Gedang tersebut, hingga saat ini masih diproses dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benteng," tegasnya.

Dia menambahkan, jika ada oknum memungut parkir Rp 5 ribu untuk motor dan Rp 10 ribu untuk mobil, itu juga sudah termasuk pungutan liar (pungli). Sebab untuk motor biasanya hanya Rp 1 ribu dan mobil Rp 2 ribu. "Namun yang pasti kita tidak ada mengizinkan ataupun surat tertulis yang mengizinkan mereka untuk melakukan punggutan di lokasi wisata Danau Gedang tersebut," ungkapnya.

Kepala Desa (Kades) Padang Betuah, Purnawarman mengatakan, untuk dugaan pungutan ini telah berlangsung lama, dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kemudian untuk pengelola wisata Danau Gedang ini bukan juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa (Pemdes), karena sudah dikuasai oleh oknum tersebut.

"Dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa bertindak, sebab imbauan sudah dilakukan oleh Pemdes terhadap oknum tersebut. selain itu memang mereka sudah sejak lama mereka mengambil retribusi Rp 5 ribu hingga Rp 10 ributersebut. Alasan mereka, kalau mereka mendapatkan izin, namun kita memang belum pernah menanyakan langsung dengan dinas terkait," ungkapnya.

Salah Satu Pengunjung Beni membenarkan, jika saat ia masuk kekawasan di wisata padang betuah dipunggut retribusi sebesar Rp 5 ribu oleh oknum. Selain itu ia juga tidak diberikan karcis retribusi. "Iya kita memang dipunggut uang Rp 5 ribu sebelum masuk ke wilayah wisata Danau Gedang dan tidak juga diberikan karcis," ujarnya.

Saat **RB** ingin melakukan konfirmasi dengan oknum yang menarik pungutan kepada pengunjung tersebut, yang bersangkutan menolak memberikan konfirmasi untuk klarifikasi atas dugaan pungutan liar ini. Namun memang uang dari penarikan diklaim salah satunya, untuk kebersihan. **(jee)**

TPG 91 Guru Macet

Dana Kurang

BENTENG – Tunjangan Profesi Guru (TPG) 91 guru di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) macet. Padahal 710 guru lainnya sudah menerima pembayaran TPG triwulan ke IV, yakni untuk bulan Oktober, November dan Desember.

Kepala Disdikbud Benteng, Saidirman, SE, MM mengatakan hal ini lantaran anggaran yang di transfer dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan (Kemendikbud) kurang dari jumlah yang diperlukan.

"Semestinya anggaran yang ditransfer dari Kemendikbud ke kita untuk 810 guru dan pengawas, sebesar Rp 10,5 miliar. Namun Kemendikbud baru mengirimkan anggaran untuk pencairan TPG guru dan pengawas baru berkisar Rp 9,4 miliar. Sehingga dengan demikian kita belum bisa memberikan secara keseluruhan pencairan TPG. Hanya 710 orang yang sudah dicairkan TPG nya," ungkapnya.

Lanjut Saidirman, untuk 91 orang yang belum menerima pencairan TPG, akan dicover pada pencairan triwulan I di tahun 2021 mendatang. Apabila sudah masuk pada tahun depan, maka akan langsung diberikan sekaligus dengan TPG triwulan IV saat ini dan TPG triwulan I pada tahun 2021 mendatang. Sehingga tidak perlu ada ketakutan terhadap guru ataupun pengawas yang TPGnya belum dicairkan.

"Untuk yang 91 belum ada pencairan tersebut bukan faktor dari kita dan memang ada kesalahan dari Kemendikbud dalam mentransfer anggaran untuk pencairan TPG tersebut. Sedangkan untuk pencairan TPG triwulan IV, sudah kita cairkan sejak Selasa lalu (22/12). Semua TPG mereka sudah kita transfer ke setiap rekening guru dan pengawas tersebut," terangnya

Lanjutnya, untuk total keseluruhan guru dan pengawas yang menerima TPG di Kabupaten Benteng ini terdiri dari, 23 orang dari guru TK, 496 dari guru SD, 257 dari guru SMP dan terakhir sebanyak 25 orang pengawas, sehingga total keseluruhannya menjadi 810.

"Untuk data guru dan pengawas penerima TPG pada tahun 2021 kemungkinan akan terjadi perubahan data. Hal ini dikarenakan dipastikan ada guru ataupun pengawas yang pensiun, pindah tugas ke Kabupaten/Kota lainnya ataupun akan ada penambahan jumlah guru dan pengawas yang ada di Benteng ini," Tutup Saidirman. **(jee)**

Pekan Ini, Seleksi Satpol PP Diumumkan

BENTENG – Setelah beberapa waktu lalu, Satpol PP sudah melaksanakan tahapan seleksi terhadap 150 peserta calon honorer, maka pada pekan ini ditargetkan hasil seleksi akan diumumkan kepada calon peserta. Dari 150 peserta yang mengikuti tahapan seleksi honorer tersebut, diketahui jika hanya ada 130 honorer yang akan diterima dan 20 peserta dinyatakan gugur.

Hal ini diungkapkan langsung oleh, Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Aparatur (SDA) Satpol PP Benteng, Erni, S.Sos. Dia menjelaskan, jika sesuai target awal, maka seleksi tenaga honorer Satpol PP tahun 2021 mendatang akan diumumkan pekan ini atau sebelum tahun 2021.

"Kita besok (hari ini, red) akan berkoordinasi dengan Kepala Satpol PP berkenaan akan mengumumkan hasil seleksi ini. Apabila nantinya Kepala Satpol PP sudah menyetujui, maka rabu akan kita selesaikan. Semoga rencana kita sesua dengan rencana, sebab setelah 130 tenaga honorer yang dinyatakan lulus, maka selanjutnya mereka harus menyerahkan berkas kepada kita," jelasnya.

Dia menambahkan, Dalam tahapan seleksi ini, diikuti para calon tenaga honorer Satpol PP sebanyak 150 orang dengan mengikuti dua tahapan tes, yang terdiri dari tes fisik dan tes tertulis. Calon tenaga honorer pada tahun 2021 mendatang memang ada pengurangan, yang tahun 2020 ini jumlahnya ada 150, maka tahun 2021 dikurangi 20, sehingga hanya membutuhkan 130 tenaga honorer.

"Dengan adanya pengurangan tenaga honorer ini, maka kita memang akan benar-benar melakukan seleksi dengan ketat. Penilaian untuk memilih 130 tenaga honorer ini akan dilihat dari hasil tes fisik, hasil tes tertulis dan hasil evaluasi kerja yang telah dilaksanakan tenaga honorer selama satu tahun ini. Apabila selama satu tahun ini mereka bekerja maksimal, maka akan mendapatkan nilai plus," ungkapnya.

Lanjutnya, namun sebaliknya, apabila selama satu tahun ini tidak bekerja maksimal, jarang sekali masuk dan tidak melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan, maka akan menjadi nilai minus untuk peserta itu sendiri. Jadi mulai dari kedisiplinan, kepatuhan, kinerja keseluruhan itu menjadi pertimbangan dalam menentukan tenaga honorer pada tahun 2021 mendatang.

"Selan itu juga agar semua tenaga honorer kita bisa bekerja dengan maksimal, pada tahun 2021 mendatang kita akan melaksanakan evaluasi setiap tiga bulan sekali. Jadi apabila ada tenaga honorer yang tidak bekerja dengan maksimal dan bekerja tidak sesuai aturan, maka yang bersangkutan akan langsung digantikan dengan tenaga honorer yang baru," tutup Erni. **(jee)**

Januari Mulai Belanja

BENTENG – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bengkulu Tengah (Benteng) Senin (21/12) lalu sudah diketok palu. Saat ini RAPBD sudah diserahkan ke gubernur untuk dievaluasi. Diperkirakan Januari tahun depan sudah bisa dibelanjakan untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Benteng, Welldo Kurniyanto, SE, MM melalui Kepala bidang (Kabid) Anggaran, Ade Christian, S.STP, M.Si mengatakan jika evaluasi ini dilakukan untuk melihat item anggaran yang sudah disusun telah sesuai dengan aturan ataupun program kerja provinsi maupun pusat. Sehingga dengan begini apabila ada program kerja yang tidak sesuai, maka ada kemungkinan akan terjadi perubahan.

"Raperda sudah ketok palu dan sekarang masih dievaluasi gubernur. Kalau tidak ada halangan, insya Allah pada bulan Januari mendatang sudah bisa dibelanjakan. Untuk adanya perubahan, bisa saja terjadi, apabila dalam evaluasi ada yang dilakukan oleh gubernur ada yang kurang pas dengan program kerja yang ada," terangnya

Ade menambahkan, untuk diketahui secara keseluruhan belanja anggaran pada tahun depan mencapai Rp 830.034.208.073. Sementara dari sisi pagu anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dikbud mendapatkan anggaran terbesar dengan nominal Rp 180 miliar.

"Kemudian Diikuti Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp 100 miliar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hanya Rp 89 miliar. Lebih besarnya anggaran Dikbud dibandingkan dengan Dinas PUPR, disebabkan telah termasuk gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi bagi guru, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non fisik," ungkapnya.

kalau Dinkes ada penambahan dana BOK, sedangkan untuk Dinas PUPR pada tahun 2021 mendatang, untuk anggaran DAK diketahui mengalami penurunan. "Jadi Dikbud dan Dinkes berada di atas Dinas PUPR bukan tanpa sebab dan alasan, karena memang sudah termasuk gaji, semua tunjangan guru sertifikasi maupun non sertifikasi, hingga angaran DAK," ujarnya**. (jee)**

SEBARAN COVID-19

DI BENGKULU SELATAN

TOTAL KASUS 76 ORANG

Adapun rinciannya yakni,
- **3** orang dalam **PERAWATAN**
- **31 ISOLASI MANDIRI**
- **37** konfirmasi **SEHAT**
- **5** orang **MENINGGAL DUNIA**
- **SUSPEK** mencapai **247 KASUS**
- Probable **24 KASUS**

Bertambah 11 Kasus Positif

Dinkes Nyatakan Rusunawa Siap

KOTA MANNA – Adanya tambahan 11 kasus warga yang terkonfirmasi Covid-19 hingga kemarin (27/12), menambah daftar warga yang terkena virus Corona di Bengkulu Selatan (BS), yang totalnya sudah mencapai 76 orang.

Adapun rinciannya yakni, 3 orang dalam perawatan, 31 isolasi mandiri, 37 konfirmasi sehat dan 5 orang meninggal dunia. Sedangkan untuk secara keseluruhan total kasus suspek mencapai 247 kasus. Kemudian total kasus Probable 24 kasus.

Meskipun angka kasus tinggi, namun hingga saat ini warga BS masih enggan menempati ruang isolasi khusus yang disediakan Pemkab BS. Padahal Pemkab BS telah menyediakan Rusunawa Akbid Manna sebagai tempat warga yang terpapar virus Corona. Akan tetapi warga yang terkonfirmasi lebih memilih isolasi mandiri.

Kabid P2P Dinas Kesehatan (Dinkes) BS Ns Elfa Sari, S.KM, M.Kes mengatakan, tambahan 11 kasus tersebut berdasarkan rilis dari Provinsi Bengkulu. Sehingga untuk Kabupten BS disebutkan Elfa hingga kemarin kasusnya mencapai 76 orang termasuk yang sudah sehat.

Meskipun demikian Elfa mengaku untuk perawatan, tidak ada warga yang dirawat di rusunawa Akbid Manna. "Belum ada yang nunggu ya, tapi rusunawa siap," terang Elfa

Sebelumnya Kepala Dinkes BS Siswanto, S.Sos, M.Si menyampaikan, segala kebutuhan dan fasilitas pasien, sudah disiagakan oleh Dinkes di rusunawa.**(tek)**

RIO/RB

ANTISIPASI: Rusunawa Akbid Manna kembali disiapkan Pemkab BS mengantisipasi lonjakkan pasein Covid-19.

Ayo Patuhi Prokes Covid-19, Rumah Sakit Sudah Penuh Semua

BENGKULU - Kondisi rumah sakit rujukan Covid-19 yang sudah overload alias penuh oleh pasien Covid-19. Ternyata tak hanya terjadi di Provinsi Bengkulu saja, tetapi juga rumah sakit lain di Indonesia. Hal ini seperti diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI, Elva Hartati.

Diungkapkan wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu tersebut bahwa, solusi terbaiknya saat ini masyarakat harus benar-benar patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Selain itu, bila tidak ada kegiatan terlalu penting, sebaiknya tetap di rumah saja, serta menghindari kerumunan. "Dengan melaksanakan prokes, maka akan dapat meminimalisir penyebaran Covid-19," ungkapnya.

Dia berharap dengan makin disiplinnya masyarakat maka dapat menekan meningkatnya kasus Covid-19 di Provinsi Bengkulu yang kondisinya terus mengalami penambahan setiap harinya.

Sementara itu, menyikapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang tengah mengusulkan empat tempat sebagai rumah sakit darurat menangani Covid-19 di Provinsi Bengkulu, mengaku sependapat dan tentunya akan mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar segera memberikan persetujuannya untuk masyarakat Provinsi Bengkulu. **(zie)**

Alat Penunjang Vaksin Covid-19

BENGKULU - Beberapa alat penunjang pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah didistribusikan pemerintah pusat ke daerah. Peralatan tersebut berupa jarum suntik, handskun, dan peralatan yang dibutuhkan lainnya guna kelancaran proses vaksinasi nantinya.

Kadinkes Provinsi Bengkulu, H. Herwan Antoni, SKM, M.Kes mengatakan sejumlah kebutuhan penunjang sudah didroping pemerintah pusat. Selanjutnya, nanti akan didistribusikan ke kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu. Kendati demikian, mengenai kapan akan dilakukan pendistribusian, masih menunggu petunjuk dari pusat. "Alat-alat yang dibutuhkan sebagai penunjang proses vaksinasi nantinya sudah kita terima, dan sebelum vaksinasi dilakukan bakal kita distribusikan kepada Kabupaten/Kota," kata Herwan.

Lebih jauh dikatakan, dari informasi yang diterima pihaknya, saat ini vaksin masih dalam proses penyiapan. "Informasi terakhir yang kita terima, vaksinnya masih proses penyiapan seperti uji mutu, uji klinis, izin edar, dan fatwa kehalalan yang menjadi kewenangan pusat," jelasnya.

Herwan menyebut, nantinya untuk proses vaksinasi akan menunggu petunjuk pusat. **(zie)**

JERI/RB

PROKES: Semua pengunjung yang masuk dilakukan pengecekan suhu tubuh oleh petugas wisata.

Libur Nataru, Wisatawan Meningkat

Pengunjung Wajib Terapkan Prokes

BENTENG - Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghabiskan waktu dengan berkunjung ke tempat wisata. Dari pantauan RB di wisata Wahana Surya, Danau Gedang, dan Pantai Sungai Suci yang berada di kawasan Kecamatan Pondok Kelapa sangat ramai oleh masyarakat yang menikmati wisata menghabiskan waktu liburan. Semua pengunjung diwajibkan untuk menerapkan prokes.

Manajer Wahana Surya, Agus Suhartono menjelaskan, khusus Wahana Surya peningkatan kunjungan masyarakat naik tiga kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Terdata sejak Kamis hingga Minggu, diketahui sudah mencapai 1.600 pengunjung yang datang untuk menikmati semua permainan hingga suasana yang ada di Wahana Surya.

"Dengan adanya waktu libur saat ini memang dimanfaatkan semua warga untuk menikmati wisata. Sebab sejak Kamis hingga hari ini (kemarin, red) sudah ada sekitar 1.600 pengunjung. Dengan kondisi seperti ini jumlah pengunjung kita berangsur naik lagi semenjak adanya wabah Covid-19 melanda. Sebab jika dibandingkan dengan hari biasa jumlah pengunjung tidak pernah mencapai di angka 100 pengunjung," jelasnya.

Dia menambahkan, meskipun jumlah pengunjung wisata ramai, namun pihaknya tetap menerapkan prokes yang ketat. Sebab semua pengunjung yang ingin masuk harus mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian diukur suhu tubuhnya oleh petugas dan wajib menggunakan masker. Apabila ada pengunjung yang tidak menggunakan masker, maka dipastikan tidak diizinkam untuk masuk ke areal wisata.

"Kita pastikan tidak, semua pengunjung yang tidak menerapkan prokes tidak diperbolehkan masuk. Sebab sudah ada beberapa pengunjung yang tidak menggunakan masker, tidak kita izinkan masuk dan pengunjung tersebut harus mencari masker terlebih dahulu baru kita perkenankan masuk keareal wisata," tegasnya.

Sambung Agus, untuk item permainan yang ditutup seperti flying fox dan mainan kereta anak-anak. Kemudian ada beberapa item yang dibatasi agar tidak terjadi kerumunan. "Kemudian untuk pengunjung yang datang ke Wahana Surya dari berbagai daerah dan tidak hanya dari Provinsi Bengkulu. Sebab seperti warga dari Sumatera Selatan dan Riau banyak yang datang ke Wahana Surya untuk menikmati wisata Wahana Surya," demikian Agus.

Salah satu pengunjung, Aldi mengungkapkan, jika ia datang ke wisata Wahana Surya memang untuk memanfaatkan waktu luang liburan saat ini. Ia mengajak keluarganya dari Palembang untuk menikmati semua wahana permainan yang ada di Wahana Surya. Sebab wahana surya banyak item permainan dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar.

"Kita memang diwajibkan untuk menerapkan prokes kepada semua petugas, apabila tidak menerapkan prokes, maka kita akan ditegur oleh petugas yang ada di Wahana Surya," pungkasnya. **(jee)**

Hakim/RB

IKUT TERDAMPAK: Tampak bus PO. Putra Rafflesia yang memiliki trayek AKDP ikut terdampak.

Libur Nataru, Penumpang Bus AKAP Menurun

BENGKULU- Semenjak pandemi Covid-19, trayek **bus** antar kota antar provinsi (AKAP) jurusan Bengkulu - Jakarta sepi penumpang. Bahkan pada liburan tahun baru ini, jumlah penumpang jauh di bawah rata-rata hari biasa sebelum terjadi pandemi Covid-19. Akibatnya, pendapatan sopir bus AKAP anjlok dan kerap pulang tanpa membawa hasil.

Kepala Opreasional PO. Putra Rafflesia, Aswandi mengaku tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah dalam menghadapi kondisi usaha jasa transportasi yang semakin terpuruk ini. Sebab PO harus tetap melayani masyarakat yang masih membutuhkan jasa transportasi "Sejak Wabah Corona, penumpang sepi. Pada saat Libur Natal dan Tahun Baru saja cari 20 orang penumpang susah. Akibatnya, kami tidak ada pemasukan," katanya.

Dampak virus Corona sudah terasa dengan adanya penurunan jumlah penumpang. Sudah pasti terdampak, penumpang turun sekitar 30 persen untuk semua trayek ke luar kota antar provinsi, "Ya mau bagaimana lagi. Meski tidak mendapatkan penumpang yang banyak kita sebagai penyedia jasa mobilisasi orang, pasti berkurang penumpangnya, apalagi yang AKAP. Mungkin kalau yang angkutan dalam kota tidak terlalu terpengaruh dengan virus Corona ini," paparnya. Untuk menghadapi penurunan jumlah penumpang bus AKAP, PO. Putra Rafflesia juga bertahan dengan armada yang beroperasi untuk menekan biaya perawatan. Armada yang beroperasi jumlahnya hanya setengah dari biasanya. "Sekarang hanya 4 armada saja untuk pemberangkatan ke Pekan Baru dan Pulau Jawa," imbuhnya.

Ia juga mengatakan, beberapa PO tetap bertahan untuk trayek ke arah Jakarta. Hal ini dikarenakan penumpangnya sepi dan menghemat biaya operasional. Mungkin karena ada pembatasan pergi ke luar kota, penumpang juga turun drastis, jadi hanya melayani ke trayek yang masih ada penumpangnya, "Kami berharap penyebaran Corona itu bisa mereda dan angkutan kendaraan kembali normal," harapnya **(hkm)**

Tempat Tongkrongan Harus Patuhi Prokes

BENGKULU - Untuk menghentikan laju penyebaran wabah Covid-19 tidak dilakukan satu pihak saja. Melainkan melibatkan berbagai pihak, termasuk juga pelaku usaha yang berpotensi mengumpulkan banyak orang, seperti tempat tongkrongan anak muda.

Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Drs. Teguh Sarwono, M.Si mengatakan pada prinsipnya semua pihak, termasuk pelaku usaha wajib mematuhi protokol kesehatan (prokes). "Tempat hiburan anak muda, kafe-kafe, mereka seharusnya mematuhi protokol kesehatan. Memang ini menjadi dilema yang cukup pelik buat pemerintah dan pemda. Karena ada penanganan Covid-19 dan sekaligus pemulihan ekonomi nasional. Jadi pemerintah tetap memberikan keleluasaan kepada pelaku usaha untuk tetap aktif berbisnis, berusaha, tapi patuhi protokol kesehatan, disiplin prokes," ungkap Teguh.

Dia berpesan kepada para pelaku usaha agar benar-benar disiplin menerapkan prokes tersebut. Misalkan kapasitasnya sudah penuh, jangan lagi memaksakan untuk memasukkan pengunjung lainnya sehingga justru terjadi kerumunan.

Selain itu, mereka juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan prokes Covid-19. Seperti menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer. Mengatur tempat duduk agar jaga jarak, mewajibkan pakai masker, serta rutin menyemprot disinfektan. **(zie)**

Libur Nataru, Satgas Pantau Tempat Wisata

BENGKULU- Satgas Pol PP Provinsi Bengkulu akan menurunkan tim gabungan untuk memantau dan mengantisipas kerumunan di tempat wisata selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal ini dilaksanakan agar protokol kesehatan dapat benar-benar diterapkan dan di jalankan semua pihak.

Kasat Pol PP Provinsi Bengkulu, Murlin mengatakan, tim satpol PP Provinsi Bengkulu akan diterjunkan ke tempat-tempat wisata untuk mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan, terutama upaya mencegah penyebaran Covid-19," katanya.

Utamanya di sejumlah tempat yang berpotensi ramai saat libur Natal dan Tahun Baru, termasuk mengawasi pemakaian masker. Khusus libur hari Natal dan Tahun Baru ini, kita membentuk petugas khusus untuk menjaga lapangan. "Yang perlu kita waspadai adalah tingkat kerumunan di masyarakat, terutama yang ada di pantai panjang dan fasilitas publik," ucapnya.

Murlin menyebutan, Kalau ada kerumunan pengunjung, maka tim ini akan disebar pada beberapa lokasi ini untuk mengingatkan. "Begitu pula jika jumlah pengunjung sampai batas yang ditentukan, maka tim gabungan akan meminta kepada petugas di tempat wisata tersebut untuk tidak memasukan pengunjung lagi, sampai ada pengunjung yang keluar dari lokasi," katanya.

Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bengkulu juga mengimbau masyarakat untuk tinggal di rumah saja pada saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta tidak berbondong-bondong ke pantai maupun pusat perbelanjaan.

Satgas sendiri memprediksi akan terjadi lonjakan penderita virus Covid-19, apabila terjadi kerumunan maupun liburan ke tempat wisata Bengkulu. "Angka kasus Covid-19 dan penularannya di Bengkulu masih tinggi. Apabila tidak mendesak, sebaiknya mengurungkan niat berlibur, dan tetap diam di rumah," pesannya.

Ia menyebutkan, pada libur Natal dan Tahun Baru semua objek wisata akan dipantau oleh Satgas Dinas Pariwisata, Satpol PP, dan TNI/Polri. Jumlah kunjungan juga dibatasi. "Kalau di satu destinasi, pengunjung sudah melebihi 50 persen, maka warga akan diimbau untuk pergi ke tempat yang lain. Namun lebih baik diam di rumah saja, karena saat ini pandemi Covid-19 masih mengancam," ujarnya.

Dengan mencegah kerumunan, maka angka penyebaran Covid-19 bisa menurun. Pihaknya berharap masyarakat tetap waspada dan menggunakan masker saat di luar rumah. Bukan hanya ke pantai saja, tetapi pusat perbelanjaan seperti mal, supermarket juga terus dipantau petugas," paparnya. **(hkm)**